

Pengembangan Kebajikan Kewargaan (*Civic Virtue*) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Dikdik Baehaqi Arif¹

ABSTRAK Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan (*school civic education*) berperan penting dalam mengembangkan budaya kewargaan (*civic culture*) yang diperlukan dalam rangka membangun sistem politik demokrasi. Sebagai program kurikuler pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berorientasi untuk mempersiapkan warga negara muda agar memiliki kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat politik. Pada masyarakat Indonesia yang multikultural, budaya kewargaan perlu dibangun di atas fondasi kebajikan kewargaan dan komitmen kewargaan berdasarkan nilai dasar Pancasila. Tulisan ini membahas peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kebajikan kewargaan sebagai komponen penting budaya kewargaan dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: budaya kewargaan, masyarakat multikultural Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, kebajikan kewargaan, komitmen kewargaan.

Pendahuluan

Realitas masyarakat multikultural (*multicultural society*) Indonesia tergambar dalam masukan (input) siswa dalam lingkup pendidikan. Hampir di setiap lembaga pendidikan, baik dari mulai tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, dapat kita temui peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kelompok suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Bukan saja di lingkungan sekolah, mereka juga akan berhadapan dengan berbagai perbedaan lainnya di lingkungan sosial atau budaya mereka sehari-hari. Inilah kekayaan bangsa, sekaligus juga tantangan bagi para pendidik dalam merancang program pembelajaran yang mengakomodir keberagaman itu dengan tetap tidak melupakan fungsi dan tujuan pendidikan.

Menghadapi kondisi kemajemukan itu, para pendidik perlu berpikir ulang tentang bagaimana menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di kelas yang siswanya berbeda dalam suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan tim The LIFE Center

¹ Dosen pada Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta. *E-mail:* cikoracak@gmail.com

dan Center for Multicultural Education di University of Washington, Seattle USA, merumuskan pentingnya pemahaman kembali prinsip-prinsip pembelajaran (*learning principles*) untuk siswa yang multicultural. Laporan itu mengidentifikasi empat prinsip pembelajaran kontemporer yang perlu dipahami oleh penyelenggara pendidikan.

1. *Learning is situated in broad socio-economic and historical contexts and is mediated by local cultural practices and perspectives.*
2. *Learning takes place not only in school but also in the multiple contexts and valued practices of everyday lives across the life span.*
3. *All learners need multiple sources of support from a variety of institutions to promote their personal and intellectual development.*
4. *Learning is facilitated when learners are encouraged to use their home and community language resources as a basis for expanding their linguistic repertoires.* (The LIFE Center and Center for Multicultural Education, 2007)

Keempat prinsip pembelajaran di atas terasa tepat dipraktikkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Para siswa perlu diajak untuk memahami lingkungan belajar yang cukup luas, dimediasi oleh praktik dan perspektif budaya lokal, yaitu budaya yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya, genuine manusia Indonesia. Demikian pula bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas sekolah yang terbatas, tetapi juga dalam konteks dan nilai yang banyak di luar sekolah. Hal demikian karena setiap pembelajar membutuhkan sumber untuk pengembangan diri dan intelektual mereka.

Pada masyarakat yang multikultural, proses pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu menghargai, menghormati dan bekerjasama dengan orang/kelompok dari berbagai latar belakang; berperilaku mengutamakan kepentingan umum; mempromosikan hak individu, keanekaragaman dan kesetaraan; menjunjung kebenaran, cinta tanah air; tidak larut dalam pengkultusan tokoh, kelompok dan partai, ras, etnik, bahasa dan agama/keyakinan; mau mengakui kekurangan dan kesalahan, mau belajar dari kekurangan dan kesalahan, tidak mudah dihegemoni dan mudah mencari kambing hitam atau memanipulasi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak mudah berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain; dan kritis sesuai konteks ruang dan waktu (Arif,

2008). Nilai budaya itu diperlukan untuk membangun sistem politik demokrasi konstitusional, yang ditandai oleh adanya kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan (Chamim, 2003).

Dalam pada itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah memerankan peran strategis dalam memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan nilai dan sikap yang menghargai perbedaan, baik di lingkungan sekolah, maupun pada lingkungan luar sekolah yang lebih luas untuk terwujudnya kehidupan demokratis berkeadaban berdasarkan Pancasila.

Upaya di atas tidaklah hadir dengan sendirinya, tetapi mesti dirancang dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjebak pada formalitas belaka. Siswa tidak hanya difasilitasi untuk memahami keberagaman, tetapi siswa juga harus memiliki kebajikan/akhlak kewargaan (*civic virtue*) yang terdiri atas watak kewargaan (*civic disposition*) dan komitmen kewargaan (*civic commitment*) sebagai dasar mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam urusan pemerintahan demi terbentuknya budaya kewargaan (*civic culture*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Perspektif Budaya Kewargaan

Pemahaman tentang budaya kewargaan (*civic culture*) tidak bisa dilepaskan dari studi-studi tentang demokrasi. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963). *Civic culture* dipahami sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial, atau sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik (Mujani, 2007). Orientasi ini termasuk pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik secara umum, input dan output politik, dan peran seseorang dalam sistem politik. Diyakini bahwa variasi di dalam orientasi dan sikap ini mempengaruhi partisipasi dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas demokrasi (Mujani, 2007).

Dalam pembahasannya tentang orientasi politik itu, Almond dan Verba meyakini bahwa ada tiga jenis budaya politik: budaya politik parokial (*parochial*), budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial ditandai oleh tidak terdapatnya peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Hal itu terjadi karena terbatasnya diferensiasi dalam masyarakat. Pada kebudayaan ini, masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas, kecuali dalam batas-batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit (Kantaprawira, 1988), atau bahkan orang-orang bersikap apatis terhadap atau terasing dari sistem politik yang ada (Mujani, 2007).

Budaya politik subjek cenderung menjadikan orang bersikap aktif terhadap sistem politik yang secara struktural terdiferensiasi, khususnya terhadap sisi output dari sistem ini, namun bersikap pasif terhadap sisi input dari sistem tersebut. Artinya, masyarakat menganggap bahwa dirinya tidak memiliki peran (tiadanya orientasi politik diri) dalam berbagai kebijakan yang disusun oleh suatu sistem politik dan karenanya harus diterima.

Sedangkan budaya politik partisipan ditandai oleh adanya orientasi tidak hanya terhadap sistem politik yang terdiferensiasi secara struktural, atau terhadap sisi output sistem ini, tetapi juga terhadap sisi input dari sistem bersangkutan dan terhadap diri sebagai partisipan aktif.

Perpaduan budaya politik partisipan, subjek, dan parokial diyakini memiliki pengaruh positif bagi stabilitas demokrasi. Demikianlah dapat dihayati bahwa budaya kewargaan yang dikembangkan itu bukanlah sekadar budaya politik partisipan, melainkan budaya politik partisipan “plus yang lain”, kombinasi antara aktivisme dan pasifisme (Mujani, 2007). Dan kombinasi itulah yang melahirkan perilaku politik moderat, bukan radikal. Orientasinya bukanlah kepada perubahan yang bersifat revolusioner, melainkan kepada perubahan secara gradual. Itulah kultur politik demokrasi (Mujani, 2007).

Budaya dan tingkah laku demokratis dipahami sebagai kompleks gabungan beberapa unsur, yaitu: keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular (*secular civic*

engagement), sikap saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*), toleransi, keterlibatan politis (*political engagement*), dukungan terhadap system demokrasi, dan partisipasi politik (*political participation*) (Mujani, 2007)

Elemen budaya kewargaan yang paling sentral dan perlu dikembangkan adalah kebajikan/akhlak kewargaan (*civic virtue*). Yang dimaksud adalah kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (...*the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*) (Quigley & Bahmueller, 1991). Tentang hal ini Quigley dan Bahmueller meyakini bahwa kebajikan kewargaan merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewargaan (*civic disposition*) dan komitmen kewargaan (*civic commitment*).

Watak kewargaan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*). Sedangkan *civic commitment* adalah atau komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (...*the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*) (Quigley & Bahmueller, 1991, p. 11).

Masyarakat Multikultural Indonesia

Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation-state*. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu.

Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yang secara substantif dan prosedural menghargai persamaan dalam perbedaan dan persatuan dalam keberagaman, secara formal konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yakni “...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (alinea 2); “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” (alinea 3); “...maka disusunlah Kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepadadst...kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ..”(alinea 4),. Kemudian dalam Mukadimah Konstitusi RIS, “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan ...dst...kerakyatan...” (alinea 3); “....Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”. Selanjutnya dalam Mukadimah UUDS RI 1950, “...dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ...dst... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. (alinea2); “...yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ..dst...kerakyatan...dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna” (alinea 4). Kata rakyat yang selalu disebut dalam konstitusi tersebut pasti menunjuk pada masyarakat Indonesia yang multikultural dengan seloka bhinneka tunggal ika itu.

Pada tataran ideal semua konstitusi tersebut sungguh-sungguh menganut paham demokrasi dalam dan untuk masyarakat yang bersifat multikultural. Hal ini mengandung arti bahawa paham demokrasi konstitusional sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai saat ini merupakan landasan dan orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang bersifat multikultural. Untuk mewadahi multikulturalisme yang ada secara instrumental dalam ketiga konstitusi tersebut juga telah digariskan adanya sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bersifat umum,

langsung, bebas dan rahasia untuk mengisi lembaga perwakilan rakyat; partisipasi politik rakyat melalui partai politik; kepemimpinan nasional dengan sistem presidensial atau parlementer, perlindungan terhadap hak azasi manusia; sistem desentralisasi dalam wadah negara kesatuan (UUD 1945 dan UUDS 50) atau sistem negara federal (KRIS 49); pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; orientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat; dan demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006, Suparlan, 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 1 Transformasi Masyarakat Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*

Masyarakat Majemuk (<i>plural society</i>)		Masyarakat Multikultural (<i>multicultural society</i>)
terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur dalam satu unit politik yang tunggal.		sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Sumber: (Arif, 2008)

Perubahan cara berpikir pluralisme ke multikulturalisme yang melandasi realitas multikultural Indonesia adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.

Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai warga suatu bangsa. Sebagai dasar kehidupan bernegara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara.

Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diakui bahwa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sumber etika dan moral. Manusia Indonesia yang bermoral adalah manusia yang menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya. Di dalam sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi dan HAM. Seorang manusia Indonesia hanyalah mempunyai arti di dalam kehidupan bersama manusia Indonesia lainnya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Hal ini berarti manusia dan masyarakat Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang humanis dan mengakui akan hak asasi manusia. Di dalam sila kelima Pancasila, yang penting ialah penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno di dalam salah satu pidatonya. Di dalam sila keempat mengandung nilai-nilai demokrasi dan pandangan populis. Kehidupan bersama masyarakat Indonesia berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan kepada kepentingan penguasa atau kepada segolongan masyarakat yang *better off*. Di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno merupakan alat dan bukan tujuan di dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu berbagai kebijakan yang memaksa menghilangkan

kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bhinneka, dan oleh sebab itu, merupakan hak dari setiap suku bangsa untuk mengembangkan masyarakat dan budayanya, yang pada gilirannya menyumbangkan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Inilah inti yang dikemukakan di dalam TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Profil manusia Indonesia baru itu digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Profil Manusia Indonesia Baru

Pancasila	Nilai-nilai yang Disandang Manusia Indonesia	Sumber Nilai/Sarana
Ketuhanan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai etika • Nilai moral 	<ul style="list-style-type: none"> • Agama yang dihayati di dalam masyarakat Indonesia • Kebudayaan daerah(suku-suku Nusantara)
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> • HAM • Toleransi • Kerukunan hidup antarwarga/antara agama • Kerja sama global untuk kemakmuran dan perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran hukum/negara hukum • Kerja sama internasional
Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Saling menghargai perbedaan • Kemauan untuk bersatu • Menghormati simbol-simbol negara persatuan • Rasa bangga sebagai orang Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Indonesia • Sistem pendidikan dan persekolahan • Interaksi antarwarga/antarsuku • Pendidikan multikultural
Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai demokrasi • Populis (memihak kepada kepentingan rakyat) • Teknologi yang memajukan kemakmuran rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi • IPTEK
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa solidaritas sosial sebagai satu bangsa • Kerja sama dalam menanggulangi masalah nasional (gotong royong) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga-lembaga sosial tradisional yang masih fungsional di daerah

Sumber: (Tilaar, 2004)

Tabel di atas menunjukkan profil manusia Indonesia, yaitu manusia Pancasila yang sedang menjadi. Profil tersebut merupakan suatu proses perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terus berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalam kelima sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Keutuhan nilai-nilai tersebut menjiwai seluruh proses humanisasi manusia Indonesia. Di dalam proses humanisasi profil manusia Indonesia tersebut tentunya ada nilai-nilai yang mendapatkan prioritas karena tuntutan keadaan.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Kebajikan Kewargaan

Bagaimana membangun kebajikan kewargaan di sekolah, terlebih pada masyarakat multicultural Indonesia? Tantangan guru pendidikan kewarganegaraan sekarang adalah menjadikan mata pelajaran itu berkhidmat kepada, dan mendorong penguatan nilai-nilai kemanusiaan karena beragam persoalan sosial budaya yang muncul karena keanekaragaman yang ada. Proses pendidikan kewarganegaraan harus bersandar secara kukuh kepada budaya Indonesia untuk melahirkan pandangan dunia, nilai-benilai, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan keluruhan martabat manusia yang bertumpu pada kejujuran dan pertanggungjawaban. Sekolah menurut Banks sedapat mungkin mempersiapkan para siswa dari berbagai ras, etnis, budaya dan kelompok bahasa ke arah warga negara yang efektif dan merefleksikan budaya dan komunitas kewargaan (Banks, 2007).

Kebutuhan untuk membina generasi yang akan datang dengan kemampuan menyusun kerangka moral imajinatif kian penting bukan saja untuk menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang rasional dan saling menghargai, tetapi juga penting untuk menjaga keutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Perlu disadari, bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidaklah selalu berdampak positif, melainkan tersimpan beragam potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul. Karena itu, empati dan toleransi menjadi nilai dasar yang perlu terus dikembangkan baik dalam proses maupun sebagai output pendidikan. Membawa siswa pada persoalan

yang kompleks dan spektrum ruang kelas pendidikan kewarganegaraan yang luas dirasa tepat, karena sebagaimana dalam kajian Sosiologi, tindakan manusia tidak pernah terjadi dalam “pulau kosong”. Dalam konteks ini, pembinaan nilai-nilai kebijakan kewargaan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya sikap toleran, egaliter, dan partisipatif. Menurut Amin Abdullah, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Abdullah, 2005), upaya meminimalisir konflik yang terpenting (termasuk dalam masyarakat yang multikultural) adalah melalui penanaman kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*). Dan kesemua itu, dapat dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2005). Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan "Interest Minimalization" dalam Meredakan Konflik Sosial. In M. A. Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (pp. xi-xx). Yogyakarta: Pilar Media.
- Arif, D. B. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. In *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Banks, J. A. (2007). *Educationing Citizen in a Multicultural Society* (2 ed.). New York: Teachers College Press.
- Chamim, A. I. (2003). Civic Education di Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan Pengalaman. In S. Malian, & S. Marzuki (Eds.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (pp. 5-16). Yogyakarta: UII Press.
- Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.

- Suparlan, P. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- The LIFE Center and Center for Multicultural Education. (2007). *Learning in and out of School in Diverse Environment: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep*. Seattle: Center For Multicultural Education.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

PEMBELAJARAN PKN BERBASIS KONTEKSTUAL BAGI PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Oleh
H. Endang Dimyati
Dosen Kopertis Wilayah IV pada Prodi PPKn STKIP Garut

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh fenomena ahir-ahir ini yang menunjukkan adanya kecenderungan sebagian masyarakat khususnya generasi muda, lebih mengagung-agungkan budaya, sistem, dan pola tata-laku kehidupan asing, ketimbang menjunjung tinggi nilai budaya bangsa sendiri. Nilai-nilai luhur bangsa yang sejatinya dipegang kuat oleh masyarakat, mulai bergeser dan bahkan ditinggalkan. Sebagai akibatnya, rasa kebangsaan dan jatidiri bangsa di kalangan generasi mudasudah mengalami erosi yang sangat tajam, hal ini dapat membahayakan kelangsungan bangsa. Masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana pembelajaran PKN berbasis kontekstual memberikan kontribusi bagi penguatan karakter bangsa pada peserta didik SMA di kabupaten Garut.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pembelajaran PKN berbasis kontekstual bagi upaya penguatan karakter bangsa dikalangan peserta didik SMA di kabupaten Garut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi/guru PKN di lapangan dalam upaya pengembangan kesadaran berbangsa. Target khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terciptanya model penguatan karakter bangsa melalui pembelajaran PKN berbasis kontekstual.

Kata Kunci :Pembelajaran PKN berbasis kontekstual, Penguatan Karakakter bangsa.

DASAR PEMIKIRAN

Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini, terjadi karena warga negara telah kehilangan jatidiri bangsa yang pada masa lalu amat disegani dan dihormati bangsa lain. Jatidiri bangsa tersebut digambarkan sebagai kepribadian bangsa yang terwujud dalam pengamalan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Azis wahab,2009:19). Sejalan pemikiran itu, apabila kita mencermati perjalanan hidup bangsa ini, selama satu dasawarsa di era reformasi, nampak adanya indikasi bahwa bangsa ini telah kehilangan stamina dan jatidiri sebagai bangsa Timur yang memiliki falsafah hidup yang adiluhung, yaitu Pancasila. Akibatnya kondisi negeri ini semakin carut-marut (Damardjati Supadjar dalam S. Koesman, 2009:19).

Selain itu, bahwa saat ini gejala iptek yang kian ganas melalui multi media elektronik-cetak dengan segala keindahan-kemewahan dan kemudahannya “yang serba waah” berikut tuntutan materiilnya yang cukup tinggi, melahirkan kehidupan keluarga yang sarat keinginan dan kesibukan sebagaimana “pola kehidupan (*lif style*) modern” yang pada akhirnya secara perlahan namun pasti membawa ke arah rasionalisme, sekularisme yang materialistik dan egoistik serta mulai menggeser dan mengerosi standar baku yang ada, termasuk dalam kehidupan keluarga (A.K. Djahiri (2006: 5).

Pada intinya terpuruknya bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini, sesungguhnya disebabkan oleh krisis nilai moral. Kasus tindakan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa merajalela dari hulu sampai hilir, tindak kekerasan, kriminalitas, narkoba, AIDS, runtuhnya keluarga, kehamilan di luar nikah, hilangnya rasa hormat kepada orang tua, guru dan pemerintah, pertikaian SARA, korupsi, polusi dan kerusakan lingkungan adalah tanda-tanda krisis besar yang melanda Indonesia. Keadaan seperti itu, terutama krisis

nilai moral terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena kurang berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda bangsanya (Suresman, 2007:1).

Dunia pendidikan di Indonesia telah melupakan tujuan utama pendidikan, yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Oleh karena itu pendidikan kita sangat memerlukan mata pelajaran-mata pelajaran yang menekankan dan berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa, *The End of Education is Character* (Ong Jumsai, 2004:12). Hasil akhir dari proses pendidikan adalah karakter. Untuk apa pendidikan jika tidak menghasilkan karakter yang baik. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengatasi kecenderungan negatif itu, diperlukan pendidikan yang mampu membangun peserta didik memiliki karakter yang baik.

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting agar dapat memulihkan sikap, mental dan psikologi generasi muda bangsa, memperkuat dan mengembangkan karakter dan kepribadian seseorang untuk menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*), warga negara yang produktif dan bertanggung jawab (*productive and responsibility*), mampu bertindak local dan berfikir global (*act locally but think globally*).

PEMBELAJARAN PKn BERBASIS KONTEKSTUAL BAGI PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Dinamika dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya terus menerus dan berkelanjutan dalam hal pengembangan kesadaran berbangsa. Pengembangan kesadaran berbangsa mengandung makna membangun kembali fondasi nasionalisme Indonesia (*Nation character building*). *Nation building* pada prinsipnya merupakan sebuah proses terus-menerus menuju terciptanya sebuah negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar ideologinya. (Simatupang, 1980:18-23). Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan

dilandasai suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak. “Umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya”(C.S.T.Kansil 1999:20).

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat dan atau menjadi bagian dari suatu bangsa (*nation*) dan Negara (*state*) tertentu. Demikian dengan individu yang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegarajuga memiliki keyakinan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki sikap dan perilaku rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik.

Menurut Franz Magnis Suseno dalam buku Etika Kebangsaan-Etika Kemanusiaan (2008:19), merosotnya kesadaran berbangsa dan bernegara karena empat hal sekaligus sebagai tantangan ke depan, yakni sebagai berikut:

- a. Karena globalisasi, berkat kemajuan teknologi informasi dan transportasi, menjadikan seakan-akan kita telah menjadi warga dunia sehingga identitas sebagai bangsa yang mandiri dan mempunyai karakteristik sendiri menjadi lebur dengan bangsa lain yang juga hilang identitasnya. Akibatnya, tumbuh dan muncul budaya dunia/global. Identitas sebagai bangsa semakin tidak jelas. Kedaulatan semakin menjadi mitos. Ketergantungan antar Negara semakin tinggi.
- b. Karena kepicikan perasaan kedaerahan.Otonomi daerah telah merangsang nafsu yang merasa putera-puteri daerah untuk menguasai tempat basah. Posisi politis yang strategis dilihat sebagai kesempatan untuk memperkaya diri dan keluarga serta membangun “kerajaan” atau “*trah*” atau “*dinasti*” baru. Mereka kehilangan

wawasan dan perasaan solidaritas bangsa dan tanggung jawab untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

- c. Karena budaya *konsumisme hedonistik*. Sikap ini merupakan tantangan dan penyebab dari dalam diri kita. *Konsumisme* adalah sikap ketagihan para konsumen produk *kapitalisme* yang tidak saja para kapitalis memproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru untuk kepuasan masyarakat. Akibatnya muncul *life style* mewah yang sudah tidak memperhatikan lagi azas manfaat tetapi cenderung demi mengikuti trend gaya hidup yang *konsumtif hedonis*. Dampaknya adalah kurang menghargai produk lokal yang dipandang kurang memberikan *pretise* gaya hidup modern yang salah diartikan.
- d. Karena ideologi-ideologi totaliter. Suatu ideologi dikatakan totaliter karena paham atau ajarannya yang mengklaim memiliki kebenaran mutlak serta menuntut ketaatan tanpa *reserve*. Ideologi *komunisme* dan *nazisme* merupakan ideologi totaliter yang dikelompokkan sebagai ideologi ekstrim kiri. Sedangkan ideolog religius yang *fundamentalis* dikelompokkan sebagai ideologi totaliter/ekstrim kanan. Keduanya dapat mengancam akan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian Kesadaran nasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adalah berpikir kritis, rasional, dialektik, proaktif, dan holistik tentang hari depan bangsa berdasar pengalaman saat ini dan berdasar pengalaman masa lampau. Kesadaran yang demikian menjadi dasar untuk membangun bangsa di hari depan yang lebih baik dari pada masa lalu dan masa kini. Apabila dijabarkan prinsip-prinsip dasar nasionalisme tersebut, meliputi antara lain: 1) cinta kepada tanah air; 2) Kesatuan; 3) dapat bekerjasama; 4) demokrasi dan persamaan; 5) kepribadian; dan 6) Prestasi.

Pendidikan Kewarganegaraan atau *citizenship education* atau *education for citizenship*, merupakan pendidikan yang mengarah pada upaya pembentukan karakter (*character building*) yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Cogan dalam Winataputra (2007:14) mengartikan *civic education* sebagai "... the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their

communities in their adult lives”. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Kemudian secara lebih fokus, Cogan (1998:13) mengemukakan bahwa:

Citizenship education has been described as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of being citizen, and the process of teaching society’s rules, institutions, and organizations, and the role of citizens in the well-functioning of society.

Berdasarkan pendapat Cogan di atas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan digambarkan sebagai kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakter-karakter warganegara, dan proses tentang aturan pengajaran masyarakat, institusi, dan organisasi-organisasi, dan peran warganegara dalam masyarakat yang berfungsi secara baik. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan pendapat Branson (1998:8-25), yang menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*). Yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Di lain pihak Azis wahab dan Sapriya (2011:97), menjelaskan bahwa *Civic Education* menekankan pada empat hal :

a) Pertama, *Civic Education* bukan sebagai Indoktrinasi politik, *Civic Education* sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. *Civic Education* seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembengunan bangsa yang bertanggung jawab.

b) Kedua, *Civic Education* mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta

berdaya nalar tinggi. *Civic education* memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

c) Ketiga, *Civic Education* adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas (*watering down*) seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. *Civic education* membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi dilingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat.

d) Keempat, *Civic Education* sebagai laboratorium demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian *Citizenship education* atau Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Kecerdasan warganegara yang dikembangkan untuk membentuk warganegara yang baik, bukan hanya dalam dimensi rasional dan intelektual semata, melainkan juga dalam bentuk

dimensi spiritual, emosional dan sosial. Dengan kata lain misi pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma yang direvitalisasi, adalah mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelegence*), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warganegara (*civic partisipation*).

Sementara untuk mewujudkan misi PKn tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif. Maka salah satu pendekatan pembelajaran yang relevan kearah itu adalah pembelajaran berbasis kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari untuk menemukan makna. Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berfikir kritis dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjangnya. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari untuk menemukan makna.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kontekstual dalam penelitian ini secara khusus diarahkan untuk siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari, terkait pembinaan kesadaran berbangsa yang terus dinamis bagi penguatan karakter bangsa pada siswa SMA di Kabupaten Garut. Dalam tujuan ini diperlukan : (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter atau sikap mental, (4) komitmen yang kuat terhadap nilai dan budaya bangsa serta prinsip fundamental konstitusional.

KESIMPULAN

Pendidikan karakter menjadi kunci utama pembangunan warga Negara yang baik, sebab karakter akan menentukan wajah bangsa ini ke depan. Fenomena merosotnya jati diri dan karakter bangsa ini menjadi tanggung jawab besar pendidikan dalam menjembatani pembentukan kembali ke arah watak dan kepribadian bangsa ini ke depan.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang berbasis pada pendidikan perilaku bangsa ini, harus mampu menjadi mata pelajaran yang paling terdepan dalam menghasilkan dan membangun watak bangsa ini. Oleh sebab itu melalui pembelajaran PKn berbasis kontekstual peserta didik dipersiapkan dalam kehidupan nyata pendidikan sehingga apa yang ia terima relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Perlu dikembangkan metode dan strategi pembelajaran PKn berbasis kontekstual ini dalam upaya melahirkan generasi muda bangsa yang berkarakter sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2010) *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2009a) *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UPI.
- Cogan, J.J., (1999), *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: [wwwCICED](http://www.CICED).
- Cogan, J.J. dan Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: an Internasional Perspectiva on Education*. London: Kogan Page.

- Djahiri, K. (1984). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Laboratorium PMPKN IKIP Bandung.
- (2006). “Esensi Pendidikan Nilai-Moral dan PKn di Era Globalisasi” dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Gunawan, Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian(2008). *Mencintai Bangsa dan Negara*.Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Kuswarno, Engkus, 2009. *Metodologi Penelitian komunikasi, fenomenologi, konsepsi, pedoman dan contoh penelitiannya* , Bandung: Widya Padjadjaran.
- Lickona, T. (1987). “Character development in the family” dalam *Character Development in Schools and Beyond*. New York: Praeger.
- (1992). *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Masykur, Ali musa, (2012).*Nasionalisme di persimpangan*, Jakarta: Erlangga.
- Moustakas, S.W. , 1999, *Pehenomenological Reaserch Methods*. California : SAGE publication
- Mujiyanto, bambang (20007), *Metode Fenomenologi sebagai salah satu metodologi penelitian kualitatif dalam komunikologi*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan opini publik .
- Robertson, R. (1992). *Globalization Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publication.
- Sabatini, C.A., Bevis, G.G., Finkel, S.E. (1998). *The Impact of Civic Education Programs on Political Participation and Democratic Attitudes*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Somantri, Numan. (1975). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- Suryadi, Ace (2009) *Membangun Kompetensi SDM Yang mampu Bersaing di Era Global Melalui PKn (Masalah dan Tantangannya)*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.

- UNESCO-APNIEVE.(2000), *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni: Pendidikan Nilai untuk Perdamaian, Hak-hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kawasan Asia-Pasifik*, Buku Sumber UNESCO-APNIEVE untuk Pendidikan Guru dan Jenjang Pendidikan Tinggi, Kantor Prinsipal UNESCO untuk Kawasan Asia Pasifik, Bangkok dan Universitas Pendidikan Indonesia.
- The International Commission on Education for the Twenty-First Century. (1996). *Learning: The Treasure Within*, Report to UNESCO of The International Commission on Education for the Twenty-First Century.
- Wahab, Abdul Azis (2009) *Memantapkan Kembali jatidiri Bangsa Dalam Rangka Penguatan Dasar-Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- World Commission on the Social Dimension of Globalization. (2004). *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*. New York: ILO Publication.
- Winataputra, Udin (2008) *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif PKN Sebagai Wahana Pembangunan Karakter bangsa Indonesia.*, dalam "Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI., Volume 2, No. 1 Oktober 2008.
- Winataputra, Udin dan Budimansyah (2007) *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.*, Bandung Program Studi pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

**KONTRIBUSI KOMPETENSI GURU DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP
PEMBENTUKAN KARAKTER SOSIAL PESERTA DIDIK SMP NEGERI DI
KABUPATEN GARUT**

Oleh
Dr. Tetep, M.Pd
tevs_gaya@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembentukan karakter sosial menjadi salah satu sarana bagaimana bangsa ini mampu menciptakan kehidupan yang cinta damai dan manusiawi dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan IPS dalam mewujudkan karakter warga negara yang baik. Maraknya penyimpangan yang dilakukan generasi muda seperti perkelahian, pencurian, pelanggaran lalu-lintas, dan tindakan asusila, genk motor, perusakan barang orang lain, kejahatan seksual, pornografi, aliran sesat, yang notabene melibatkan anak seusia SMP-SMA, menjadi bukti betapa masih lemahnya pendidikan kita menyentuh karakter peserta didik. Pembentukan karakter sosial di sekolah harus dilakukan oleh berbagai komponen seperti guru, lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarganya dalam menularkan nilai-nilai karakter sosial yang dilandasi solidaritas, loyalitas, kasih sayang dan pengorbanan. Tujuan penelitian ini mengungkapkan “Kontribusi Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik SMP Negeri Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey yang dilakukan pada 17 SMP Negeri di Kabupaten Garut, yang mewakili kluster wilayah Garut Utara, Tengah dan Garut Selatan. Adapun variabel dalam penelitian ini meliputi Kompetensi Guru (X1), Iklim Sekolah (X2), dan Karakter Sosial (Y). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 450 orang responden. Analisis data hipotesis yang digunakan diuji dengan menggunakan uji Analisis Jalur yaitu mencari pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel penelitian yang diolah dengan bantuan *SPSS for windows*, IBM SPSS, dan *Microsoft Excel*.

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan 1) kompetensi guru terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik sebesar 2,7%. 2) iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik sebesar 3,39%. Penelitian ini merekomendasi perlunya penelitian lanjut tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter sosial bagi pengembangan keilmuan dan pendidikan IPS.

Kata kunci : *solidaritas, loyalitas, kasih sayang, pengorbanan.*

Pendahuluan

Kehidupan di Abad 21 dan peradaban teknologi informasi semakin mendorong proses transformasi dan mobilitas sosial suatu bangsa menjadi semakin tinggi dan menyebabkan kita untuk semakin peka dan kritis dalam menghadapi setiap perubahan, transformasi dan mobilitas sosial yang terjadi. Melek informasi

(*information literacy*) menjadi tugas berat pendidikan dalam melahirkan generasi yang cerdas dalam menemukan dan memecahkan solusi dari setiap perubahan dan permasalahan yang terjadi dengan mengedepankan kualitas hidupnya.

Kondisi pembelajaran IPS masih belum menyentuh tingkat kecerdasan yang diharapkan, terutama berkaitan dengan perkembangan akhlak dan moral peserta didik yang menyangkut aspek afektif dan psikomotorik, pendidikan kita baru mampu menyentuh ranah kognitif saja, sementara afeksi dan psikomotor seringkali tidak sejalan dengan kecerdasan kognitif yang diharapkan, bahkan dalam pembelajaran IPS masih bersifat dominasi kognitif-intelektual, seharusnya menurut Lasmawan (2010 hlm. 2-3) "...pembelajaran IPS itu harus membangun 3 kompetensi yaitu kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi intelektual". Itu juga yang diisyaratkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 bahwa "...pendidikan harus mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Masih banyaknya peristiwa yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan di Kabupaten Garut khususnya, seperti perkelahian di kalangan remaja, pencurian, pelanggaran lalu-lintas, dan tindakan asusila, genk motor, perusakan barang orang lain, kejahatan seksual, pornografi, kekerasan terhadap anak, bullying diantara peserta didik, dan kejahatan lainnya. Menegaskan bahwa pendidikan kita belum benar-benar menyentuh pada upaya memanusiakan manusia, apalagi peristiwa itu terjadi di kalangan peserta didik SMP-SMA sederajat membuat miris generasi bangsa ke depan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karakter dan karakter sosial tertanam dalam diri peserta didik, sebab secara perlahan bisa menggerogoti dan menghancurkan kebesaran bangsa ini. Hal ini serupa dengan pendapat Lickona (2013 hlm. 20-28) :

Terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan ke arah kehancuran suatu bangsa, yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ketidak-jujuran, rasa tidak hormat kepada orangtua, guru dan pemimpin, pengaruh adanya grup terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung-jawab, dan meningginya perilaku merusak diri.

Faktor tersebut melukiskan betapa pentingnya menghasilkan generasi yang semakin arif dan memiliki kecerdasan tinggi baik emosional, spiritual maupun sosial. Karakter sosial merupakan perwujudan kepribadian yang melambangkan kualitas karakter bangsa yang baik seperti mewujudkan sikap toleransi, menghormati, menghargai, kebersamaan, gotong-royong serta kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Sementara kekerasan, anarkhisme, tawuran antar pelajar, genk motor, pelecehan seksual, *bullying*, begal, prostitusi dan lainnya memberikan indikasi bahwa nilai-nilai karakter sosial yang ada pada kepribadian generasi muda kita menunjukkan kelemahannya dan bahkan memudar sehingga mengarah pada perilaku negatif.

Menurut pandangan Fromm bahwa kunci dari karakter sosial adalah pemahaman bahwa hidup adalah proses sosial yang menjadi dorongan psikologi pada energi

manusia dalam membentuk adaptasi dengan kebutuhannya yang tertuang dalam pemikiran, perasaan dan tindakan individu dalam membentuk masyarakat. Fromm (1955 hlm. 362) seperti dikutip Hall & Lindzey (1993:261), Fudyartanta (2012 hlm.332) mengungkapkan bahwa karakter sosial adalah :

... dimana manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, dimana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas, suatu masyarakat yang memberinya kemungkinan untuk mengatasi kodratnya dengan menciptakannya bukan dengan membinasakannya, dimana setiap orang mencapai pengertian tentang diri untuk menjadi manusiawi sepenuhnya.

Studi pendahuluan tentang karakter sosial ini, dilakukan pengamatan terhadap perilaku anak SMP Negeri di Kabupaten Garut, dari hasil pengamatan masih banyak terjadi bullying di kalangan peserta didik, terlibat dalam kegiatan balap liar, genk motor dan pertengkar antar kelompok. Berdasarkan itulah menunjukkan lemahnya pendidikan menyentuh potensi karakter sosial peserta didik selama ini.

Ada beberapa faktor yang diduga memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter sosial bagi peserta didik SMP khususnya antara lain faktor kompetensi guru, iklim sekolah, dan lingkungan keluarga atau lingkungan sosial. Seperti dijelaskan Yusuf (2007 hlm. 20-31) bahwa :

faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter seseorang terdiri atas pengaruh genetika atau pembawaan dan pengaruh lingkungan, sedangkan lingkungan yang mempengaruhinya ialah lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan kebudayaan, dan lingkungan sosial-kelompok.

Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan menyatakan bahwa dalam memasuki abad ke-21 guru memiliki peranan yang sangat strategis karena diharapkan dapat ikut membentuk karakter dan kecerdasan generasi muda "*moulding character and minds of young generation*" (Delors, 1996 hlm.1). Karenanya guru harus kompeten, seperti apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa kompetensi guru itu meliputi : 1) *Kompetensi Kepribadian*, 2) *Kompetensi Pedagogik*, 3) *Kompetensi Profesional*, 4) *Kompetensi Sosial*. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 26,17 % hasil belajar siswa (peserta didik) dipengaruhi oleh penguasaan dan kompetensi guru dalam materi pelajaran (Syaefudin, 2013 hlm.54).

Faktor lain yang terkait dengan pembentukan karakter sosial bagi peserta didik ini adalah iklim sekolah (*school climate*). Iklim sekolah adalah seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, etos, suasana batin, setiap sekolah (Wahyudi & Fisher, 2006 hlm. 513); (Fisher & Fraser 1991 hlm.31). Lebih lanjut Hoy dan Miskel (1987 hlm.102) menjelaskan : "*school climate is a relatively enduring quality of the school environment that is experienced by participants, affects their behavior, and is based on their collective perceptions of behavior in schools*". Iklim sekolah yang kondusif, nyaman dan menyenangkan cenderung memberikan pengaruh positif bagi pembentukan perilaku, budaya dan karakter, bahkan efektivitas pembelajaran bagi peserta didik. Kelemahan di lapangan masih banyaknya sekolah-

sekolah yang kurang memperhatikan iklim sekolahnya dalam mendukung kegiatan belajar peserta didiknya.

Guru mungkin banyak yang sudah berkompoten, tetapi semestinya diikuti oleh hasil dari kualitas pembelajaran yang dilakukannya. Kelemahan kompetensi guru serta ketidak kondusifan iklim sekolah, diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pendidikan menyentuh nilai-nilai afektif dan psikomotorik peserta didik, sehingga menimbulkan rendahnya nilai-nilai karakter tertanam dalam individu peserta didik. Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji Kontribusi Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik SMP Negeri di Kabupaten Garut.

A. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk memberikan tekanan yang jelas terhadap masalah yang akan diteliti, selanjutnya penulis merumuskan penelitian sebagai berikut Kontribusi Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik SMP Negeri di Kabupaten Garut?. Adapun rancangan penelitiannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompetensi Guru SMP negeri yang ada di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Iklim Sekolah rata-rata di SMP negeri di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana karakter sosial peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Garut?
4. Seberapa besar kontribusi Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik SMP Negeri di Kabupaten Garut?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui “*Bagaimana Kontribusi Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik SMP Negeri di Kabupaten Garut?*”

2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan, mengetahui :

- a. Kompetensi Guru SMP negeri yang ada di Kabupaten Garut
- b. Iklim Sekolah rata-rata di SMP negeri di Kabupaten Garut
- c. Karakter sosial peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Garut
- d. Besarnya kontribusi Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik SMP Negeri di Kabupaten Garut

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan konsep dan teori dalam pendidikan dan pembelajaran IPS sebagai mata pelajaran yang cukup strategis bagi

pembentukan karakter sosial peserta didik sebagai generasi bangsa. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Peneliti dalam membangun konstruk pemikiran untuk rujukan bagi pengembangan penelitian yang menyangkut pengembangan pembelajaran dan pendidikan karakter sosial peserta didik sebagai generasi bangsa.
2. Guru. Konstruksi *feedback* dalam upaya mengembangkan profesionalisme keguruan setelah melakukan introspeksi profesionalisme sebagai fasilitator dan media pengembangan potensi dan keilmuan dan pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik melalui pembelajaran.
3. Peserta didik. *Personal developing* merupakan upaya terbaik dalam mengembangkan potensi diri peserta didik, kemampuan akan bisa dibangun efektif jika kemauan diri peserta didik tinggi sebagai peubah dalam dirinya. Penelitian ini menjadi bahan kajian bagi pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik.
4. Sekolah. Bahwa keberhasilan tujuan pembelajaran sangat dipengaruhi *raw input* dan *environmental input* terhadap sekolah sehingga dengan demikian sekolah harus benar-benar mempersiapkan input yang baik seperti calon peserta didik dan calon guru yang akan direkrut.
5. Pemerintah atau dinas terkait. Sebagai pengambil dan pengendali kebijakan, tekanan kurikulum yang syarat bagi pengembangan potensi, minat dan bakat peserta didik atau peserta didik selayaknya menjadi perhatian utama, ketika pemerintah menghasilkan kebijakan penerapan kurikulum. Salah satu potensi yang harus dikembangkan adalah karakter sosial kritis peserta didik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsepsi Pendidikan Karakter dan Karakter Sosial dalam Pendidikan IPS

1. Pemaknaan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menjadi suatu keharusan dewasa ini bukan hanya menyangkut makna dan konsep saja, tetapi harus benar-benar *meaningfull* bagi kehidupan generasi bangsa semenjak dini. Pada implementasinya pendidikan karakter yang menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan sebagai poros operasional dan soko guru pendidikan karakter dan budaya bangsa bagi generasi muda hari ini, dan ke depan. Supinah dan Tri Parmi (2011, hlm.7-8) seperti apa yang disiratkan dalam Puskurbuk (2011, hlm.5) menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan sub pendidikan yang mencakup pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak dan bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk, memelihara sesuatu yang baik dan mengimplementasikan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995, hlm.445), dijelaskan bahwa istilah “karakter” berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain: tabiat, Sedangkan berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English* yang dalam Husen, dkk (2010, hlm. 9-8) karakter dapat diartikan:

- (1) All the qualities and features that make a person, groups of people, and places different from others;
- (2) The way the something is, or a particular quality or feature that a thing, an event or a place has;
- (3) Strong personal qualities such as the ability to deal with difficult or dangerous situations;
- (4) The interesting or unusual quality that a place or a person has;
- (5) A person particularly an unpleasant or strange one;
- (6) An interesting or unusual person;
- (7) The opinion the people have of you, particularly of whether you can be trusted or relied on.

Ryan & Bohlin (1999, hlm.5) memberikan penegasan bahwa karakter itu sama dengan “*to engrave*” atau tidak bisa menghapuskan, dalam kamus Echols & Shadily (1995, hlm.214) *to engrave* itu dapat diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan atau menggoreskan. Watak atau karakter merupakan perpaduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Menurut Suyanto (2010, hlm. 23) karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.

Menurut Josephson Institute (dalam Miller, 2008, hlm. 277) dijelaskan bahwa “*Character refers to those aspects of personality that are learned through experience, through training, or through a socialization process.* Pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh tidak hanya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga membentuk mereka menjadi pelaku bagi perubahan dalam hidupnya sendiri, yang akhirnya akan menyumbangkan perubahan dalam tatanan sosial kemasyarakatan menjadi lebih, adil, baik dan manusiawi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi pendidikan karakter di sekolah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang memberikan hasil dan implikasi pada perubahan kompetensi peserta didik yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia secara utuh dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Menurut Lickona (2013, hlm.82) dijelaskan bahwa pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut:

“character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of

character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within”.

Implementasi pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku kepentingan pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan.

2. Konsepsi Karakter Sosial

Konsepsi karakter sosial dalam kerangka teoritik ini mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Erich Fromm (1941). Tulisan Fromm awalnya dipengaruhi oleh konsep yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Sigmund Freud sebagai pakar teori kepribadian. Fromm lahir sebagai teoritikus psikologi kepribadian yang kemudian melahirkan karyanya “*humanis dialektik*”. Dalam bukunya *Escape from Freedom* (1941, hlm.11) Fromm mengatakan bahwa “seseorang dapat bersatu dengan orang-orang lain dalam semangat cinta, dan kerjasama atau dapat menemukan rasa aman dengan tunduk kepada penguasa dan menyesuaikan diri dengan masyarakat” (lihat juga Fudyartanta, 2012, hlm.327). Konsep Fromm (1941) ini jika diimplementasikan pada dunia persekolahan dalam membangun karakter sosial adalah dengan menanamkan nilai-nilai kelemahan lembut, cinta, iba, perhatian, tanggung jawab, identitas, integrasi dalam kehidupan sekolahnya sesuai dengan karakter masyarakat di lingkungannya (Alwisol, 2014, hlm.122; Fudyartanta (2012, hlm.328).

Menurut Fromm (1942, hlm.233) dalam *Character and the Social Process* dijelaskan bahwa :

The concept of social character is a key concept for the understanding of the social process. Character in the dynamic sense of analytic psychology is the specific form in which human energy is shaped by the dynamic adaptation of human needs to the particular mode of existence of a given society. Character in its turn determines the thinking, feeling, and acting of individuals.

Menurut Fudyartanta (2012, hlm.327-328) bahwa :

Peserta didik dapat dididik untuk bersatu dengan orang lain dalam semangat cinta dan kerjasama atau dengan memberikan aturan dan disiplin yang jelas agar mereka tunduk dan patuh serta mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah atau masyarakatnya.

Karakter sosial menjadi bagian penting yang terkait dengan kecerdasan emosional peserta didik. Karakter sosial memberikan penanaman kepribadian kepada setiap personal agar memiliki nilai-nilai seperti loyalitas, solidaritas, damai, demokratis, rela berkorban dan lainnya yang mengajarkan bagaimana membangun nilai-nilai sosial yang tinggi dalam kehidupan sehingga mampu menciptakan kedamaian di bumi ini.

Fromm (1942, hlm.240) memberikan penegasan kembali bahwa konteks karakter sosial menurutnya menyangkut doktrin “*love, justice, equality, and sacrifice*. Sejalan dengan itu, Rudd (1998, dalam Haworth, 2004 hlm.5) menjelaskan bahwa atribut karakter sosial itu terdiri dari *hard work, dedication, loyalty* dan *sacrifice*. Pandangan ini memberikan arahan bahwa karakter sosial upaya membangun kapasitas manusiawi. Cinta, keadilan, persamaan, pengorbanan atau pengabdian, loyalitas bahkan kerja keras dan dedikasi menjadi ruang dalam pembentukan karakter sosial. Fromm (1944, hlm.102) bahwa karakter sosial itu menyangkut “*human relationship*” (lihat juga Haworth, 2005; Funk, R, 1998). Artinya bahwa karakter sosial itu berkaitan erat dengan interaksi antar individu manusia, dalam konteks ini peserta didik bagaimana memiliki kemampuan untuk hidup bersama dalam lingkungan sebayanya, orang tua dan lingkungan masyarakatnya secara luas.

Fromm (1942, hlm.222) yang dikutip Funk (1998, hlm. 221) menjelaskan teorema tentang karakter sosial, sebagai berikut :

Society and the individual do not stand opposite each other. Society is nothing but living, concrete individuals, and the individual can live only as a social human being. His individual life practice is necessarily determined by the life practice of his society or class and in the last analysis, by the manner of production of his society, that means, by how this society produces, how it is organized to satisfy the needs of its members. The differences in the manner of production and life of various societies or classes lead to the development of different character structures typical of the particular society. Various societies differ from each other not only in differences in their manner of production and their social and political organization but also in that their people exhibit a typical character structure despite all individual differences. We call this the socially typical character”.

Pernyataan itu menegaskan bahwa karakter sosial itu terbentuk dari kesatuan hidup antar individu yang membentuk kehidupan suatu masyarakat, individu hanya bisa hidup sebagai makhluk sosial (*social human*) yang nantinya akan membentuk ikatan-ikatan politik, ekonomi dan lainnya. Seperti istilah Fromm yang ditegaskan Funk (1998, hlm. 221) berkaitan dengan karakter sosial itu adalah “*the individual can only live as a social being*”. Bermakna bahwa individu itu hanya akan bisa hidup dalam lingkungan sosial. Individu adalah manusia yang tidak bisa hidup sendirian, sebab memiliki keterkaitan dengan yang lainnya.

Karakter sosial akan membentuk ikatan-ikatan manusiawi dalam kehidupan. Ikatan-ikatan manusiawi itu alangkah baiknya jika diimplementasikan dalam dunia persekolahan terhadap para peserta didik yang akan menjadi agen bangsa ke depan sehingga mampu membentuk budaya manusiawi dalam kehidupannya. Fromm (1968) dalam bukunya yang berjudul *Revolution of Hope* seperti dikutip oleh Fudyartanta (2012, hlm. 328), Alwisol (2014, hlm.123) menjelaskan lima kebutuhan spesifik yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensi manusia yang menyangkut karakter sosial manusia, yaitu :

1. Kebutuhan akan keterhubungan dengan pihak lain

2. Kebutuhan akan transendensi atau dorongan untuk menjadi manusia yang kreatif
3. Kebutuhan akan keterberakaran artinya manusia ingin menjadi bagian integral dari alam ini sehingga merasa memilikinya
4. Kebutuhan akan identitas artinya menjadi seorang individu yang unik
5. Kebutuhan akan kerangka orientasi artinya suatu cara yang stabil dan konsisten dalam memandang dan memahami dunia ini.

Selanjutnya Fromm (1955, hlm. 362) yang dikutip (Hall & Lindzey, 1993, hlm.261) menjelaskan tentang karakter sosial dalam suatu masyarakat itu adalah:

... di mana manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, di mana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas, suatu masyarakat yang memberinya kemungkinan untuk mengatasi kodratnya dengan menciptakan bukan dengan membinasakan, dimana setiap orang mencapai pengertian tentang diri dengan mengalami dirinya sebagai subjek dari kemampuan-kemampuannya bukan dengan konformitas, dimana terdapat suatu sistem orientasi dan devosi tanpa orang perlu mengubah kenyataan dan memuja berhala.

Situasi manusiawi yang harus diciptakan dalam lingkungan masyarakat begitupun dalam lingkungan sekolah, sehingga peserta didik merasa nyaman hidup dalam lingkungannya. Pada masyarakat akademik di sekolah konsepsi karakter sosial akan tercermin dalam budaya atau kultur sekolah yang melambungkan kekuatan-kekuatan sosial dari setiap komponen akademik terutama peserta didik sebagai subjek belajar. Mengadopsi Kekuatan-kekuatan manusiawi seperti yang diungkapkan oleh Fromm mengindikasikan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan utama pembentuk karakter peserta didik yang manusiawi, yang memiliki jiwa dan kepribadian sosial yang tinggi sehingga memberikan rasa nyaman bagi kehidupan diri dan lingkungannya.

3. Karakter Sosial sebagai Bagian dari Kepribadian Sehat Warga Negara Muda sebagai Generasi Bangsa

Menurut Fudyartanta (2012, hlm.41) dijelaskan bahwa kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Jika melihat definisi tersebut maka kepribadian merupakan wujud dari tingkah laku manusia atau individu itu sendiri. Allport (dalam Yusuf, 2012, hlm. 126; Suryabrata, 2013, hlm.205) menjelaskan bahwa :

“personality is dynamic organization within the individual of those psychophysical system, than determines his unique adjustment this environment”. (kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan).

Kepribadian menjadi bagian penting dalam diri individu untuk menentukan kemampuan dirinya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian juga

menyangkut bagaimana individu membangun karakter dirinya dengan lingkungan sosial budayanya.

Karakter sosial merupakan bagian dari kepribadian sehat, Kepribadian sehat akan mendorong dan membentuk individu menjadi pribadi yang berkarakter dan berwatak. Pendidikan karakter secara umum mendorong pada upaya pembentukan kepribadian sehat pada setiap individu. Menurut pandangan Fromm (1941, hlm.225) bahwa kepribadian sehat adalah pribadi yang mampu hidup dalam masyarakat sosial yang ditandai dengan hubungan-hubungan manusiawi, diwarnai oleh solidaritas penuh cinta dan tidak saling merusak atau saling menyingkirkan.

Nilai-nilai humanisme yang ditanamkan semenjak dini menjadi upaya strategis dalam menularkan karakter sosial pada kehidupan peserta didik. Karakter yang ditanamkan semenjak dini inilah sangat urgen bagi perkembangan kepribadian peserta didik. Peserta didik dengan karakter sosial tinggi akan memiliki kecerdasan emosi dan afeksi yang mampu mendorong kehidupan damai dalam lingkungannya, memiliki kesadaran tinggi, mencintai, menyayangi, perhatian, empati, solidaritas, integritas dan loyalitas.

4.

imensi Pendidikan Karakter Sosial dalam Orientasi Pendidikan IPS

PIPS sebagai pendidikan yang syarat *value based education* memiliki tugas dan tanggungjawab keilmuan dalam membangun karakter bangsa ini ke depan. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai pendidikan anti korupsi. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran IPS memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (*instructional effect*), bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (*nurturant effect*). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PIPS adalah pengetahuan, ketrampilan dan karakter kewarganegaraan (*to be a good citizenship*) atau *citizenship transmission*. Seperti dijelaskan Alma dan Harlasgunawan (2003, hlm.43) bahwa visi *social studies* (IPS) dalam pendidikan karakter adalah sebagai proses *citizenship transmission* bagaimana peserta didik dibekali untuk menjadi generasi muda yang dapat mewujudkan cita-cita nasional. Seperti dijelaskan Vinson dalam Segall, et.al (2006, hlm.27), bahwa orientasi dari pendidikan IPS (Social Studies) terdiri dari: (1) *Citizenship Transmission* (Ravitch & Finn, 1987); (2) *Social Science/Structure of the disciplines* (Brunner, 1969, 1977; Massialas, 1992); (2) *Reflective Inquiry* (Dewey, 1933; Hunt & Metcalf, 1968); (4) *Informed Social Criticism* (Stanley & Nelson, 1986); and (5) *Personal Development* (Nelson & Michaelis, 1980).

Gross (1978, dalam Al-Muchtar (tanpa tahun, hlm. 12) merumuskan tujuan PIPS adalah “ *to prepare student to be well-functioning citizens in democratic society*. Lebih lanjut dikatakan bahwa “ *we also think that the social studies should be more concerned with helping student make the most rational decisions that they can their*

own personal lives”. Pemikiran ini memberikan arahan jelas bahwa PIPS memiliki tujuan dari hasil pembelajarannya melahirkan peserta didik yang berkarakter antara lain adalah warga Negara yang dapat hidup dalam masyarakat demokrasi, mampu membuat keputusan dalam menghadapi kehidupannya artinya hidup berdampingan dengan siapapun.

Orientasi Pendidikan IPS juga dijelaskan oleh *Pennsylvania Council for the Social Studies* dalam Clark (1973, hlm. 8) sebagai berikut :

The concern of the social studies program is the development of individuals who understand their own social world—the world of men, their activities, and their interaction – who desire to be productive and contributing member of a free society, who feel a responsibility for helping to conserve, transmit and expand for the future generation the heritage of values and ideals of that society. To accomplish these broad general goals, it is believed that the social studies program must focus on providing learning experiences which will help the individual student.

Orientasi Pendidikan IPS tersebut memberikan penegasan bahwa IPS sangat konsen terhadap pembentukan dan pengembangan karakter individu peserta didik agar mereka memahami lingkungan dan dunia sosialnya agar mereka mampu berinteraksi dan bertanggung jawab sebagai generasi yang mampu mewariskan nilai-nilai dan ideology pada masyarakatnya. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial menjadi orientasi utama dalam pembelajaran dan pendidikan IPS.

Tujuan PIPS menurut NCSS yang dikutip Maryani (2011, hlm.11) adalah “ *...is to prepare young people to be humane, rational, participating citizens in a world that is becoming increasingly interdependent*” (menyiapkan generasi muda agar menjadi manusia yang manusiawi, berfikir rasional, warga Negara yang partisipatif di dunia yang semakin ketergantungan). Dalam istilah Martorella, Beal dan Balick (dalam Maryani, 2011, hlm.11) disebut warga Negara yang konsen pada *Head, Hand and Heart*. Konsepsi manusiawi inilah yang kemudian sejalan dengan pemikiran Fromm (1941) tentang karakter sosial yang berupaya mengembangkan kekuatan-kekuatan manusiawi.

Pendidikan IPS yang diajarkan di SMP merupakan mata pelajaran yang akan menjembatani pembentukan karakter sosial peserta didik, dengan Pendidikan IPS semua peserta didik diberikan pemahaman bagaimana ia cerdas menghadapi lingkungan fisik maupun non fisik, lingkungan individual maupun sosial. Karakter sosial yang diajarkan dalam PIPS adalah “*to be a good citizenship*” adalah karakter bagaimana mereka menjadi warga Negara yang baik.

5.

ontruksi Pendidikan Karakter dalam PIPS di Persekolahan

Nilai-nilai karakter untuk Mata Pelajaran PIPS meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. nilai karakter pokok mata pelajaran PIPS yaitu : kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kedemokratisan, dan kepedulian. Sedangkan nilai karakter utama mata pelajaran PIPS yaitu : nasionalisme, kepatuhan pada aturan

sosial, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan kemandirian. Dua belas Nilai-nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas, untuk upaya memperkokoh fungsi PIPS sebagai pendidikan karakter juga.

Lembaga pendidikan dan guru dewasa ini dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, terutama untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi berbagai dinamika perubahan yang berkembang pesat. Perubahan yang terjadi bukan saja berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga menyentuh perubahan dan pergeseran aspek nilai moral yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh penyimpangan-penyimpangan perilaku amoral saat ini diantaranya maraknya tawuran antar pelajar, perampokan, pembunuhan disertai mutilasi, korupsi, dan isu-isu moralitas yang terjadi di kalangan remaja, seperti penggunaan narkoba, perkosaan, pencabulan, pornografi, prostitusi, begal sudah sangat merugikan dan akan berujung pada keterpurukan generasi muda bangsa.

Disinilah kunci dari urgensi dilaksanakannya pendidikan karakter untuk membentengi dari krisis multidimensi pada era globalisasi ini. Krisis multidimensi dan keterpurukan bangsa, pada hakekatnya bersumber dari jati diri, dan kegagalan dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Konteks pendidikan formal di sekolah, salah satu penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada pengembangan intelektual atau kognitif dan kurang memperhatikan aspek afektif, sehingga hanya tercetak generasi yang pintar, tetapi tidak memiliki karakter yang dibutuhkan bangsa. Menurut Hamengkubuwono (2010, hlm.3) bahwa sistem pendidikan yang *top-down*, dengan menempatkan guru untuk mentransfer bahan ajar ke subjek didik, dan subjek didik hanya menampung apa yang disampaikan guru tanpa mencoba berpikir lebih jauh, minimal terjadi proses seleksi secara kritis.

Pengembangan pendidikan karakter sosial di sekolah menjadi suatu keniscayaan dalam upaya membangun nilai-nilai kehidupan sosial yang lebih baik bagi kehidupan peserta didik ke depan. Konstruksi pendidikan karakter di sekolah perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak bukan hanya guru, tetapi seluruh komponen yang terlibat dalam kehidupan di dunia pendidikan dan persekolahan.

Mengadopsi pemikiran Fromm (1955, dalam Alwisol, 2014, hlm.125) yang mengatakan bahwa :

Ciri orang yang normal atau yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Dalam konteks ini normalitas adalah keadaan optimal dari pertumbuhan kemandirian dan kebahagiaan (kebersamaan) dari individu.

Konstruksi pendidikan karakter sosial yang didasarkan pada kemampuan hidup bersama dengan individu lain disertai rasa penuh cinta. Konsepsi dan dimensi karakter sosial juga sejalan dengan tujuan pembelajaran IPS yang mengarah pada pembentukan karakter sosial dengan istilah keterampilan sosial atau *social skills*, seperti dijelaskan dalam konsepnya Jarolim (1977, hlm.5) bahwa keterampilan

sosial itu dapat merujuk pada : (1) *Living and working together; taking turns; respecting the rights of others; being socially sensitive*, (2) *Learning self control and self direction*, (3) *Sharing ideas and experience with others*. Pemikiran ini sejalan dengan konten karakter sosial yang meliputi *love, justice, loyalty and sacrifice*. Konsep-konsep itu merupakan bagian dari dimensi pendidikan IPS sebagai pendidikan yang memusatkan perhatian pada pembentukan karakter generasi muda yang manusiawi. Justru nilai-nilai manusiawi inilah yang menjadi dasar orientasi pengembangan pendidikan IPS sebagai mata pelajaran yang digunakan untuk membangun *social value* ataupun *social capital*.

Tyron dan Merrell (dalam Muijs dan Reynolds, 2008, hlm.203) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di kalangan remaja yang kurang memiliki keterampilan sosial terdapat banyak remaja yang depresi dan kecemasan serta prestasi akademik yang rendah. Sejalan dengan itu Parker dan Asher, 1987 (dalam Muijs dan Reynolds, 2008, hlm. 203) menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami penolakan oleh teman sebayanya cenderung kesepian dan menampakkan *self esteem* yang rendah, dan juga lebih berkemungkinan *drop out* dari sekolah, terlibat berbagai jenis kenakalan dan berprestasi akademik rendah.

Keterampilan-keterampilan sosial yang mengarah pada pembentukan karakter sosial sangat mutlak diperlukan dalam kehidupan remaja dewasa ini. Menurut Hair, et.al, (dalam Muijs dan Reynolds, 2008, hlm.204) dijelaskan bahwa mengembangkan keterampilan dan karakter sosial itu berhubungan dengan memiliki kepribadian yang hangat dan ramah, kecerdasan non verbal yang baik, pola asuh orang tua yang responsif, dan kontak reguler dengan adik/kakak kandung. Melalui program-program yang diintervensi oleh sekolah, maka keterampilan sosial yang ada dalam IPS bisa ditransformasikan sehingga membentuk kepribadian dan karakter anak didik di sekolah.

Konstruksi pengembangan pendidikan karakter sosial di sekolah seperti yang disarankan oleh William dan Asher (dalam Muijs dan Reynolds, 2008, hlm.208) dijelaskan bahwa ada empat konsep dasar yang perlu dikembangkan dalam pembentukan karakter sosial melalui *coaching* keterampilan sosial, yaitu : (1) Kerjasama, (2) Partisipasi, (3) Komunikasi, (4) validasi (mengatakan hal-hal baik tentang orang lain). Pemikiran ini memberikan dorongan sama dengan konsep karakter sosial yang dikembangkan oleh Fromm (1941) yaitu bagaimana di sekolah sebagai masyarakat akademik membangun rasa cinta dan kasih sayang, rela berkorban, toleransi, peduli, saling menghargai dan menghormati merupakan elemen-elemen penting dalam melahirkan kepribadian dan karakter sosial peserta didik sebagai generasi bangsa.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter Sosial

Karakter sosial atau watak sosial terbentuk melalui hasil belajar dari interaksi dan pengalaman seseorang dengan orang lain dan lingkungannya, dan bukan faktor bawaan (faktor intern) seseorang, serta tergantung obyek tertentu Rahmat (1996, hlm.187). Pada dasarnya karakter sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial yang di alami

oleh individu. Menurut Zuchdi (1995, hlm. 57) bahwa dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Azwar (1998, hlm.30-38) menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap sosial dan karakter sosial itu antara lain yaitu; pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan atau lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu.

Karakter sosial anak atau peserta didik tentu tidak terlepas dari perkembangan sosial yang dialaminya, sebab anak yang baru lahir belum memiliki sifat sosial sebab interaksi dan kemampuan bergaul dengan orang lainnya masih terbatas. Menurut Yusuf (2012, hlm. 122) sebagai berikut :

Perkembangan sosial dipengaruhi oleh faktor proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau sosialisasi.

Menurut pandangan psikologi, sikap dan karakter mengandung unsur penilaian dan reaksi afektif, sehingga menghasilkan motif. Menurut Mar'at (1991, hlm.17) menyatakan bahwa motif menentukan tingkah laku nyata (*overt behaviour*) sedangkan reaksi afektif bersifat tertutup (*covert behavior*). Motif sebagai daya pendorong arah sikap negatif atau positif akan terlihat dalam tingkah-laku nyata pada diri seseorang atau kelompok. Sedangkan motif dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat diperkuat oleh komponen afeksi. Motif demikian biasanya akan menjadi lebih stabil. Pada tingkat tertentu motif akan berperan sebagai *central attitude* (penentu sikap) yang akhirnya akan membentuk predisposisi. Proses ini terjadi dalam diri seseorang terutama pada tingkat usia dini. Predisposisi seseorang merupakan sesuatu yang telah dimilikinya semenjak kecil sebagai hasil pembentukan dirinya sendiri. Keterkaitan antara pembentukan sikap dan karakter akan menghasilkan pola tingkah laku tertentu pada diri individu yang menunjukkan karakteristiknya.

Karakter sosial akan tercermin dalam perwujudan keterampilan sosial dalam dimensi interaksi sosial peserta didik di lingkungan sekolah dan luar sekolah. Karakter sosial inilah yang merupakan bagian dari kecerdasan sosial seseorang yang harus dimiliki setiap orang jika ingin membangun bangsa yang beradab (*civil society*).

B. Kompetensi Guru dalam Pembelajaran IPS

1. Makna Dasar Kompetensi Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I ayat I menegaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Unsur profesionalisme sangat melekat dalam suatu kompetensi yang dimiliki. Menurut Mc Ashan (dalam Mulyasa, 2002, hlm. 38) dijelaskan bahwa kompetensi adalah: “... is a knowledge, skills, and abilities or

capabilities that person achieves, which become part of his or being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors". Kompetensi merupakan uraian kemampuan yang memadai dalam segi pengetahuan, keterampilan dan sikap dan menguasai standar materi. Kemampuan itu harus dimiliki dan dikembangkan secara maju dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan peserta didik sesuai dengan materi standar yang diajarkan guru. Jamarah dan Zain (2002, hlm.126) memberikan definisi bahwa Guru sebagai "...tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Mengingat keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas.

Broke and Stune (1995) seperti dikutip Mulyasa (2007, hlm.25) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai *...descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*. Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sementara Charles (1994) dalam (Mulyasa, 2007, hlm.25) berpendapat bahwa : *competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).

Dalam konteks tersebut, maka keberadaan kompetensi guru merupakan sikap alamiah kualitatif guru yang penuh arti dengan cerminan sikap yang rasional dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi guru menjadi syarat kualifikasi seorang guru sehingga layak menjadi seorang pendidik dan mentransformasikan ilmunya. Guru dewasa ini harus memiliki kompetensi keguruannya seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat melahirkan lulusan yang mampu berdaya saing bukan hanya lokal, nasional tetapi juga internasional. Mengacu pada refleksi orientasi pendidikan itulah maka dalam Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 ditetapkan standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi : kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

2. Kompetensi Guru IPS

Guru IPS sebagai pendidik profesional harus dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Guru merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam keberhasilan suatu pembelajaran, maka untuk dapat mengajar dan menjalankan fungsinya dengan baik guru harus memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi guru IPS adalah kemampuan profesional seorang guru IPS yang diwujudkan dalam implementasi kegiatan belajar mengajar IPS. Menurut Syah (2002, hlm. 5) bahwa :

Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi guru juga dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam bentuk perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan profesinya.

Kompetensi yang dimiliki seorang guru IPS harus tercermin dalam pola mengajar yang ia tampilkan di kelas, apalagi jika mengacu pada empat kompetensi yang dipersyaratkan undang-undang yang menyatakan bahwa kompetensi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Menurut Saragih (2008, hlm. 29), bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Penguasaan kompetensi yang tinggi tersebut dapat membantu guru agar lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya terutama sebagai guru IPS.

Kompetensi guru secara umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. *Kompetensi Pedagogik* merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b. *Kompetensi Kepribadian* merupakan kemampuan individu guru sebagai pribadi yang cerdas sekurang-kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. *Kompetensi Sosial* merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
- d. *Kompetensi Profesional* merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi

atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Kompetensi profesional guru IPS akan menjadi atribut atau karakteristik yang ditampilkan dalam kinerja seorang guru baik yang menyangkut pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan juga sikap. Kompetensi adalah sesuatu atribut yang *intangible* yang tidak bisa diamati secara langsung, artinya membutuhkan waktu lama untuk menjadikan seorang guru itu menjadi orang yang memiliki kompetensi dan profesional. Meski demikian bahwa kompetensi profesional guru akan memberikan warna bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik ke depan.

Lebih lanjut Butler (dalam Marsh, 1996, hlm. 311) memberikan penjelasan terhadap atribut di atas dengan menyatakan bahwa:

Attributes can include specialised knowledge, cognitive skills, technical skills, interpersonal skills, traits (such as personal energy levels and certain personality types), and finally attitudes that elicit desired behaviour pattern's. Requirements, of course is to test whether the attributes believed to underlie competence are present and at an appropriate level in individuals.

Atribut yang menyangkut kompetensi seorang guru IPS meliputi pengetahuan khusus, keterampilan kognitif, keterampilan teknis, keterampilan diri, kumpulan sifat dan akhirnya sikap yang menimbulkan pola perilaku yang diinginkan sesuai dengan visi dari pendidikan IPS itu sendiri. Syaratnya, tentu saja untuk menguji apakah atribut yang dimaksud mendasari kompetensi yang nampak dan pada tingkat yang sesuai dengan individu.

3. Kompetensi Guru dalam Perwujudan Karakter Peserta Didik

Sekolah sebagai lingkungan kedua anak setelah keluarga, peranan pendidik (guru) yang ada dalam lingkungan sekolah inilah yang dituntut memberikan kontribusi bagi perkembangan kemajuan karakter peserta didiknya. Guru akan mudah ditaati dan dihormati oleh anak didiknya, manakala guru sendiri menjaga image keguruannya. Sebaliknya guru akan dicemooh atau dicela anak didiknya manakala ia tidak mampu mengelola dirinya sebagai seorang guru. Megawangi (2008, hlm.32) mengungkapkan bahwa guru atau pendidik:

- a. perlu menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan partisipatif aktif siswa,
- b. perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif,
- c. perlu memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek *knowing the good, loving the good, and acting the good*, dan
- d. perlu memperhatikan keunikan siswa masing-masing dalam menggunakan metode pembelajaran, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan 9 aspek kecerdasan manusia.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tentu sangat komprehensif, seolah guru memiliki kepribadian kaffah yang sehat dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai

pembelajaran pada peserta didik. Fungsi dan peran guru sangat dominan dalam memfasilitasi pembentukan peserta didik yang baik dan berkarakter. Agustian (2007, hlm.35) menambahkan bahwa guru/pendidik perlu melatih dan membentuk karakter siswa melalui pengulangan-pengulangan sehingga terjadi internalisasi karakter, misalnya mengajak siswanya melakukan shalat secara konsisten. Semestinya guru harus dan wajib memberikan teladan pada peserta didik sehingga peserta didik memiliki kebiasaan-kebiasaan baik dalam pola hidupnya sesuai dengan rambu-rambu yang diajarkan atau dicontohkan oleh guru.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran karakter dan moral di sekolah, antara lain yaitu pendekatan: pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, keteladanan, penanaman kedisiplinan, menciptakan suasana yang kondusif, serta integrasi dan internalisasi, (Ramayulis, 2004, hlm. 42). Keberadaan guru harus memberikan inspirasi bagi peningkatan kualitas bangsa ini ke depan. Ketika guru memberikan inspirasi negatif, maka bangsa ini akan hancur karena inspirasinya, ketika guru menuangkan inspirasi positif maka akan melahirkan banyak karya bagi pembangunan bangsa ini ke depan. Inspirasi positif itulah yang harus mendampingi kompetensi seorang guru.

C. Iklim Sekolah

1. Konseptualisasi Iklim Sekolah

Secara konseptual, iklim lingkungan atau suasana di sekolah didefinisikan sebagai seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, etos, suasana batin, setiap sekolah (Fisher & Fraser, 1990, hlm.17). Tye (1974, hlm.20) mengungkapkan bahwa "*school climate as perceived environmental quality or that set of factors that give the organization a personality, a spirit, a milieu and an atmosphere*". Freiberg & Stein (1999) (dalam, Marshall, dkk, 2005, hlm. 3) menjelaskan bahwa *School climate has been called the heart and soul of a school*. Secara operasional, sebagaimana halnya pengertian iklim pada cuaca, iklim lingkungan di sekolah dapat dilihat dari faktor seperti kurikulum, sarana, dan kepemimpinan kepala sekolah, dan lingkungan pembelajaran di kelas.

National School Climate Council, (2007.hlm.4), menjelaskan bahwa:

"School climate is based on patterns of people's experiences of school life and reflects norms, goals, values, interpersonal relationships, teaching and learning practices, and organizational structures."

Semua orang dari mulai peserta didik, orang tua dan para pendidik bekerjasama dalam mengembangkan hidup dan melakukan *sharing* tentang visi sekolah. Pengertian ini memberikan pertanda bahwa iklim sekolah sangat membantu sekolah dalam mengembangkan sekolah menjadi lembaga pembentuk karakter atau kepribadian. Thafa, dkk (2012, dalam NSCC, 2012, hlm. 3-4) mengatakan bahwa *the quality of the school climate is also responsible for academic outcomes as well as the personal development and well-being of the pupils*. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kualitas iklim sekolah akan memberikan pengaruh terhadap lulusan atau luaran sekolah dalam mengembangkan personal peserta didik menjadi orang yang

baik.

Tagiri yang dikutip Owens (1995, hlm. 78) menyatakan bahwa iklim sekolah adalah sebagai suatu karakteristik dari keseluruhan lingkungan sekolah. Menurut Komariah (2004, hlm. 45) iklim sekolah (*school climate*) adalah indikator sekolah efektif yang menekankan pada keberadaan rasa menyenangkan dari suasana sekolah, bukan saja dari kondisi fisik, tetapi keseluruhan aspek internal organisasi.

Beberapa hasil penelitian yang diungkapkan Monrad, dkk (2008, hlm.3) dijelaskan bahwa iklim sekolah berpengaruh positif terhadap prestasi akademik peserta didik (Greenberg, 2004; Lee & Burkham, 1996; Roney, Coleman, & Schlichtin, 2007; Stewart, 2007), berpengaruh terhadap sikap siswa (e.g., *conduct problems, depression*), dan berdampak pada pengambilan keputusan sekolah (Brand, Felner, Shim, Seitsinger, & Dumas, 2003; Byrk & Thum, 1989; Gottfredson, Gottfredson, Payne, & Gottfredson, 2005; Loukas & Murphy, 2007; Rumberger, 1995). Hasil penelitian Voigth Adam (2013, hlm. 3) mengungkapkan bahwa iklim sekolah yang positif berhubungan dengan prestasi akademik, lulusan, sikap peserta didik sebagai bagian dari target reformasi sekolah.

Hasil penelitiannya, Freiberg (1998, dalam Wahyudi & Fisher, 2006. Hlm. 499) menegaskan bahwa lingkungan yang sehat di suatu sekolah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang efektif. Ia memberikan argumen bahwa pembentukan lingkungan kerja sekolah yang kondusif menjadikan seluruh anggota sekolah melakukan tugas dan peran mereka secara optimal.

Iklim dan suasana sekolah yang terbiasa dengan damai, aman dan nyaman akan memberikan kenyamanan pula bagi siswa untuk belajar dibandingkan dengan iklim yang tidak nyaman. Suasana pertemanan di sekolah yang kondusif akan memberikan ikatan emosional tinggi bagi siswa untuk lebih lama tinggal di sekolah sehingga betah untuk belajar.

Voigth Adam, dkk (2013, hlm.1) mengidentifikasi beberapa faktor yang terkait dengan iklim sekolah antara lain aturan sekolah, keselamatan, disiplin, mendorong kegiatan belajar mengajar, hubungan personal dan sosial serta keterkaitan sekolah dengan lingkungan lainnya.

Gagne, Briggs and Wager (1992, hlm.56) memberikan penegasan tiga komponen yang terkait dengan iklim belajar di sekolah yaitu :

- a. *Th*
e performance that is acquired to be acquired what is it that the learner will be able to do after learning that he was not able to do before.
- b. *Th*
e internal condition that must be present for the learning to occur. These consist of capabilities that are recalled form the learners memory and that then become integrated into the newly acquired capability.
- c. *Th*
e external conditions that provide simulation to the learner. These maybe visually present objects, symbols, pictures, sounds or meaningfull verbal

communication.

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa iklim sekolah perlu diciptakan dan harus tercipta demi perwujudan pembelajaran yang lebih baik serta meningkatkan motivasi siswa dan kinerja guru dalam pembelajaran. Iklim sekolah yang menyenangkan akan memberikan situasi menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah lainnya sehingga mereka merasa betah hidup di lingkungan sekolahnya.

Iklim sekolah yang positif akan mendorong kehidupan yang demokratis dengan demikian seluruh komponen sekolah terutama peserta didik akan mendorong pada kehidupan yang mencerminkan *feeling socially, emotionally* dan *physically safe*. Menurut Moedjiharto (2002, hlm.36-37) ciri sekolah yang memiliki iklim yang baik adalah :

- a. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan antar civitas sekolah
- b. semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan merata
- c. di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi
- d. suasana kelas tertib, tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan
- e. meja kursi serta peralatan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya

Intisari dari penelitian ini iklim sekolah memiliki indikator-indikator sebagai berikut : 1) Hubungan antar civitas sekolah, 2) Tata tertib sekolah, 3)Aktivitas belajar mengajar, 4) Suasana sekolah, 5) Kerapian dan kebersihan sekolah/kelas.

Mengacu pada indikator di atas, maka iklim sekolah perlu dibangun oleh seluruh komponen sekolah sehingga menghasilkan suasana dan iklim akademik sekolah yang baik dan berkualitas. Hubungan civitas akademik akan menciptakan tata tertib serta kedisiplinan belajar warga sekolah terutama peserta didik mengecap belajar lebih baik. Iklim sekolah dengan nuansa yang bersih dan rapih akan mendorong warga sekolah menyadari pentingnya kesehatan.

2. Pengembangan Karakter Sosial melalui Perwujudan Iklim Sekolah

Sekolah menjadi lembaga atau satuan pendidikan yang paling efektif dalam membangun karakter peserta didik, sebab disinilah para peserta didik akan berinteraksi secara akademik dan ilmiah karena sekolah sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan. Mengacu pada pengertian dan penjelasan tentang iklim sekolah sebelumnya maka setiap sekolah memiliki karakteristiknya masing-masing. Menurut Komariah (2004, hlm. 116) karakteristik iklim sekolah dapat dilihat dari empat dimensi yaitu (1) dimensi budaya, (2) dimensi ekologi, (3) dimensi lingkungan, dan (4) dimensi organisasi.

Iklim sekolah menjadi perwujudan budaya dan karakter sekolah yang harus diciptakan oleh seluruh komponen sekolah. Cohen, dkk (2009, hlm.182) menjelaskan bahwa :

School climate refers to the quality and character of school life. School climate is based on patterns of people's experiences of school life and reflects norms,

goals, values, interpersonal relationships, teaching and learning practices, and organizational structures. A sustainable, positive school climate fosters youth development and learning necessary for a productive, contributive, and satisfying life in a democratic society.

Ketika sekolah menciptakan iklim yang kondusif, maka akan tercipta lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik dan civitas akademik lainnya. Sekolah harus menjadi wahana pembangun dan pengembang karakter peserta didik, sebab sulit untuk mencari pengganti selain sekolah, selain tentunya peran keluarga yang paling utama. Berdasarkan tuntutan itulah bahwa setiap unsur pimpinan sekolah diharapkan mampu mengorganisasikan sekolahnya agar menjadi tempat bagi pendidikan karakter peserta didiknya.

Melihat realitasnya antara apa yang diajarkan guru kepada peserta didik di sekolah dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah, sering kali kontra produktif atau terjadi benturan nilai. Untuk itu agar proses pembelajaran moral di sekolah dapat berjalan secara optimal dan efektif, pihak sekolah perlu membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua murid berkenaan dengan berbagai kegiatan dan program pembelajaran moral yang telah dirumuskan atau direncanakan oleh sekolah. Tujuannya ialah agar terjadi sinkronisasi nilai-nilai pembelajaran moral yang diajarkan di sekolah dengan apa yang diajarkan orang tua di rumah. Selain itu, agar pembelajaran moral di sekolah dan di rumah dapat berjalan searah, sebaiknya bila memungkinkan orang tua murid hendaknya juga dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan program pembelajaran moral di sekolah. Pelibatan orang tua murid dalam proses perencanaan program pembelajaran moral di sekolah, diharapkan orang tua murid tidak hanya menyerahkan proses pembelajaran moral anak-anak mereka kepada pihak sekolah, tetapi juga dapat ikut serta mengambil tanggung jawab dalam proses pembelajaran moral anak-anak mereka di keluarga.

D. Kontribusi Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah dalam Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik

Membentuk karakter tidak bisa dilakukan dalam sekejap dengan memberikan nasihat, perintah, atau instruksi, namun lebih dari hal tersebut. Pembentukan karakter memerlukan teladan/*role* model, kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan. Proses pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang dialami oleh peserta didik sebagai bentuk pengalaman pembentukan kepribadian melalui mengalami sendiri nilai-nilai kehidupan, agama, dan moral.

Pembentukan karakter sosial peserta didik menjadi tanggung jawab bersama tidak menjadi tanggung jawab yang bersifat individual. Guru misalnya, menjadi fasilitator utama yang akan menularkan nilai-nilai karakter yang akan dibangun dari setiap mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didiknya. Sehingga untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter, kompetensi guru menjadi prasyarat utama yang harus dimiliki oleh guru.

Karakter sosial menjadi hal penting dalam kehidupan seseorang, karena karakter sosial menjadi salah satu penentu kesuksesan seseorang hidup seseorang untuk hidup bersama orang lain. Sebab itulah, karakter yang kuat dan positif perlu dibentuk dengan baik. Menurut Santoso (1981, hlm. 33), tujuan tiap pendidikan yang murni adalah menyusun harga diri yang kukuh, kuat dalam jiwa pelajar, supaya kelak mereka dapat bertahan dalam masyarakat. Diungkapkan juga bahwa pendidikan bertugas mengembangkan potensi individu semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya, sehingga terbentuk manusia yang pandai, terampil, jujur, tahu kemampuan dan batas kemampuannya, serta mempunyai kehormatan diri. Ditegaskan lagi oleh Furqon (2010, hlm. 18) bahwa pendidikan tak cukup hanya untuk membuat anak pandai, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter. Konsep ini memberikan gambaran bahwa pendidikan itu bukan hanya belajar teoritik saja tetapi harus berimplikasi pada pembentukan akhlak dan karakter bangsa. Pendidikan bukan mencetak manusia yang pintar seharusnya, tetapi bagaimana melahirkan manusia yang berakhlak mulia, sejalan dengan konsep Rasulullah “*innamaa buis’stu liutammimma makaarimal Akhlak*”. Jelas sekali bahwa esensi pendidikan itu orientasi utamanya adalah pendidikan karakter.

Menurut beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, karakter seseorang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Penelitian di *Harvard University* Amerika Serikat mengungkapkan bahwa ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh *hard skill* dan sisanya 80 persen oleh *soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* daripada *hard skill*. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.

Selain kompetensi guru, pembentukan karakter sosial juga sangat ditentukan oleh lingkungan dimana peserta didik itu berada. Iklim atau suasana sekolah yang menunjang pada kenyamanan peserta didik dalam belajar akan menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan dan memungkinkan pembentukan karakter sosial peserta didik menjadi lebih baik. Seperti dikatakan Fisher dan Fraser (1991) peningkatan mutu lingkungan kerja di sekolah dapat menjadikan sekolah lebih efektif dalam memberikan proses pembelajaran yang lebih baik.

Budaya dan iklim sekolah bukanlah suatu sistem yang lahir sebagai aturan yang logis atau tidak logis, pantas atau tidak pantas yang harus dan patut ditaati dalam lingkungan sekolah, tetapi budaya dan iklim sekolah harus lahir dari lingkungan suasana budaya yang mendukung seseorang melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, rela, alami dan sadar bahwa apa yang dilakukan (ketaatan itu muncul dengan sendirinya tanpa harus menunggu perintah atau dibawah tekanan) merupakan spontanitas berdasarkan kata hati karena didukung oleh iklim lingkungan yang menciptakan kesadaran kita dalam lingkungan sekolah. Misalnya budaya disiplin, budaya berprestasi dan budaya bersih.

Ditegaskan bahwa jika guru merasakan suasana kerja yang kondusif di sekolahnya, maka dapat diharapkan siswanya akan mencapai prestasi akademik yang memuaskan. Kekondusifan iklim kerja suatu sekolah mempengaruhi sikap dan tindakan seluruh komunitas sekolah tersebut, khususnya pada pencapaian prestasi akademik siswa. Seperti dijelaskan oleh Purkey dan Smith (1985, hlm 427), yang menyatakan bahwa prestasi akademik siswa dipengaruhi sangat kuat oleh suasana kejiwaan atau iklim kerja sekolah, karakter dan suasana iklim kerja sekolah itulah yang mempengaruhi pembelajaran di kelas.

E. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Erich Fromm, 1941, 1944, 1955, 1967 tentang Karakter Sosial Manusia

Menurut penelitian Fromm bahwa manusia tidak bisa lepas dari kebutuhannya. Kebutuhan manusia dalam arti kebutuhan sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia, menurutnya manusia tidak bisa lepas dari kehidupan manusia lainnya sehingga mereka memerlukan apa yang disebut *loving, cooperatively, solidarity, loyalty*.

2. Thomas W. Miller,^{1,3} Robert F. Kraus,² and Lane J. Veltkamp² Character Education as a Prevention Strategy in School-Related Violence, 2005. Published Online: 12 October 2005

Dalam penelitian ini pendidikan dipandang sebagai komponen kunci dalam mengatasi timbulnya kekerasan di sekolah. Bahwa siswa yang menerima pendidikan akademik memiliki peningkatan terbesar dalam kompetensi sosial, berprestasi, serta interaksi dengan orangtua.

3. Kekuatan Keterampilan Sosial Dalam Pembangunan Karakter: Membantu peserta didik Beragam mencapai Sukses. J. L. Scully. Port Chester, NY: National Resources Professional, 2000 198 hlm. \$ 29,95.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan kekuatan keterampilan sosial mendorong siswa/remaja beradaptasi, kemampuan komunikasi, menghadapi kritik, manajemen stres, resolusi konflik dan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dan penetapan tujuan hidup dan belajar.

4. Leo Agung, 2011 tentang Character Education Integration In Social Studies Learning.

Peran pendidikan IPS dalam upaya membangun karakter bangsa ini yang tengah menghadapi degradasi dan banyaknya kekerasan yang menyebabkan krisis multidimensional. IPS menjadi salah satu mata pelajaran di SMP yang perlu mendapat perhatian untuk membangun karakter bangsa. IPS mata pelajaran yang bisa mengintegrasikan pendidikan karakter sehingga

pengembangan berbagai nilai karakter akan terintegrasi dalam pembelajaran, agar peserta didik memiliki karakter yang baik seperti religious, jujur, integritas, toleran, disiplin, bebas, kerja keras, kreatif, patriotism dan bersahabat.

5. **Jenney T.J (2012) yang berjudul *The Power of Peer Relationships in Shaping Character: Peer Relationships as a Predictor of College Student Pro-Social Character Development***

Jenney melakukan penelitian terhadap kekuatan kelompok (group) dalam membentuk karakter anggota kelompoknya, hasilnya sangat signifikan bahwa pengaruh lingkungan kelompok terhadap pembentukan karakternya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok teman sebaya memiliki kekuatan dalam pembentukan karakter seseorang/peserta didik.

F. Kerangka Pemikiran

Karakter sosial adalah watak atau kepribadian seseorang yang mempresentasikan kesadaran dalam diri untuk membaaur dengan kehidupan lingkungannya, terbuka, menerima perbedaan dan dapat beradaptasi. karakter sosial dalam kelompok masyarakat dimana manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, dimana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas, suatu masyarakat yang memberinya kemungkinan untuk mengatasi kodratnya dengan menciptakannya bukan dengan membinasakannya, dimana setiap orang mencapai pengertian tentang diri untuk menjadi manusiawi sepenuhnya (Fromm, 1941, 1955). Situasi bangsa Indonesia yang sangat majemuk menuntut bangsa ini menjadi bangsa yang arif dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada, oleh karenanya maka sikap atau karakter sosial ini perlu dijembatani oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan yang sistemik dan dinamis dalam menghasilkan peserta didik berkarakter untuk menjadi bangsa yang berkarakter.

Sekolah merupakan wahana bagi penanaman karakter sosial bagi generasi muda bangsa ini, disinilah mereka akan bertemu dengan berbagai macam pikiran, watak, karakter, budaya, agama dan sekolah menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan IPS yang berbasis pada masalah-masalah sosial kemanusiaan.

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan. Untuk melaksanakan program-program IPS dengan baik sudah sewajarnya bila guru mengetahui dengan benar peranan dan tugas IPS. IPS harus dapat berperan bagi anak didik dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat, peranan dari IPS ini adalah :

- Sosialisasi membantu anak didik menjadi anggota masyarakat yang berguna dan efektif.

- Pengambilan keputusan, membantu anak didik mengembangkan keterampilan berpikir (intelektual) dan keterampilan akademis.
- Sikap dan nilai, membantu anak didik menandai, menyelidiki, merumuskan dan menilai diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat sekitarnya.
- Kewarganegaraan, membantu anak didik menjadi warga Negara yang baik.
- Pengetahuan, tanggap dan peka terhadap kemampuan pengetahuan dan teknologi dapat mengambil manfaat dari padanya.

Esensi tujuan pembelajaran IPS adalah pengembangan kemampuan dan perilaku rasional yang bermuara pada pembentukan individu sebagai aktor sosial yang cerdas. Aktor sosial yang cerdas tidak lain dari anggota masyarakat yang matang secara rasional dan secara emosional atau cerdas secara rasional dan emosional.

Pengembangan tujuan pembelajaran IPS akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, iklim sekolah, perhatian orang tua dan efektivitas pembelajaran IPS itu sendiri terhadap pencapaian tujuan yaitu pembentukan karakter sosial peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Garut.

Guru merupakan aktor yang berpengaruh secara langsung pada kualitas dan hasil pembelajaran peserta didik di sekolahnya. Sebab guru menjadi senjata utama bagi keberhasilan peserta didik yang memiliki peran penting di dalamnya, maka dari itu keberadaan kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran mutlak adanya. Kompetensi guru memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan dan efektivitas suatu pembelajaran. Menurut Syah (2009, hlm.125) dijelaskan bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses dan efektivitas pembelajaran yaitu 1) faktor internal yang meliputi kondisi fisik dan psikhis peserta didik, 2) faktor eksternal yang meliputi faktor sosial seperti guru, staf atau karyawan dan faktor nonsosial seperti bangunan sekolah, dan 3) faktor pendekatan pembelajaran seperti strategi, metode, media dan lain-lain. Kompetensi guru selain memberikan pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran juga memberikan pengaruh bagi pembentukan karakter peserta didik. Seperti dijelaskan Purwanto (1992, hlm. 102) bahwa faktor eksternal yaitu faktor sosial yang berpengaruh pada diri peserta didik itu antara lain keberadaan guru. Sehingga sesuai kompetensinya guru akan menjadi bagian penting bagi pembentukan keperibadian peserta didik.

Kompetensi guru menjadi bagian penting dalam mendorong dan menciptakan efektivitas pembelajaran dan menjadi tauladan utama sebagai sumber bagi pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jika kompetensi guru semakin baik maka akan memberikan dampak pada tingkat efektivitas pembelajaran IPS dan pembentukan karakter peserta didik.

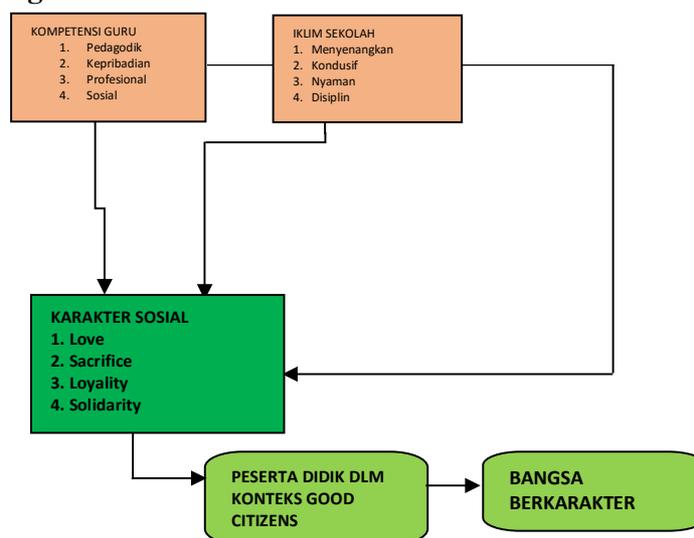
Iklim sekolah menjadi pendukung pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi kehidupan sekolah, maka iklim sekolah juga mutlak harus diperhatikan, ketika peserta didik merasa betah dan nyaman serta senang ketika belajar di sekolah maka akan berpengaruh terhadap kinerja belajar peserta didik itu sendiri. Iklim sekolah yang baik akan memungkinkan pembelajaran

menjadi lebih efektif sehingga berdampak pada pembentukan karakter peserta didik juga. Syah (2009, hlm. 125) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memberikan dampak terhadap efektivitas belajar dan hasil belajar itu adalah faktor eksternal sosial dan non sosial yang terdiri dari lingkungan bergaul dan lingkungan tempat belajar peserta didik.

Hasil penelitian yang dilakukan Pratami (2013) juga membuktikan bahwa lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik.

Kerangka pemikiran untuk menjelaskan pengaruh kompetensi guru dan iklim sekolah, terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik, jika disusun dalam suatu bagan dapat dilihat sebagai berikut :

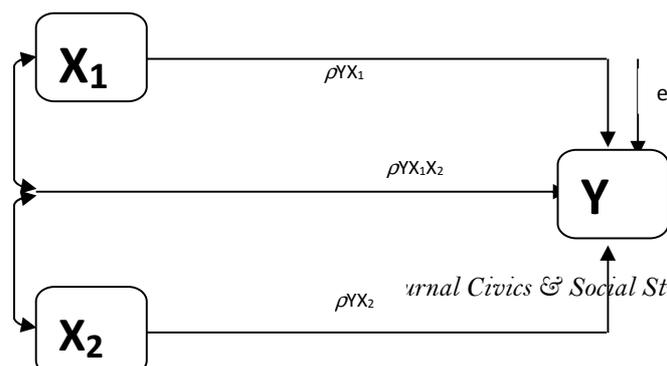
Gambar. 2.1
Paradigma Pemikiran



G. Hipotesis Penelitian

Kerangka hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar. 2.2
Hipotesis Penelitian



Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Semakin tinggi kompetensi guru yang dipersepsikan peserta didik, maka semakin baik karakter sosial peserta didik
2. Semakin kondusif iklim sekolah, maka semakin baik karakter sosial peserta didik
3. Semakin tinggi kompetensi guru dan semakin kondusif iklim sekolah yang dipersepsikan peserta didik, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori (*Explanatory Survey Method*) dengan pendekatan kuantitatif melalui hubungan kausal dengan teknik analisis jalur (*path analysis*). Mengacu pada pemikiran Cresswel (2008 hlm.338) bahwa desain penelitian survey adalah prosedur penelitian kuantitatif, peneliti mengadakan survey terhadap sampel atau populasi untuk menggambarkan sikap, pendapat, perilaku atau karakteristik populasi. Penelitian ini menggunakan metode survey karena data yang dikumpulkan bersumber pada sampel yang diambil dari populasi peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Garut. Metode *Survey Eksplanatori* ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel penelitian melalui suatu pengujian hipotesis berdasarkan data empirik. Tujuan yang hendak dicapai dalam metode penelitian survei eksplanatori adalah untuk pengujian (verifikasi) proposisi-proposisi faktual, artinya proposisi-proposisi deduksi (hipotesis) diuji secara empirik.

B. Definisi dan Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi :

a) **Variabel Bebas (*Independent Variables*)**, dalam penelitian ini adalah :

❖ **X₁ : Kompetensi Guru, dengan beberapa dimensi :**

▪ **Kompetensi Profesional Guru**

Kompetensi profesional guru menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami dan menguasai materi yang akan disampaikan seperti dijelaskan oleh Sarimaya (2008, hlm.17) bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran baik secara luas maupun mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi

keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi profesional guru harus didukung oleh kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran yang akan disampaikannya. UU No 14 tahun 2005 mengisyaratkan bahwa Kompetensi Profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Dimensi kompetensi profesional guru yang dimaksud dalam penelitian ini indikatornya antara lain : 1) kemampuan guru menguasai mata pelajaran, 2) kesesuaian materi pelajaran yang disampaikan dengan kebutuhan siswa, 3) tindakan reflektif guru bagi kemajuan pembelajaran siswa, 4) perubahan lingkungan belajar, dan 5) kemampuan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi pembelajaran.

▪ **Kompetensi Pedagogik Guru**

Kompetensi pedagogic merupakan kemampuan guru dalam memahami dimensi-dimensi pendidikan bagi peserta didik, menurut Sarimaya (2008, hlm.17) Kompetensi pedagogik yang dimaksudkan adalah pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seperti dijelaskan dalam UU no 14 tahun 2005 kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, indikator yang dikembangkan dalam dimensi meliputi: 1) Guru mampu memahami karakter peserta didik, 2) mampu merencanakan pembelajaran, 3) mengelola PBM, 4) objektif evaluasi belajar, 5) memahami TIK.

▪ **Kompetensi Kepribadian Guru**

Kompetensi kepribadian yang dimaksudkan adalah kemampuan profesional guru yang mencerminkan kepribadian guru, menurut Sarimaya (2008, hlm.17) kepribadian guru itu adalah kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Sementara dalam UU No. 14 tahun 2005, kompetensi kepribadian mencakup 1) Etos kerja 2) Bersikap, 3) Kode etik, 4) Teladan, 5) Objektif. Dengan demikian secara operasional yang menyangkut kompetensi kepribadian guru ini mengacu pada penjelasan UU No. 14 tahun 2005 tersebut.

▪ **Kompetensi Sosial Guru**

Kompetensi sosial menyangkut kemampuan guru dalam berinteraksi dan bergaul seperti dijelaskan Sarimaya (2008, hlm.17) bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Dalam UU No. 14 tahun 2005 dijelaskan bahwa kompetensi sosial indikatornya terdiri dari : 1) Interaksi dengan peserta didik, 2) Interaksi dengan orang tua, 3) Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran, 4) Adaptasi dengan lingkungan, 5) Kualitas lingkungan belajar.

Dimensi kompetensi sosial yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 14 tahun 2005 antara lain: Interaksi dengan peserta didik, Interaksi

dengan orang tua, Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran, Adaptasi dengan lingkungan, Kualitas lingkungan belajar.

❖ **X₂ : Iklim Sekolah**

Iklim sekolah merujuk pada kualitas dan karakter kehidupan sekolah yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman, norma, tujuan, nilai, hubungan antarpersonal, proses belajar mengajar dan praktek kepemimpinan serta struktur organisasi yang ada di sekolah (*National Council School Climate*, 2007, hlm.4).

Dimensi iklim sekolah dalam penelitian ini yang dimaksud mencakup : Hubungan antar civitas, Tata tertib sekolah, Aktivitas belajar mengajar, Suasana sekolah, Kerapian dan kebersihan sekolah/kelas. Sedangkan indikator yang dikembangkan meliputi : 1) Hubungan guru dengan peserta didik, 2) Hubungan kepala dan staff dengan peserta didik, 3) Kedisiplinan peserta didik, 4) Kedisiplinan guru dan karyawan, 5) Keterlibatan peserta didik, 6) Prinsip pembelajaran demokratis, 7) Kenyamanan, 7) Kebersamaan, 8) Tata ruang, 9) Sarana kebersihan.

b) **Variabel Terikat (*Dependent Variables*)**, dalam penelitian ini adalah :

❖ **Y : Karakter Sosial**

Karakter sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan-kekuatan manusiawi dalam masyarakat sekolah tertentu dengan tujuan memfungsikan masyarakat (sekolah) secara berkesinambungan (Fromm, 1942). Karakter sosial ini merujuk pada perilaku dan kebiasaan peserta didik di sekolah ketika mereka bergaul dengan teman, guru, karyawan bahkan lingkungan sekolah dan luar sekolah. Adapun dimensi yang dikembangkan meliputi : *Love* (kasih sayang), *Loyalty* (Kerjasama/loyalitas), *Sacrifice* (pengorbanan/partisipasi), *Solidarity* (Kepedulian/Solidaritas). Sedangkan indikatornya mencakup : 1) menyayangi yang kecil, 2) menghormati sesama, 3) mengembangkan sikap positif, 4) bekerjasama dalam kegiatan kelas, 5) menjaga kekompakan, 6) melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 7) saling membantu kesulitan belajar, 8) mengeluarkan ide, 9) berpartisipasi, 10) proaktif, 11) memberikan dorongan, 12) toleran, 13) peduli dan solidaritas, 14) membangun sikap sosial.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Secara umum bahwa populasi merujuk pada subjek yang akan diteliti secara keseluruhan baik itu orang maupun sesuatu hal yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam hal ini menurut Cresswel (2008, hlm.151) adalah bahwa : “*a population is a group individual who have the same characteristic*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMP di Kabupaten Garut yang ditentukan secara *cluster* wilayah dari SMP Negeri yang terbagi dalam 3 wilayah yaitu SMPN di Garut Utara, Garut Tengah (Kota) dan Garut Selatan yang merupakan SMP Negeri dengan karakteristik sama dan merupakan SMPN pavorit dan SMP yang berdiri lebih awal di wilayah tersebut. Jumlah populasi berdasarkan klaster dari masing-masing wilayah yang ditentukan oleh peneliti (*Purpossive sampling*) adalah sebanyak 6.594 orang seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Data Jumlah Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri di 3 Wilayah di Kabupaten Garut

No	Sekolah	Wilayah	Jumlah Siswa Kls VIII
1	SMP Negeri 1 Leles	Utara	410
2	SMP Negeri 1 Kadungora	Utara	400
3	SMP Negeri 1 Limbangan	Utara	300
4	SMP Negeri 1 Selaawi	Utara	320
5	SMP Negeri 1 Cibatu	Utara	342
6	SMP Negeri 1 Tarogong Kaler	Tengah	390
7	SMP Negeri 1 Tarogong Kidul	Tengah	450
8	SMP Negeri 2 Tarogong Kidul	Tengah	510
9	SMP Negeri 1 Garut	Tengah	490
10	SMP Negeri 2 Garut	Tengah	495
11	SMP Negeri 3 Garut	Tengah	347
12	SMP Negeri 4 Garut	Tengah	345
13	SMP Negeri 2 Cilawu	Selatan	360
14	SMP Negeri 1 Bayongbong	Selatan	320
15	SMP Negeri 1 Cisarupan	Selatan	340
16	SMP Negeri 1 Cikajang	Selatan	320
17	SMP Negeri 1 Pameungpeuk	Selatan	348
Jumlah			6594

Sumber : Data SMPN yang diobservasi, 2015

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah *cluster area sampling* atau sampel yang diambil dan ditentukan berdasarkan wilayah populasi yang ditetapkan oleh peneliti. Menurut pandangan Sugiyono (2013, hlm.122) bahwa teknik *cluster sampling* digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap kedua menentukan orang-orang atau subjek yang ada pada daerah itu secara sampling juga.

3. Ukuran Sampel

Dalam penetapan jumlah sampel, digunakan rumus *Slovin* (dalam Sugiyono, 2013, hlm. 54) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(\ell)^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

ℓ = Tingkat kesalahan yang ditoleransi. ($\ell=0,05$)

Jadi, ukuran sampelnya adalah :

$$\begin{aligned}
 n &= \left[\frac{6594}{1 + 6594(0,05)^2} \right] \\
 &= \frac{6594}{1 + 6594(0,0025)} \\
 &= \frac{6594}{14,6625} \\
 &= \mathbf{450}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dari peserta didik sebanyak 450 orang peserta didik sebagai responden penelitian. Untuk merepresentasikan jumlah sampel tersebut, sehingga diperoleh jumlah proporsional untuk setiap SMP yang diteliti dengan taraf signifikansi 5%, maka proporsi sampel untuk tiap-tiap SMP secara bervariasi diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.3

Sampel Proporsional untuk Tiap-tiap SMP yang Diteliti

No	Sekolah	Jumlah Siswa Kls VIII	Sampel Proporsional
1	SMP Negeri 1 Leles	410	30
2	SMP Negeri 1 Kadungora	400	29
3	SMP Negeri 1 Limbangan	300	21
4	SMP Negeri 1 Selaawi	320	22
5	SMP Negeri 1 Cibatu	342	23
6	SMP Negeri 1 Tarogong Kaler	390	27
7	SMP Negeri 1 Tarogong Kidul	450	31
8	SMP Negeri 2 Tarogong Kidul	510	35
9	SMP Negeri 1 Garut	490	34
10	SMP Negeri 2 Garut	495	34
11	SMP Negeri 3 Garut	347	24
12	SMP Negeri 4 Garut	345	24
13	SMP Negeri 2 Cilawu	360	25
14	SMP Negeri 1 Bayongbong	320	22
15	SMP Negeri 1 Cisarupan	340	23
16	SMP Negeri 1 Cikajang	320	22
17	SMP Negeri 1 Pameungpeuk	348	24
	Jumlah	6549	450

Sumber : Hasil perhitungan sampel proporsional dengan ms.excel.

D. Teknik Pengukuran

Mengacu pada apa yang diungkapkan Sukmadinata (2008, hlm.5), dalam penelitian digunakan teknik pengukuran dengan skala garis, yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Suatu pernyataan diikuti opsi yang diletakan pada suatu garis

- 2) Opsi dapat bervariasi sesuai dengan isi pernyataan
- 3) Opsi berjumlah ganjil ataupun genap
- 4) Pernyataan bersifat positif
- 5) Pernyataan hanya bersifat nalar
- 6) Pernyataan hanya berisi satu hal/pesan
- 7) Data opsi sudah bersifat rasio sehingga tidak perlu mengubah data ordinal ke interval/rasio.

(Sukmadinata, 2008 hlm.5) .

Prosedur dalam penskalaan ini menurut Sukmadinata (2008 hlm.54) menggunakan skala skor yang sangat sederhana seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Prosedur Penskalaan Pernyataan

Pernyataan persepsi/sikap		Skor
Selalu	Sangat setuju	4
Pernah	Setuju	3
Jarang	Tidak setuju	2
Tidak pernah	Sangat tidak setuju	1

Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut pendapat dan sikap peserta didik akan ditafsirkan sesuai dengan prosedur di atas.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Pengumpul Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah berupa **angket** (kuesioner) berbentuk skala sikap model likert yang memiliki rentang 1 – 4. Instrumen yang dikembangkan berkaitan dengan variabel dalam penelitian yang meliputi : Variabel Kompetensi Guru (X1), Variabel Iklim Sekolah (X2), dan Variabel Karakter Sosial (Y).

Instrumen pendukung selain dari instrumen utama angket antara lain : wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur.

2. Kisi-Kisi Instrumen

Kisi-kisi instrumen yang dikembangkan mengacu pada variabel penelitian yang dikembangkan dalam dimensi dan indikator penelitian antara lain Variabel kompetensi Guru yang meliputi dimensi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Variabel Iklim sekolah yang meliputi dimensi hubungan antar civitas, tata tertib sekolah, aktivitas KBM, suasana sekolah, kebersihan dan kerapihan kelas. Variabel karakter sosial meliputi dimensi kasih sayang (*love*), kerjasama (*Loyalty*), pengorbanan (*sacrifice*), dan solidaritas (*solidarity*). (lihat lampiran /tabel 3.4). Selain itu instrumen dikembangkan observasi dan wawancara (lihat lampiran/tabel 3.5 dan 3.6).

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pada pengujian validitas instrumen ini, penulis menggunakan rumus Korelasi *Product Moment* dengan angka kasar, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2003, hlm.86)

Keterangan :

n = banyaknya responden

X = skor butir soal

Y = skor total

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

Instrumen yang baik disamping valid juga reliabel (dapat dipercaya), yaitu mempunyai nilai ketetapan yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda, akan menghasilkan nilai yang sama pula.

Pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode belah dua awal akhir, yaitu dengan mengkorelasikan skor belahan pertama : awal (X) dan skor belahan kedua akhir (Y), dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* angka kasar untuk mencari nilai koefisien korelasi separoh test.

Rumus *Korelasi Product Moment* dengan angka kasar, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2003, hlm.89)

Untuk memperoleh nilai koefisien korelasi seluruh test, digunakan rumus *Spearman Brown*, yaitu :

$$r_{11} = \frac{2r_{1/21/2}}{(1+r_{1/21/2})} \quad (\text{Sugiyono, 2003, hlm.92})$$

Kriteria reliabilitas mengacu pada aturan, yaitu:

- antara 0,80 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi
- antara 0,60 sampai dengan 0,80 = tinggi
- antara 0,40 sampai dengan 0,60 = cukup
- antara 0,20 sampai dengan 0,40 = rendah
- antara 0,00 sampai dengan 0,20 = sangat rendah

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0. Tingkat validitas dan reliabilitas ini bisa dilihat dari hasil uji *Cronbach's Coefficient Alpha*. Menurut Kusnendi (2005, hlm.89) bahwa *Cronbach's alpha* berkisar antara 0-1 semakin tinggi *Coefficient Cronbach's Alpha*, maka menunjukkan semakin tinggi tingkat validitas dan reliabilitas datanya.

a. Hasil Uji Validitas

1) Variabel Kompetensi Guru (X1)

Hasil uji validitas untuk variabel kompetensi guru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Guru

No item	r _{hitung}	r _{tabel} /N=27	Keterangan
Item_1	.824	0.381	Valid
Item_2	.826	0.381	Valid
Item_3	.820	0.381	Valid
Item_4	.823	0.381	Valid
Item_5	.823	0.381	Valid
Item_6	.819	0.381	Valid
Item_7	.819	0.381	Valid
Item_8	.822	0.381	Valid
Item_9	.821	0.381	Valid
Item_10	.821	0.381	Valid
Item_11	.823	0.381	Valid
Item_12	.823	0.381	Valid
Item_13	.825	0.381	Valid
Item_14	.820	0.381	Valid
Item_15	.822	0.381	Valid
Item_16	.824	0.381	Valid
Item_17	.825	0.381	Valid
Item_18	.824	0.381	Valid
Item_19	.823	0.381	Valid
Item_20	.819	0.381	Valid
Item_21	.820	0.381	Valid
Item_22	.821	0.381	Valid
Item_23	.821	0.381	Valid
Item_24	.819	0.381	Valid
Item_25	.820	0.381	Valid
Item_26	.823	0.381	Valid
Item_27	.828	0.381	Valid

Berdasarkan Tabel 3.5, dari 27 item pernyataan dinyatakan valid, dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. (lihat lampiran hasil perhitungan statistik (r_{hitung}) dan r_{tabel}). (lihat lampiran 5).

2) Variabel Iklim Sekolah (X2)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS for windows 17.0 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Iklim Sekolah

No item	r _{hitung}	r _{tabel} /N=19	Keterangan
---------	---------------------	--------------------------	------------

Item_28	.879	0.456	Valid
Item_29	.875	0.456	Valid
Item_30	.876	0.456	Valid
Item_31	.873	0.456	Valid
Item_32	.875	0.456	Valid
Item_33	.877	0.456	Valid
Item_34	.879	0.456	Valid
Item_35	.880	0.456	Valid
Item_36	.879	0.456	Valid
Item_37	.875	0.456	Valid
Item_38	.873	0.456	Valid
Item_39	.875	0.456	Valid
Item_40	.875	0.456	Valid
Item_41	.873	0.456	Valid
Item_42	.874	0.456	Valid
Item_43	.877	0.456	Valid
Item_44	.876	0.456	Valid
Item_45	.875	0.456	Valid
Item_28	.879	0.456	Valid

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa dari 19 item untuk variabel iklim sekolah diperoleh bahwa secara keseluruhan $r_{hitung} > r_{tabel}$, ini membuktikan bahwa semua item bisa dikatakan valid. (lihat lampiran 5 tabel r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel}).

3) Variabel Karakter Sosial

Pada variabel Karakter Sosial dikembangkan 26 item pernyataan, dengan menggunakan bantuan perhitungan *SPSS for Windows 17.0* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Uji Validitas Variabel Karakter Sosial

No item	r_{hitung}	$r_{tabel} / N=26$	Keterangan
Item_75	.870	0.388	Valid
Item_76	.875	0.388	Valid
Item_77	.873	0.388	Valid
Item_78	.875	0.388	Valid
Item_79	.871	0.388	Valid
Item_80	.870	0.388	Valid
Item_81	.872	0.388	Valid
Item_82	.874	0.388	Valid
Item_83	.871	0.388	Valid
Item_84	.870	0.388	Valid
Item_85	.870	0.388	Valid

Item_86	.870	0.388	Valid
Item_87	.872	0.388	Valid
Item_88	.872	0.388	Valid
Item_89	.874	0.388	Valid
Item_90	.873	0.388	Valid
Item_91	.872	0.388	Valid
Item_92	.871	0.388	Valid
Item_93	.873	0.388	Valid
Item_94	.873	0.388	Valid
Item_95	.873	0.388	Valid
Item_96	.873	0.388	Valid
Item_97	.870	0.388	Valid
Item_98	.871	0.388	Valid
Item_99	.873	0.388	Valid
Item_100	.874	0.388	Valid

Berdasarkan Tabel 3.9 secara keseluruhan dari 26 item untuk variabel karakter sosial dapat dinyatakan valid dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$. (lihat lampiran 5 perhitungan statistik).

b. Uji Reliabilitas

1) Variabel Kompetensi Guru (X1)

Hasil uji reliabilitas untuk variabel Kompetensi Guru sebanyak 41 item pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Hasil Uji Realibitas Variabel Kompetensi Guru

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.828	27

Berdasarkan Tabel 3.10 hasil perhitungan reliabilitas dengan program *SPSS for windows* 17.0 diperoleh hasil *Cronbach's alpha* sebesar 0.828 sedangkan r_{tabel} untuk 27 item sebesar 0.318, ini bermakna bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dinyatakan item reliabel. (lihat lampiran 5)

2) Variabel Iklim Sekolah (X2)

Variabel Iklim Sekolah terdiri dari 18 item pernyataan, adapun hasil perhitungan reliabilitas instrumenya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Hasil Uji Realibitas Variabel Iklim Sekolah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.882	18

Hasil perhitungan reliabilitas dengan program SPSS for windows 17.0 diperoleh hasil *Cronbach's alpha* sebesar 0.882 sedangkan r tabel untuk 18 item pernyataan sebesar 0.456, ini bermakna bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dinyatakan item reliabel. (lihat lampiran 5).

3) Variabel Karakter Sosial

Hasil uji reliabilitas untuk variabel Karakter Sosial sebanyak 26 item pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Hasil Uji Realibitas Variabel Karakter Sosial

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	26

Berdasarkan Tabel 3.14, hasil uji reliabilitas dengan program SPSS for windows 17.0 diperoleh hasil *Cronbach's alpha* sebesar 0.876 sedangkan r tabel untuk 26 item sebesar 0.388, ini bermakna bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dinyatakan item reliabel. (lihat lampiran 5).

G. Analisis Statistik

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data adalah uji statistik untuk melihat apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak sehingga dapat digunakan untuk proses analisis statistik selanjutnya. Seperti dinyatakan oleh Sugiyono (2013, hlm.173) bahwa penelitian dengan menggunakan statistic parametris data yang digunakan harus berdistribusi normal. Untuk menguji tingkat normalitas dalam data penelitian ini, peneliti menggunakan uji *one-sample Kolmogorov-Smirnov test*. Adapun kriteria data dikatakan normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Uji normalitas dengan menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov* ini menggunakan bantuan program SPSS 17.0 for Windows. Berdasarkan hasil uji *one sample Kolmogorov-smirnov* test untuk variabel kompetensi guru, (X1), iklim sekolah (X2), dan karakter sosial peserta didik (Y) seperti dijelaskan Nugroho, (2005, hlm. 33) bahwa : 1) jika nilai signifikansi atau probabilitasnya $> 0,05$ maka data

berdistribusi normal dan 2) jika nilai signifikansi atau probabilitasnya $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 3.15
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Kompetensi Guru	Iklim Sekolah	Karakter Sosial
N	450	450	450
Normal Mean	91.9818	58.1625	83.1636
Parameters ^a Std.	8.35541	8.58473	8.34673
^{.,b} Deviation			
Most Absolute	.051	.052	.049
Extreme Positive	.044	.041	.049
Differences Negative	-.051	-.052	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z	1.059	1.094	1.022
Asymp. Sig. (2-tailed)	.212	.183	.247

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji koefisien signifikansi Kolmogorov-Smirnov berdasarkan tabel 3.14 (lihat lampiran 6) dapat dijelaskan bahwa untuk variabel kompetensi guru (X1) sebesar 1,059 dan nilai signifikan sebesar 0,212, iklim sekolah sebesar 1,094 dan nilai signifikan sebesar 0,183, karakter sosial sebesar 1,022 dan nilai signifikan sebesar 0,247. Sesuai ketentuan, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut bertribusi tidak normal. Hasil uji normalitas terhadap variable-variabel bebas dan terikat diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan kompetensi guru, iklim sekolah, karakter social, sebesar 0.212, 0.183, dan 0.247, yang berarti $> 0,05$ dan data yang diolah tersebut terdistribusi dengan normal.

2. Uji Asumsi Statistik

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ada dan tidak adanya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Sebagai prasyarat yang harus dipenuhi pada suatu model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji korelasi *Spearman's rho* dengan mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual* yang menggunakan bantuan SPSS 17.00 *for windows*. Untuk tingkat signifikansi menggunakan 0,05 *two tailed*. Jika korelasi antara variabel independen

dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh hasil uji seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Table 3.16

Hasil Uji Heteroskedastisitas

			KG	IS	Unstandardized Residual
Spearman's rho	KG	Correlation Coefficient	1.000	.260**	-.004
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.935
		N	450	450	450
	IS	Correlation Coefficient	.260**	1.000	.015
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.746
		N	450	450	450
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.004	.015	1.000
		Sig. (2-tailed)	.935	.746	.
		N	450	450	450

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan data pada Tabel 3.16 (lihat lampiran 7) dapat dijelaskan bahwa hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan bantuan SPSS for windows dengan uji spearman rho, antara variabel independen dengan *unstandardized residual* diperoleh nilai signifikansi untuk variabel kompetensi guru (X1) sebesar 0,935; variabel iklim sekolah (X2) sebesar 0,746; artinya hasil uji heteroskedastisitas untuk menguji variabel independen dengan *unstandardized residual* diperoleh nilai signifikansi > 0,05 artinya bahwa tidak terdapat data heteroskedastisitas pada semua variabel sehingga data bisa dilanjutkan untuk pengujian model regresi.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menghindari kemungkinan adanya hubungan multikolinieritas dalam sebuah analisis sehingga bisa menyesatkan interpretasi model atau membuat hipotesis menjadi bias. Bila terjadi multikolinieritas akan menyebabkan ada koefisien regresi yang tidak signifikan. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam mendeteksi atau menganalisis apakah suatu model itu mengandung multikolinieritas atau tidak yaitu dengan menggunakan uji *Tolerance* and *Variance Inflation Factor (TOL and VIF)* dengan rumus sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2} \dots\dots\dots(4.3)$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- $0 < VIF < 10$, tidak terdapat multikolinieritas
- $VIF > 10$, terdapat multikolinieritas

Sumber : Gujarati (2003, hlm. 91)

Selain menggunakan VIF, dapat digunakan nilai *tolerance* (*TOL*) untuk mendeteksi multikolinieritas, nilai *TOL* dapat ditentukan melalui rumus sebagai berikut :

$$Tol J = \frac{1}{VIF} - R^2$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- R^2 dan *TOL*, maka terjadi kolinieritas sempurna
- R^2 dan *TOL*, maka tidak ada kolinieritas sempurna

Untuk menghindari multikolinieritas ini, maka nilai *VIF* tidak boleh lebih dari 10 dan *Tol* harus lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas melalui *variance inflation factor* (*VIF*) dan *TOL* dengan bantuan SPSS 17.00 for windows dari hasil uji regresi dan ANOVA *coefficients* diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Table 3.17

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.165	2.401		2.984	.003		
1 KG	.050	.018	.052	2.731	.007	.872	1.147
IS	.045	.023	.038	1.939	.053	.810	1.234

a. Dependent Variable: KS

Berdasarkan Tabel 3.17 (lihat lampiran 7) menunjukkan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variable independen untuk model I maupun model II terlihat bahwa nilai untuk semua variable independen kurang dari 10 dan untuk nilai *TOL* (Toleransi) pada kedua model tersebut diperoleh nilai lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut dapat disimpulkan bahwa variable-variabel tersebut tidak mempunyai masalah multikolinieritas.

c. Uji Auto Korelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dari data residual mengacu pada nilai statistik Durbin-Watson (D-W) dengan menggunakan bantuan SPSS 17.00 *for windows* sebagai berikut:

$$D-W = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$$

(Gujarati, 2003, hlm. 467)

Dengan ketentuan :

- Jika $D-W < d_L$ atau $D-W > 4 - d_L$, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi
- Jika $d_U < D-W < 4 - d_U$, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi
- Jika $d_L \leq D-W \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq D-W \leq 4 - d_L$ maka tidak dapat disimpulkan. (Gujarati, 2003, hlm. 470)

Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan bantuan SPSS 17.00 *for windows*, maka diperoleh hasil uji Durbin-Watson seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.997	.997	.42087	2.621

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 3.18 (lihat lampiran 7) dapat dijelaskan bahwa nilai yang diperoleh untuk uji autokorelasi dengan model Durbin-Watson yang diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 17.00 *for windows* diperoleh nilai sebesar $DW = 2.621$, sedangkan nilai d_L untuk tabel Durbin-Watson dengan $n=450$ dan $K=5$ diperoleh nilai tabel sebesar 1.827 dan nilai tabel d_U sebesar 1.863. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa : $d_U (1.863) < DW (2.651) > 4 - d_U (2.173)$. artinya dapat disimpulkan bahwa pada data tidak bisa disimpulkan apakah terdapat atau tidak terdapatnya autokorelasi.

D. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui dan menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan Uji t dan Uji F, selanjutnya sebagai bagian dari uji analisis jalur ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai uji F dan t hitung dengan nilai statistik dari tabel. Tahapan pengujian dan pembuktian hipotesis ini antara lain dengan melakukan :

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel dengan cara menghitung besarnya pengaruh dengan menggunakan rumus :

$$t_k = \frac{\rho_k}{se_{\rho_k}} : (df=n-k-1)$$

Keterangan :

- ρ_k = koefisien jalur yang akan diuji
- t_k = t hitung untuk setiap koefisien jalur variabel X_k
- k = jumlah variabel eksogen yang terdapat dalam substruktur
- n = jumlah
- se_{ρ_k} = standar error koefisien jalur
- df = degree of freedom / derajat bebas

(Kusnendi, 2005,,hlm.12)

Hasil uji parsial (uji t) hitung ini selanjutnya akan dibandingkan dengan t tabel dengan koefisien $\alpha=0,05$. Hasil uji t ini dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS 17.00 for windows. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 diterima, artinya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak, artinya bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji Simultan atau Uji Keseluruhan (Uji F)

Uji simultan atau disebut juga uji secara keseluruhan (Uji F) digunakan untuk menganalisis hubungan antar 1 atau lebih variabel penelitian. Hasil uji F ini dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS 17.00 for windows. Adapun uji simultan ini bias dihitung dengan menggunakan rumus :

$$F = \frac{(n-k-1) \sum_{k=1}^i \rho_{YX_k} r_{YX_k}}{k(1 - \sum_{k=1}^i \rho_{YX_k} r_{YX_k})} = \frac{(n-k-1) R^2_{YX_k}}{k(1 - R^2_{YX_k})}; k=1,2..i$$

(Kusnendi, 2005 hlm.11)

Untuk melihat hasil uji simultan ini, selanjutnya dibandingkan antara uji simultan (Uji F) dengan F tabel dengan kriteria koefisien $\alpha=0,05$. Adapun kriteria ketentuannya sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya model tidak signifikan.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti H_0 ditolak, artinya model signifikan.

Untuk melihat hasil perhitungan uji F ini maka dilakukan perhitungan dengan SPSS 17.00 for windows yang tertuang dalam tabel ANOVA.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2_{yx}) ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh secara bersama-sama antara variabel eksogen dan variabel endogen yang terdapat dalam model structural yang telah dianalisis. Untuk menghitung besarnya pengaruh koefisien determinasi ini digunakan rumus :

$$R^2_{y(xk,z)} = \sum(\rho_{yxk})(r_{yxk}) + (\rho_{yz})(r_{yz}) \quad (\text{Kusnendi, 2005, hlm.17})$$

Dimana r_{xy} adalah koefisien korelasi antara variabel eksogen dengan variabel endogen Y. Untuk melihat koefisien determinasi ini pada hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada *output model summary*. Dimana nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika R^2 semakin mendekati 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat atau semakin baik
- Jika R^2 semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dinilai semakin tidak erat atau semakin kurang baik. (Nugroho, 2005, hlm.36).

Kuat lemahnya pengaruh dapat diklasifikasikan pada tabel 3.18 di bawah ini :

Tabel 3.19

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sugiyono (2009 hlm.184)

Berdasarkan koefisien determinasi dapat diidentifikasi faktor residual yaitu besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti ($p_{x_{kel}}$) terhadap variabel endogen sebagaimana dinyatakan dalam persamaan structural. Besar pengaruh variabel lain mengacu pada pola sebagai berikut :

$$p_{y_{el}} = \sqrt{1 - R^2_{yxk}}$$

(Kusnendi, 2005 hlm.11)

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Garut yang meliputi SMP Negeri di Kabupaten Garut yang meliputi Garut Utara, Garut Tengah (Kota) dan Garut Selatan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kriteria sampel yang ditentukan.

Waktu untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Nopember 2014. Bila data yang diperlukan masih ada kekurangan maka waktu penelitian akan disesuaikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 17 SMP Negeri di Kabupaten Garut yang memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan dan bersertifikat SSN. Lokasi 17 SMP ini menyebar dalam 3 kluster wilayah di Kabupaten Garut yang meliputi

Wilayah Utara, Tengah dan Selatan. Pertimbangan mendasar pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil observasi awal adalah SMP negeri yang dimaksud menjadi salah satu SMP yang paling banyak diminati, lama pendirian, bahwa SMP tempat penelitian ini lebih dulu berdiri dibandingkan dengan SMP-SMP lainnya sehingga dapat mengurangi bias dalam mengumpulkan data yang sifatnya homogen. Secara umum, standar sarana dan prasarana yang dimiliki tidak begitu mencolok perbedaannya, berdasarkan itulah, peneliti menentukan SMP-SMP Negeri tersebut berasumsi memiliki kesamaan meskipun tidak persis sama 100%, ada perbedaan dari segi luas sekolah, ukuran lapangan yang dimiliki, jumlah siswa termasuk kualifikasi guru.

Dari 17 sekolah yang diteliti, 98 % sekolah ini memiliki kualifikasi guru yang memadai (S1) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 90 % guru pada sekolah ini telah tersertifikasi. Sehingga berdasarkan syarat kompetensi guru, pada dasarnya guru pada 17 SMP Negeri tersebut telah memenuhi kompetensinya sebagai guru profesional (Sumber: Wawancara dengan Kepala Sekolah, 2014). Hasil wawancara dengan kepala sekolah di sekolah tempat penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata guru yang mengajar IPS adalah lulusan IKIP atau UPI Bandung sekitar 80 % dan sisanya 20 % berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya, Meskipun guru-guru tersebut berasal dari lulusan rumpun IPS seperti Ekonomi, Geografi, Sosiologi, PPKn, Sejarah bahkan PAI tetapi mereka telah tersertifikasi sebagai guru IPS.

Lingkungan dan iklim sekolah memiliki nuansa yang beragam tetapi secara geografis berada di lokasi yang strategis sebab terjangkau oleh angkutan umum dan relatif mudah akses bagi peserta didiknya. Secara umum, 90 % sekolah yang diteliti memiliki sarana olahraga serta halaman yang cukup luas, artinya sisanya 7 % sekolah memiliki sarana olahraga dan halaman untuk upacara tetapi tidak seluas dari yang 93 %, ini memberikan dukungan pada iklim dan budaya sekolah. (Sumber : Observasi 2014).

Bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya pada setiap SMP Negeri yang diteliti secara umum di sekolah telah ada komite sebagai organisasi yang dibentuk oleh seluruh orang tua peserta didik di sekolah bekerjasama dengan pihak sekolah. Peran komite ini salah satunya adalah membantu sekolah dalam mendorong lancarnya program-program sekolah. Sementara perhatian orang tua terhadap anaknya secara individu di luar sekolah juga tetap menjadi pendidikan pertama dan utama, sebab pendidikan keluarga memiliki kedudukan sangat penting dalam melahirkan anak yang saleh atau salehah. (Sumber wawancara dengan kepala sekolah dan guru dan observasi 2014).

Efektivitas pembelajaran IPS, menyangkut efektivitas hasil dan efektivitas proses. Dalam penelitian ini efektivitas menyangkut peningkatan kemampuan pengetahuan ataupun pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan atau peningkatan kapasitas sikap dan perilaku peserta didik setelah mereka belajar dengan gurunya.

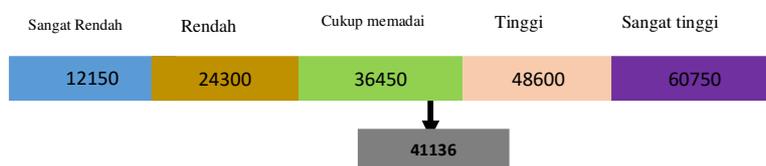
B. Deskripsi Hasil Penelitian

Mengacu pada teknik analisis data penelitian dengan teknik deskriptif dengan *path analisis* dan koefisien kontribusi berikut ini dipaparkan beberapa temuan penelitian:

1. Hasil Penelitian berdasarkan Deskripsi Variabel Penelitian

a. Deskripsi Pada Variabel Kompetensi Guru

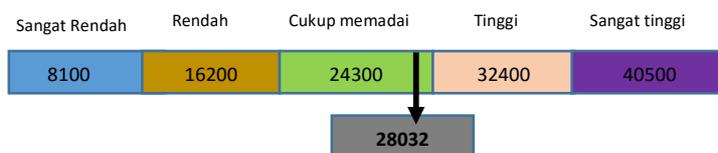
Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel kompetensi guru dapat dideskripsikan tentang posisi tinggi rendahnya variable kompetensi guru (X1) berdasarkan pada perhitungan setiap item mengacu pada tahapan diagram kuartil, diperoleh posisi tinggi rendahnya variable kompetensi guru tersebut dapat digambarkan pada diagram kuartil sebagai berikut :



Berdasarkan diagram kuartil tentang variable kompetensi guru diperoleh skor minimal sebesar 12150 dan skor maksimal sebesar 60750, sedangkan skor aktual dari hasil penelitian diperoleh skor sebesar 41136, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa variabel kompetensi guru termasuk dalam kategori kuartil klasifikasi tinggi. Ini berarti bahwa persepsi peserta didik terhadap kompetensi guru berada klasifikasi cukup memadai atau sedang.

b. Deskripsi Pada Variabel Iklim Sekolah

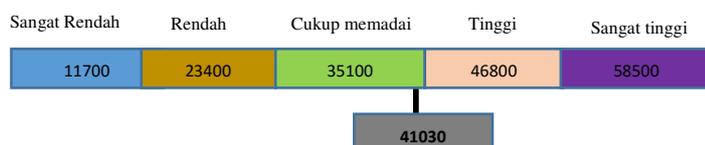
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa posisi tinggi rendahnya variable Iklim sekolah (X2) berdasarkan pada perhitungan setiap item mengacu pada tahapan diagram kuartil, dengan perolehan posisi tinggi rendahnya variable iklim sekolah tersebut dapat digambarkan pada diagram kuartil sebagai berikut :



Berdasarkan diagram kuartil tentang variable iklim sekolah diperoleh skor minimal sebesar 8100 dan skor maksimal sebesar 40500, sedangkan skor aktual dari hasil penelitian diperoleh skor sebesar 28032, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa variabel iklim sekolah termasuk dalam kategori kuartil klasifikasi tinggi. Ini membuktikan bahwa iklim sekolah yang dipersepsikan oleh peserta didik memiliki kategori cukup memadai atau sedang.

c. Deskripsi pada Variabel Pembentukan Karakter Sosial Siswa

Hasil penelitian mengenai posisi tinggi rendahnya variable karakter sosial tersebut dapat digambarkan pada diagram kuartil sebagai berikut :



Berdasarkan diagram kuartil tentang variable karakter sosial diperoleh skor minimal sebesar 11700 dan skor maksimal sebesar 58500, sedangkan skor aktual dari hasil penelitian diperoleh skor sebesar 41030, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa variabel karakter sosial termasuk dalam kategori kuartil klasifikasi cukup memadai atau sedang.

C. HASIL UJI HIPOTESIS PENELITIAN

1) Pengujian Hipotesis 1. Pengaruh kompetensi guru terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik

Hasil pengujian diperoleh bahwa t hitung = 2.731 ($p=000$), pengujian signifikan, mengandung makna bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi guru terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik, hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi guru, maka semakin positif dalam mendorong pembentukan karakter sosial peserta didik. Besarnya pengaruh kompetensi guru terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik adalah $(0,052)^2 = 0,02704$ atau 2,7 %.

2) Pengujian Hipotesis 2. Pengaruh iklim sekolah terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik

Hasil pengujian diperoleh bahwa t hitung = 1,939 ($p=000$), pengujian signifikan, mengandung makna bahwa terdapat pengaruh positif iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik, hal ini berarti bahwa semakin kondusif iklim sekolah, maka semakin positif dalam mendorong pembentukan karakter sosial peserta didik. Besarnya pengaruh iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik adalah $(0,038)^2 = 0,001444$ atau 0,14%.

3) Pengaruh Langsung Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik

Model koefisien jalur persamaan pada substruktur II variabel kompetensi guru, iklim sekolah, perhatian orang tua dan efektivitas pembelajaran IPS terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik dengan persamaan sebagai berikut :

$$X_4 = \rho_{YX_1} + \rho_{YX_2} + e_2$$

Pengaruh secara simultan variabel kompetensi guru, iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik, penjelasannya dapat dilihat pada tabel *model summary* sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pengaruh Simultan Variabel Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah terhadap
Pembentukan Karakter Sosial

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.860	.858	3,301

a. Predictors: (Constant), efektivitas_perhatian_ortu, kompetensi_guru, iklim_sekolah

Sumber : Pengolahan SPSS (lampiran 8)

Berdasarkan Tabel 4.11 *Model Summary* diperoleh nilai $R^2 = 0,860$, atau 86%. Pengaruh secara simultan kompetensi guru dan iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik adalah sebesar 0,860 atau 86 %, artinya ada 24% lagi dari pengaruh variabel lain yang tidak diteliti atau di luar model yang diteliti. Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikansi dari pengaruhnya tersebut, maka dapat dilihat dari tabel Anova yang disajikan pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Tingkat Signifikansi Pengaruh Variabel Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah
terhadap Pembentukan Karakter Sosial

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29691,926	4	7422,981	681,379	,000 ^b
	Residual	4847,852	445	10,894		
	Total	34539,778	449			

a. Predictors: (Constant), efektivitas_perhatian_ortu, kompetensi_guru, iklim_sekolah

b. Dependent Variable: Karakter_sosial

Sumber : Pengolahan SPSS (lampiran 8)

Berdasarkan Tabel 4.20 Anova tentang pengaruh simultan variabel kompetensi guru dan iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik di atas, memiliki pengaruh yang positif dan sangat signifikan dengan besarnya pengaruh nilai F_{hitung} 681,379 ($p=0,000$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Uji Hipotesis Pengaruh Kompetensi Guru dan Iklim Sekolah
terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Sig.(2tailed)	Hipotesis	Kesimpulan
X1 –Y	052	2.731	007	Ho ditolak Ha diterima	Positif, Signifikan
X2 –Y	038	1.939	053	Ho ditolak Ha diterima	Positif, Signifikan

Sumber : hasil perhitungan SPSS (lampiran 8)

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik SMP

Adanya pengaruh signifikan kompetensi guru terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik ini disebabkan oleh peran guru yang sesuai dengan kompetensinya yaitu kompetensi profesional, pedagogik, social dan kepribadian, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Guru bukan hanya sebagai pengajar atau penyampai informasi tetapi ternyata guru bisa menjadi pembentuk dan pengarah nilai-nilai karakter yang berkembang pada diri peserta didik. Pendidikan karakter adalah sesuatu yang mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan, demikian beratnya tugas guru dalam membangun karakter peserta didik, maka yang pertama harus berkarakter adalah tiada lain gurunya sendiri yang harus mengawalinya.

Menurut Peklaj (2010 hlm. 213) guru adalah sebagai “*a driving force of social development*”. Melalui kompetensi yang dimilikinya guru semestinya *to promote students’ overall development, enabling them to prosper in the complex world of tomorrow*. Artinya bahwa keberadaan guru memang sangat jelas harus menjadi pendorong pengembangan sosial dan potensi peserta didik ke depan agar mampu menghadapi dunia global yang sangat kompleks di kemudian hari. Kompetensi utama yang lebih menyangkut pada pembentukan karakter sosial tentu kompetensi sosial guru, meskipun setiap kompetensi tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kompetensi sosial yang dikembangkan dari 5 sub indikator yang meliputi : 1) Interaksi dengan peserta didik, 2) Interaksi dengan orang tua, 3) Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran, 4) Adaptasi dengan lingkungan, 5) Kualitas lingkungan belajar memiliki keterkaitan dengan pembentukan karakter social siswa. Karakter sosial dalam konteks ini adalah menyangkut kemampuan berfikir yang terimplementasi dalam sikap dan perilaku hidup bersama dengan siapapun. Konsekuensinya bahwa setiap individu harus mampu hidup dalam lingkungan bersama dan tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya karena lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk karakter sosial seseorang. Dengan terbentuknya karakter sosial ini akan mempengaruhi dimensi lainnya sehingga tercipta hidup yang damai dan nyaman. Seperti dijelaskan Miller et.al (2005) dalam jurnalnya *Character Education as a Prevention Strategy in School-Related Violence* dijelaskan bahwa :

The concept of social character is a key concept for the understanding of the social process. Character in the dynamic sense of analytic psychology is the specific form in which human energy is shaped by the dynamic adaptation of human needs to the particular mode of existence of a given society. Character in its turn determines the thinking, feeling, and acting of individuals.

Karakter sosial ini menjadi dasar yang baik dalam membangun kehidupan individu yang adaptif dengan lingkungannya. Untuk membentuk anak didik yang memiliki karakter yang baik, sebagai guru dan pendidik perlu memberikan teladan dan contoh

yang baik. Dunia pendidikan dewasa ini masih sering ditemui penyimpangan perilaku dari pendidik yang tidak dapat diteladani. Misalnya tentang kasus pelecehan seksual guru terhadap anak didiknya, pemukulan guru terhadap muridnya, dan masih ditemui ada guru atau dosen yang bangga dengan predikatnya sebagai guru atau dosen *killer*. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara mengenai sistem among, *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani*, yang seharusnya diterapkan di dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat formulasikan pernyataan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh guru, maka semakin berpengaruh positif terhadap perkembangan karakter peserta didiknya. Kenyataan ini memberikan implikasi bahwa keberadaan guru harus benar-benar menjadi sosok tauladan bagi siswanya sehingga segala ucap, gaya dan perilakunya menjadi anutan bagi anak didiknya.

D. Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Sosial Peserta Didik

Iklim sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik. Hasil uji hipotesis ini menegaskan bahwa selain faktor kompetensi guru yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter sosial juga faktor iklim sekolah memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik. Artinya bahwa kedua variable ini secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan bagi pembentukan karakter sosial peserta didik SMP. Iklim sekolah adalah situasi dan kondisi lingkungan dimana peserta didik belajar yang secara langsung memiliki pengaruh terhadap perkembangan perilaku peserta didik meskipun alokasi waktu yang tersedia terbatas dari jam 07.00 sampai 14.00 atau 15.00 tetapi cukup signifikan dalam membentuk karakter maupun perilakunya. Berdasarkan lamanya dimensi waktu, memang saat ini peserta didik cenderung lebih lama melakukan interaksi di sekolah ketimbang di rumah atau di luar rumah, hanya tergantung tingkat efektivitas interaksi itulah yang bisa mempengaruhi perilaku dan karakter mereka.

Sekolah sebagai lingkungan tempat interaksi peserta didik memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku dan karakter peserta didik. Atwool (1999) menjelaskan bahwa lingkungan pembelajaran sekolah, dimana siswa memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan yang bermakna di dalam lingkungan sekolahnya, yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan belajarnya dan berperilaku sopan. Artinya bahwa lingkungan sekolah memiliki makna besar bagi peningkatan efektivitas pembelajaran dan pembentukan perilaku dan karakter peserta didik. Iklim sekolah yang kondusif akan memberikan kenyamanan pada seluruh sivitas akademik sehingga sekolah bisa menjadi rumah kedua setelah keluarga. Ikatan emosional akan terbangun dengan baik jika iklim sekolah tercipta secara baik, seperti dijelaskan Mudjiharto (2002 hlm. 36) bahwa salah satu ciri sekolah yang baik itu adalah terbangunnya hubungan yang akrab dan penuh kekeluargaan antar sivitas akademik.

De Roche (1985, dalam Werang, 2012, hlm.597) mengemukakan iklim sebagai hubungan antar-personil, sosial dan faktor-faktor kultural yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah. Ini memberikan penegasan bahwa iklim sekolah mempengaruhi kultur yang berkembang dalam lingkungan akademik sekolah termasuk efektivitas pembelajaran. Freiberg (1999, hlm. 4) menjelaskan bahwa “*the school climate efforts to improve the quality of life in school for students and educators*”. Lickona (dalam Peterson & Skiba, 2001. Hlm. 158) menjelaskan bahwa kualitas iklim sekolah akan mendorong anak atau peserta didik sebagai berikut :

- *self respect that derives feelings of worth not only from competence but also from positive behavior toward others;*
- *social perspective taking that asks how others think and feel;*
- *moral reasoning about the right thing to do;*
- *moral values such as kindness, courtesy, trustworthiness and responsibility.*

Lingkungan yang damai jelas akan melahirkan kehidupan yang damai sebab setiap orang yang hidup di lingkungan tersebut mampu menciptakan kedamaian sehingga tercermin dalam perilaku dan kepribadian sehari-hari di sekolahnya. Iklim sekolah merupakan tempat dimana peserta didik berinteraksi dalam lingkup sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mengajarnya. Iklim sekolah ini didefinisikan oleh Fisher & Fraser (1990) dan Tye (1974, hlm.20) merupakan seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, etos, suasana batin, setiap sekolah. Iklim sekolah dapat dilihat dari faktor seperti kurikulum, sarana, dan kepemimpinan kepala sekolah, dan lingkungan pembelajaran di kelas.

Deskripsi di atas memberikan pemahaman mendalam bahwa iklim sekolah memberikan efek positif bagi peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran yang produktif, konstruktif dan memberikan kepuasan dalam kehidupan masyarakat demokratis, memberikan pertanda pula bahwa iklim sekolah sangat membantu sekolah dalam mengembangkan sekolah menjadi lembaga pembentuk karakter atau kepribadian.

E. Temuan Penelitian

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi guru dengan karakter sosial peserta didik. Adapun besarnya pengaruh kompetensi guru terhadap karakter sosial peserta didik sebesar 2,7%.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel iklim sekolah terhadap karakter sosial peserta didik. Adapun besarnya pengaruh iklim sekolah terhadap karakter sosial peserta didik sebesar 0,14%.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama variabel kompetensi guru yang dipersepsikan peserta didik dan variabel iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik. Adapun besarnya pengaruh sebesar 7,34%.

Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru, iklim sekolah dan efektivitas pembelajaran terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik.

F. Keterbatasan Penelitian

Beberapa item penting yang terkait dengan penelitian ini, tentu belum sempurna seperti apa yang diharapkan oleh kebanyakan para pakar pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga bagian yang dianggap masih menjadi bagian dari keterbatasan penelitian ini dapat peneliti ungkapkan, antara lain :

1. Ruang lingkup dalam setiap variabel baik itu menyangkut kompetensi guru dan iklim sekolah, belum secara optimal dan komprehensif diungkapkan terutama dalam setiap indikator yang dikembangkan sehingga perlu perumusan dan penyempurnaan lebih lanjut untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif
2. Keefektifan kajian terutama menyangkut item kompetensi guru dari persepsi peserta didik masih perlu diteliti dengan indikator yang lebih mendalam untuk menghasilkan persepsi mendalam dari peserta didik sehingga memperoleh kajian penelitian yang mendalam pula.
3. Perlu ada penelitian lain terhadap subjek yang berbeda, sebab penelitian ini hanya fokus pada peserta didik SMP negeri yang tidak dilakukan secara menyeluruh, mungkin kasusnya akan berbeda dengan subjek penelitian lainya untuk menambah khasanah keilmuan dan riset berikutnya
4. Pengaruh setiap variabel pada penelitian ini juga perlu diteliti pada subjek atau objek lainya selain SMP dan juga mata pelajaran lainya selain IPS yang mungkin akan menghasilkan kajian lebih komprehensif.
5. Tiap item dari indikator dalam penelitian ini juga masih bersifat terbatas, karena untuk mengembangkan item ini dipengaruhi oleh responden setingkat SMP sehingga perlu dikaji ulang bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

G. Dalil – dalil dalam Penelitian

Hasil penelitian ini meskipun belum sempurna seperti penelitian lainya, tetapi ada beberapa hal yang bisa dipolakan menjadi dalil dari penelitian ini antara lain :

1. Semakin tinggi kompetensi guru maka akan berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik.
2. Semakin kondusif iklim sekolah maka semakin positif pengaruhnya terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik
3. Semakin tinggi kompetensi guru dan semakin kondusif iklim sekolah maka akan berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Kompetensi guru dan iklim sekolah menjadi kajian dalam penelitian ini yang menjadi beberapa faktor yang diduga memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik. Variabel-variabel ini menjadi kajian penulis meskipun masih banyak faktor lain yang mungkin pengaruhnya lebih besar terhadap pembentukan karakter sosial. Tetapi secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memberikan pengaruh yang besarnya bervariasi terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik, sehingga peran kompetensi guru dan iklim sekolah harus menjadi komponen yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan tujuan dari pembelajaran IPS khususnya.

2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kompetensi guru dan iklim sekolah terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik SMP di Kabupaten Garut, dapat dijelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi guru terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik SMPN Negeri yang diteliti. Kompetensi guru yang terdiri dari: kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial jika diimplementasikan secara optimal, maka akan mendorong terhadap pembentukan karakter peserta didik,
- b. Iklim sekolah yang dipersepsikan peserta didik ternyata berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik SMP Negeri yang diteliti. Iklim sekolah meskipun berkontribusi kecil menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter sosial. Iklim sekolah didefinisikan sebagai lingkungan tempat dimana peserta didik itu melakukan kegiatan pembelajaran. Iklim sekolah memiliki banyak aspek misalnya lingkungan yang tenang, nyaman dan aman, strategis, akan mendorong perubahan sikap dan kepribadian peserta didik. Jika di lingkungan sekolah memberikan ketenangan, kenyamanan dalam belajar, memberikan dorongan kepada peserta didik belajar lebih menyenangkan. Iklim sekolah yang kondusif akan melahirkan interaksi sosial yang kondusif dan menyenangkan.
- c. Bahwa kompetensi guru dan iklim sekolah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik, oleh sebab itu maka kompetensi guru menjadi salah satu kunci terjadinya pembelajaran berkualitas begitupun dengan iklim sekolah menjadi syarat penting terjadinya proses belajar bagi peserta didik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran dan rekomendasi yang mudah-mudahan memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan dan wawasan aplikatif pada berbagai pihak dan pemangku kepentingan

pendidikan dan pembelajaran terutama sekolah dalam melahirkan generasi bangsa yang berkarakter terutama karakter sosial sejak dini, khususnya sejak SMP pada saat peserta didik mengenal sesuai yang abstrak, adapun beberapa saran yang direkomendasikan sebagai masukan antara lain:

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini belum bersifat final dan bukan hanya kompetensi guru dan iklim sekolah saja yang mendorong terbentuknya pendidikan karakter dan karakter sosial khususnya, tetapi perlu penelitian yang lebih komprehensif untuk melahirkan keilmuan dan pengetahuan baru terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik di SMP tersebut. Selain itu perlu dikaji kembali seluruh variabel dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa hasil penelitian lebih bersifat komprehensif dan mendalam. Untuk memberikan keluasaan pengembangan keilmuan maka penulis perlu menuangkannya pada publikasi karya tulis ilmiah baik jurnal maupun buku.

2. Secara Praktik

- a. Bagi Guru. Perlu optimalisasi peran guru sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam ketetapan UU No. 14 tahun 2005 yang mempersyaratkan guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dalam menunjang tujuan pembelajaran.
- b. Bagi Sekolah dan manajemennya. Bahwa kompetensi guru, iklim, perhatian orang tua dan efektivitas pembelajaran perlu menjadi perhatian utama dalam membangun kesadaran semua pihak untuk mendukung tujuan pendidikan dan pembelajaran agar terbentuk peserta didik yang berkarakter.
- c. Bagi pemangku kebijakan. Bahwa untuk mewujudkan sekolah yang memiliki guru yang kompeten dan iklim sekolah yang kondusif, perlu dibuat kebijakan yang mampu mengcover faktor-faktor tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter. Sebagai pemangku kebijakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru sebagai legalitas kelayakan kompetensi bagi guru perlu ditinjau ulang agar tidak terjadi bias atau diskriminatif antara lulusan LPTK (dik) yang telah memperoleh ijazah dan akta IV sebagai legalitas kompetensi keguruannya dengan lulusan non LPTK (nondik) yang sama-sama mengikuti program sertifikasi guru dengan waktu singkat bisa sama hasilnya. Sehingga menimbulkan keraguan terhadap legalitas lulusan LPTK seperti halnya UPI dalam menghasilkan guru yang kompeten.

Daftar Pustaka

- Ali, L. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alma dan Harlasgunawan. (2003). *Hakekat Studi Sosial, The Nature of Social Studies*. Bandung: Alfabeta.
- Alwisol. (2014). *Psikologi Kepribadian, Edisi Revisi*. Malang : UMM Press.

- Ryan, K dan Bohlin, K.E (1999). *Building Character in School Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Bulach, C.R., (2002). "Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior", *ProQuest Education Journal*, Dec.2002., <http://www.jstor.org/pss/30189797>, diunduh, 22 April 2014.
- Canaris, M.M. (2013). *A Social Character*. US : Columbia University Press. Diakses 14 April 2014.
- Coon, D. (1983). *Introduction to Psychology : Exploration and Application*. West Publishing Co.
- Cresswell, J. W. (2008). *Research Design, Quantitative and Qualitative Approach*. California:Sage Publication. Third edition.
- Dirjen Dikdasmen (2003) *Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen.
- Dirjen Mandikdasmen. (2010). *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta : Kemdiknas.
- Djamarah, dan Zain. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dokumen BKPP (2012). Wilayah Priangan Timur.
- Fattah, N. (2000). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung:Rosda.
- Fisher, D.L & Fraser, B.J. (1991). *School Climate and Teacher Professional Development*. South Pacific Journal of Teacher Education. Vol 19 No. 1. Diakses 14 April 2014.
- Fisher, D.L & Fraser, B.J. (1991). *School Climate and Teacher Professional Development*. South Pacific Journal of Teacher Education. Vol 19 No. 1. Diakses 14 April 2014
- Friedman, L.J. *The Lives of Erich Fromm*, Columbia University Press. 456p. Diunduh 12 maret 2014.
- Fromm. E. (1942), *Character and the Social Process*. Appendix to Fear of Freedom, Routledge, Transcribed: by Andy Blunden (1998). *for the Value_of_Knowledge site*. Diakses 10 April 2014.
- (1944). *Individual and Social Origins of Neurosis*. Copyright © 1994 and 1998 by The Literary Estate of Erich Fromm, c/o Dr. Rainer Funk, Proofed: and corrected by Chris Clayton 2006. Articles. Diakses 10 April 2014.
- (1957). *The Authoritarian Personality*. Translated: by Florian Nadge; CopyLeft: Creative Commons (Attribute & ShareAlike) marxists.org 2011 First published: in *Deutsche Universitätszeitung*, Band 12 (Nr. 9, 1957), pp. 3-4; Diakses 14 April 2014.
- (1958). *The Influence of Social Factors in Child Development*. Copyright © 1992 and 1998 by The Literary Estate of Erich Fromm, c/o Dr. Rainer Funk, Ursrainer Ring 24, D-72076 Tübingen, Fax: +49-7071-600049; e-mail: fromm@germany.com. Diakses 14 April 2014.
- (1969). *Human Nature and Social Theory*. Tuebingen Published. Diakses 14 April 2014.

- Funk, Rainer (1998) *Erich Fromm's Concept of Social Character*, Tuebingen Social Thought & Research, Vol. 21, No. 1-2. Diakses 13 maret 2014.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Edisi 6. Jakarta : Erlangga.
- Hall, CS. & Lindzey, G. (1993). *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamid, Darmadi. (2007). *Konsep Dasar Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta.
- Haworth, R. (2004). *Are There Differences in Moral and Social Character Between High School Athletes and Non-athletes*. US : Journal UMI Press.
- Hoy, W. K., & Hannum, J. W. (1997). *Middle school climate: An empirical assessment of organisational health and student achievement*. *Educational Administration Quarterly*, 33(3), 290-311. Diakses 20 juni 2014.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1987). *Openness of school climate and alienation of high school*. *Journal of Research and Development in Education*. Editorial. Diunduh 13 maret 2014.**
- Hurlock, E.B. (1992). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Idris, S & Fraser, B.J (1994). *Determinants and Effect of Learning Environments in Agricultural Science Classroom in Nigeria*. Australia:Curtin University. Diakses 21 Mei 2014
- Jenney, T. J. (2012) *The Power of Peer Relationships in Shaping Character: Peer Relationships as a Predictor of College Student Pro-Social Character Development*. SSRN Working Paper Series, . Diakses 26 maret 2014
- Depdikbud. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kemdiknas.(2010). *Pendidikan Karakter di SMP*. Jakarta: **Ditjen Mandikdasmen**, Direktorat Pembinaan SMP.
- Koesoema, D.A. (2007). *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Grasindo.
- Kusnendi dan Suryadi, E. (2010). *Analisis Jalur dengan Amos*. Bandung:Rizqi Press.
- Kusnendi, (2005). *Konsep dan Aplikasi Model Persamaan Struktural (SEM) dengan Program Lisrel 8*.
- Lasmawan, I.W.(2010). *Menelisik Pendidikan IPS dalam kontekstual-empirik*. Bali:Mediakom Indonesia Press.
- Lewis, K, (1996). “*Character Education Manifesto*”, *News*, Boston University.
- Lickona, T. (2000). “*Talks About Character Education*”, wawancara oleh Early Childhood Today, *ProQuest Education Journal*, April, 2000, <http://webcache.googleusercontent.com>., diunduh, 20 April 2014..
- Mar’at. (1991). *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Bandung : Ghalia.
- Megawangi, dkk (2008). *Membangun Karakter Anak Melalui Brain-based Parenting (Pola Asuh Ramah Otak)*. Indonesia Heritage Foundation.
- Megawangi, dkk (2010). *Membangun Karakter Anak Melalui Brain-based Parenting (Pola Asuh Ramah Otak)*. Indonesia Heritage Foundation.
- Miller, Quennise & William Allan Kritsonis. (2009). “*A Conceptual Framework in Professional Learning Communities as They Impact Strategic Planning in Education*”.www.artcles.base.com. diakses maret 2014.

- Miller, T.J., (2008). *School Violence and Primary Prevention*. Kentucky University of USA : Springer.
- Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- (2007). *Standar Kompetensi Guru dan Sertifikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyono, TJ. (1980). *Pengertian dan Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial*. Yogyakarta: Departemen P dan K, P3G.
- Musfiroh, T. (2008). *Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter. Tinjauan Beberapa Aspek Character Building*. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian UNY dan Tiara Wacana
- National School Climate Council (2007). “*The School Climate Challenge: Narrowing the Gap Between School Climate Research and School Climate Policy, Practice Guidelines and Teacher Education Policy*”. <http://nsc.csee.net/> or <http://www.ecs.org/school-climate>.(Online). Diakses pada 13 Maret 2012.
- National School Climate Standards. *Benchmarks to promote effective teaching, learning and comprehensive school improvement*. National School Climate Center. 545 8th Avenue, Rm 930, New York, NY 10018. Diunduh 13 maret 2014.
- NCSS. (1997) Fostering civic virtue: *Character education in the social studies NCSS Task Force on Character Education in the Social Studies Social Education*; Apr/May 1997; 61, 4; ProQuest Research Library pg. 225. Diunduh 11 maret 2014.
- NCSS., (1994). *Curriculum Standards for the Social Studies*. Washington D.C.: National Council for the Social Studies.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Permendiknas No. 16 Tahun 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Purkey, S.C., and Smith, M.S. (1983). "Effective Schools: A Review." *The Elementary School Journal* 83, no. 4 (March): 427-452. Diakses 21 Juni 2014.
- Ryan, K dan Bohlin, K.E (1999). *Building Cracater in School Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Samsuri,. (2009). “*Mengapa Perlu Pendidikan Karakter*”, Makalah, disajikan pada *workshop* tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY. Yogyakarta.
- Sarimaya, F. (2008). *Sertifikasi Guru. Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Bandung : Irama Widya.
- Somantri, M.N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono, (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

-(2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, W. (2009) *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suyanto Ph.D. (2010). *Urgensi Pendidikan Karakter*, <http://waskitamandiribk.wordpress.com/2010/06/02/urgensi-pendidikan-karakter/>. Tanggal akses 28 April 2014.
- Syaefudin, U. (2013). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung. Alfabeta.
- Thomas W. Miller, et.al. (2005). *Character Education as a Prevention Strategy in School-Related Violence. The Journal of Primary Prevention (C 2005)* DOI: 10.1007/s10935-005-0004-x. Diunduh 16 maret 2014.
- Trianto. (2009) *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Tye, K. A. (1974). *The culture of school*. In J. I. Goodlad & M. F. Klein & J. M. Novotney & K. A. Tye (Eds.), *Toward a mankind school: An adventure in humanistic education* (pp. 123-138). New York, NY: McGraw-Hill. Diakses 21 Mei 2014
- Ulwan, A.N. (1981). *Pendidikan Anak dalam Islam I*. Semarang : Asy-Syifa.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*. Jakarta.
- UPI. (2013). Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Bandung : UPI.
- Utari, dkk. (2012). *Pembentukan Iklim Sekolah Menuju Learning Community*. Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses 10 maret 2014
- Van de Grift, W., Houtveen, T., & Vermeulen, C. (1997). *Instructional climate in Dutch secondary education. School Effectiveness and School Improvement, Jurnal vol. 8(4)*, 449-462. Diakses 23 April 2014.
- Voigth, A, dkk (2013). *A Climate for Academic Success. How School Climate Distinguishes Schools That Are Beating the Achievement Odds (Report Summary)*. California: the American Institutes. Diakses 12 Juni 2014
- Wahab, A. (1998). *Perubahan dan Ketidakpastian*. Bandung. PPS.IKIP.
- Wahyudi & Fisher, D.L. (2003), April. *Teachers' perceptions of their working environments in Indonesian junior secondary schools*. Paper presented at the ICASE 2003 Conference on Science and Technology Education, Penang, Malaysia. Diakses 16 maret 2014
- (2006). *School Climate in Indonesia Junior High School*. Australia: Curtin University.
- Warsita, B. (2008). *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Way, Niobe & Reddy, Ranjini & Rhodes, Jean. (2007). "Student's Perception of School Climate During the Middle School Years: Association with Trajectories of Psychological and Behavioral Adjustment". *Journal of*

Community Psychology, December 2007, vol 40, hal:194–213. Diunduh 16 maret 2014

Yamin, M & Maisah (2010). *Standardisasi Kinerja Guru. Jakarta : Gaung Persada Press. Cet.1*

Yaumi, Muhammad. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa melalui transdisiplinaritas*. <http://www.bharatbhasha.com/education.php/208471>. Diunduh pada 20 Mei 2014.

Yusuf, S. (2007). Psikologi Perkembangan anak dan Remaja. Bandung: Rosda.

Zevin, (2011), *Social Studies for The Twenty First Century*, New Jersey: Lawrence Elbaum.

Zuchdi, D. (1995). “*Pembentukan sikap*”, Cakrawala Pendidikan. No. 3. Th.XIV, November. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta. Hlm. 51-63.

**KONTRIBUSI BAHAN AJAR PKN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN NASIONALISME DI WILAYAH RAWAN
KONFLIK**

Musafir
(Universitas Jabal Ghafur Aceh)

Abstrak

Bahan ajar menjadi salah satu tonggak bagi keberhasilan pembelajaran, sebab melalui pengorganisasian bahan ajar ini, peserta didik akan ditransformasikan ilmu pengetahuan yang bermakna dan bernilai jika bahan ajar yang disampaikan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berarti bagi dirinya.

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan konflik sehingga rentan dengan disintegrasi bangsa, konflik GAM dan NKRI memberikan persepsi dan pemahaman yang berbeda diantara kedua belah pihak. Berkaca dari itu, Negeri ini harus tetap utuh menjadi bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat itulah yang harus dijaga oleh generasi muda bangsa ini.

Setiap daerah memiliki nilai dan norma atau kearifan local yang menjadi kekayaan daerah itu untuk mengembangkan nilai dan kesadaran nasional dalam mewujudkan kokoh dan kuatnya bangsa dan Negara ini diatas Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan dan pembelajaran lah yang lebih efektif dalam upaya membangun nilai-nilai nasionalisme itu agar tidak tercerabut dalam akarnya.

Kata kunci : *Bahan ajar, nasionalisme, kearifan lokal*

LATAR BELAKANG

Konflik yang terus terjadi di wilayah Indonesia, terutama yang menjurus pada disintegrasi bangsa sudah lama terjadi, terutama di provinsi Aceh, Maluku dan Papua. Terjadinya konflik tersebut apabila dilihat dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dari uraian tujuan pendidikan nasional tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan suatu premis dalam rangka kegiatan yang menciptakan putra-putri Indonesia untuk menjadi warganegara yang selalu berfikir dan bertindak untuk

kepentingan bangsa dan Negara, dan bukan untuk kepentingan kelompok atau suku mereka tertentu. Namun dalam realita dewasa ini, terlihat bahwa kepentingan nasional sudah dikesampingkan, sehingga bangsa ini selalu dirongrong dari dalam untuk mencapai tujuan dan keinginan segelintir kelompok tertentu, seperti yang terjadi pada konflik Aceh, Maluku dan Papua.

Desentralisasi juga telah mendorong bangsa ini menjadi bangsa yang primordialisme, individualism dan fanatisme sehingga kecenderungan terjadinya konflik semakin marak dimana-mana. Aceh yang sejak dulu menjadi wilayah yang rawan konflik bukan hanya menyangkut masyarakat tetapi juga menyangkut pemerintahan, konflik pemerintah dengan GAM, konflik antar kelompok merupakan warna yang sampai saat ini masih menghinggap masyarakat Aceh. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu dibangun kembali kesadaran masyarakat yang tinggi akan realita masyarakat majemuk atau multikultur serta kesadaran akan identitas kebangsaannya di tengah-tengah pluralism ini melalui pendidikan.

Nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan milik bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai *local wisdom*-nya. Menurut Alwasilah (2009: 50) "Ada sejumlah praktik pendidikan tradisional (*etnodidaktik*) yang terbukti ampuh, seperti pada masyarakat adat Kampung Naga dan Baduy dalam melestarikan lingkungan". Namun, sebenarnya secara keseluruhan masyarakat adat yang ada telah menyelenggarakan pendidikan yang dapat disebut sebagai pendidikan tradisi, termasuk pendidikan budi pekerti secara baik.

Ada kaitan yang erat antara pendidikan dengan kebangkitan suatu bangsa. Tumbuhnya kesadaran baru atau perubahan-perubahan di suatu negara dipastikan dipelopori oleh kaum muda terpelajar. Jatuhnya rezim orde baru dan kebangkitan era reformasi di Indonesia dimotori oleh kaum muda terpelajar. Hal ini menunjukkan betapa besar kontribusi pendidikan terhadap kebangkitan dan kemajuan suatu bangsa.

Pembelajaran PPKn berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh

Pancasila dan UUD 1945, tetapi apabila kita melihat dari fenomena yang tersaji di depan mata kita dewasa ini terkesan bahwa PPKn “belum berhasil” mencapai tujuan tersebut, sehingga dalam konteks ini terdapat ketidak-seimbangan antara apa yang dicita-citakan oleh undang-undang (*Das Solen*) dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Das Sain*).

PKn tersebut akan dapat tercapai apabila hasil belajar PKn mampu menginternalisasikan nilai-nilai etika dan moral, kemanusiaan, dan nilai-nilai kerjasama, dan demokratis terhadap peserta didik. Untuk itu kemampuan guru PKn dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut. Guru cukup strategis posisinya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu cepat, pergaulan umat manusia yang mengglobal tidak akan membawa kesejahteraan, kedamaian untuk kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini manakala nilai-nilai sosial tidak terinternalisasi dengan baik. Guru PKn menjadi tumpuan harapan dan cukup strategis dalam mengembangkan nilai-nilai tersebut melalui bahan ajar.

Bahan belajar merupakan sarana bagi pengembangan materi ajar yang akan disampaikan, oleh sebab itu kedudukan guru sebagai pengembang bahan ajar dituntut memiliki kreativitas dalam pengembangan bahan ajar agar hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. Bahan ajar PKn akan efektif bagi pengembangan nilai-nilai nasionalisme peserta didik sebab di dalamnya sangat kental dan terkait dengan pendidikan karakter bangsa.

Berdasarkan paparan tersebut, maka bahan ajar harus diorganisasikan guru dalam meningkatkan pemahaman nasionalisme yang bisa dipadukan dengan nilai-nilai kearifan local yang telah berkembang selama ini. Nilai kearifan local akan membantu siswa mengenali nilai-nilai moral dan perilaku yang akan mampu memberikan kontribusi bagi kearifan bangsa ini.

Tulisan ini berangkat dari kajian penulis terhadap semakin memudarnya nasionalisme dan karakter bangsa oleh karena pendidikan secara umum tidak terimplementasi secara baik dalam tatanan nilai peserta didik. Melalui tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi bahwa bahan ajar akan sangat membantu meningkatkan nasionalisme peserta didik dengan menginternalisasi nilai-nilai kearifan local.

HAKEKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Nu'man Somantri dalam Hidayat, K dan Azra, A (2008:6) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau civics (civics education) adalah sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan : (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (Orsospolek), (b) individu-individu dengan negara. Sementara Edmonson (1958) menyatakan bahwa civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak istimewa warga negara.

Azra (2008:7) memberikan definisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga Negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga Negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan system yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi public dan system hokum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegeraan aktif dan sebagainya.

Selanjutnya Somantri, dalam Hidayat dan Azra (2008:8) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di tandai oleh cirri-ciri sebagai berikut :

- a) Civic education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah;
- b) Civic education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis;
- c) Dalam civic education juga menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara.

Konsep civics education menurut Cogan (1999:4) secara umum menunjuk pada "...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*" seperti "civics" di kelas Sembilan dan "*problem of Democracy*" di kelas 12. Dalam posisi ini menurut Cogan, *civics education* diperlakukan sebagai "...*the foundational course work in school yang dirancang untuk mempersiapkan ...young citizens for an active role in their communities in their adult lives*".Ini memiliki arti bahwa "*civic education*" merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan warga Negara muda untuk melakukan peran aktif dalam masyarakat kelak setelah mereka dewasa nanti.

Berdasarkan kajian pemaknaan di atas, sangat jelas sekali bahwa orientasi dari pendidikan kewarganegaraan dalam wacana Indonesia atau *civic education; citizenship education* merupakan pendidikan yang berorientasi pada upaya pembentukan warganegara yang baik, yaitu mempersiapkan para warga muda agar menjadi warga yang mampu berpartisipasi yang baik dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari.

Dalam wacana pendidikan di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan matapelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004). Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, yang dimulai dari *Civic Education*, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai yang terakhir pada Kurikulum 2004 berubah namanya menjadi matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan PKn adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 serta Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

KONSEP PENGEMBANGAN KESADARAN BERBANGSA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Misalnya saja (untuk tidak menyebut yang ada pada seluruh suku dan etnis di Indonesia), suku Batak kental dengan keterbukaan, Jawa nyaris identik dengan kehalusan, suku Madura memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletan. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan lingkungan alam yang

mengitari mereka. Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti, hal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Keterujiannya dalam sisi ini membuat kearifan lokal menjadi budaya yang mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Artinya, sampai batas tertentu ada nilai-nilai perenial yang berakar kuat pada setiap aspek lokalitas budaya ini. Semua, terlepas dari perbedaan intensitasnya, mengeram visi terciptanya kehidupan bermartabat, sejahtera dan damai. Dalam bingkai kearifan lokal ini, masyarakat bereksistensi, dan berkoeksistensi satu dengan yang lain.

Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri mereka melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya mereka. Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif kearifan lokal. Sebagai misal, keterbukaan dikembangkan dan kontekstualisasikan menjadi kejujuran dan *seabreg* nilai turunannya yang lain. Kehalusan diformulasi sebagai keramahtamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi; dan demikian seterusnya. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu. Untuk itu, sebuah ketulusan, memang, perlu dijadikan modal dasar bagi segenap unsur bangsa. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dari bangsa yang sama.

Para elit di berbagai tingkatan perlu menjadi garda depan, bukan dalam ucapan, tapi dalam praksis konkret untuk memulai kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan dipelihara dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif pedoman hidup manusia Indonesia dewasa ini dan dapat digunakan untuk menyaring nilai-nilai baru/asing agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Khalik, alam sekitar, dan sesamanya (*tripita cipta karana*). Dan sebagai bangsa yang besar pemilik dan pewaris sah kebudayaan yang adiluhung pula, bercermin pada kaca benggala kearifan para leluhur dapat menolong kita menemukan posisi yang kokoh di arena global ini.

Persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan kearifan lokal untuk membangun pendidikan karakter di sekolah? Oleh karena itu, perlu ada revitalisasi budaya

lokal (kearifan lokal) yang relevan untuk membangun pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan kearifan lokal di daerah pada gilirannya akan mampu mengantarkan siswa untuk mencintai daerahnya. Kecintaan siswa pada daerahnya akan mewujudkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan warganya untuk menata diri sesuai dengan konsep yang diyakini kebenarannya dengan jiwa yang tangguh, semangat yang tinggi, serta dengan cara memanfaatkan alam secara bijaksana.

Dalam konteks tersebut di atas, kearifan lokal menjadi relevan. Anak bangsa di negeri ini sudah sewajarnya diperkenalkan dengan lingkungan yang paling dekat di desanya, kecamatan, dan kabupaten, setelah tingkat nasional dan internasional. Melalui pengenalan lingkungan yang paling kecil, maka anak-anak kita bisa mencintai desanya. Apabila mereka mencintai desanya mereka baru mau bekerja di desa dan untuk desanya. Kearifan lokal mempunyai arti sangat penting bagi anak didik kita. Dengan mempelajari kearifan lokal anak didik kita akan memahami perjuangan nenek moyangnya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. (<http://koleksi-skripsi.blogspot.com/teori-pembentukan-karakter.html> diunduh 01/01/12.). Nilai-nilai kerja keras, pantang mundur, dan tidak kenal menyerah perlu diajarkan pada anak-anak kita. Dengan demikian, pendidikan karakter melalui kearifan lokal seharusnya mulai diperkenalkan oleh guru kepada para siswanya. Semua satuan pendidikan siswanya memiliki keberagaman ras maupun agama, dapat menjadi laboratorium masyarakat untuk penerapan pendidikan karakter. Proses interaksi yang melibatkan semua pihak dalam kearifan lokal sama saja mempelajari karakteristik dari materi yang dikaji sehingga siswa secara langsung dapat menggali karakter peristiwa kelokalan itu.

Oleh karenanya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup (*PR, Oktober 2004*). Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan demikian membangun pendidikan karakter disekolah melalui kearifan lokal sangatlah tepat.

Hal ini dikarenakan Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi sehari-hari. Model pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan sebuah contoh pendidikan yang mempunyai relevansi tinggi bagi kecakapan pengembangan hidup, dengan berpijak pada pemberdayaan ketrampilan serta potensi lokal pada tiap-tiap daerah. Kearifan lokal milik kita sangat banyak dan beraneka ragam karena Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, berbicara dalam aneka bahasa daerah, serta menjalankan ritual adat istiadat yang berbeda-beda pula. Kehadiran pendatang dari luar seperti etnis Tionghoa, Arab dan India semakin memperkaya kemajemukan kearifan lokal.

Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai media untuk melestarikan potensi masing-masing daerah. Kearifan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah merupakan potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah tertentu. Para siswa yang datang ke sekolah tidak bisa diibaratkan sebagai sebuah gelas kosong, yang bisa diisi dengan mudah. Siswa tidak seperti plastisin yang bisa dibentuk sesuai keinginan guru. Mereka sudah membawa nilai-nilai budaya yang dibawa dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Guru yang bijaksana harus dapat menyelipkan nilai-nilai kearifan lokal mereka dalam proses pembelajaran. Pendidikan berbasis kearifan lokal tentu akan berhasil apabila guru memahami wawasan kearifan lokal itu sendiri. Guru yang kurang memahami makna kearifan lokal, cenderung kurang sensitif terhadap kemajemukan budaya setempat. Hambatan lain yang biasanya muncul adalah guru yang mengalami lack of skill. Akibatnya, mereka kurang mampu menciptakan pembelajaran yang menghargai keragaman budaya daerah.

HAKEKAT NASIONALISME

Kesadaran nasional adalah berpikir kritis, rasional, dialektik, proaktif, dan holistik tentang hari depan bangsa berdasar pengalaman saat ini dan berdasar pengalaman masa lampau (Kartodirdjo: A:1955). Hakikatnya kesadaran nasional adalah kesadaran tentang sejarah bangsa, yaitu Bangsa Indonesia. Bung Karno mengatakan: “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah”. Itu artinya sejarah sesuatu bangsa adalah ciptaan bangsa itu sendiri, bukan ciptaan bangsa lain. Kesadaran yang demikian menjadi dasar untuk membangun bangsa di hari depan yang lebih baik dari pada masa lalu dan masa kini.

Pengembangan kesadaran berbangsa mengandung makna membangun kembali pondasi nasionalisme kita (*Nation character building*). *Nation building* pada prinsipnya merupakan sebuah proses terus-menerus menuju terciptanya sebuah negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar ideologinya. (Simatupang, 1980:18-23). Dengan kata lain, *nation building* merupakan proses pembentukan kesatuan bangsa yang utuh. Sementara itu, *nation* sendiri menunjuk pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnik, kelas atau golongan sosial, aliran kepercayaan, kebudayaan, linguistik, dan sebagainya. Kesemuanya terintegrasikan dalam perkembangan historis sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan bersama. Heterogenitas dalam berbagai segi kehidupan, unsur-unsurnya digembleng menjadi suatu homogenitas politik dan lazimnya terwujud sebagai negara nasional. Negara nasional itu sendiri menjadi wahana yang berfungsi untuk adaptasi, mempertahankan kesatuannya, memperkokoh proses integrasinya serta mencapai tujuan eksistensinya. Negara nasional lebih efektif dan efisien dalam menopang eksistensi kelompok yang pluralistik dibanding sebagai komunitas lokal, regional, tribal, komunal, dsb. Jadi dalam perkembangan sebuah bangsa, proses integrasi menjadi isu sentral, artinya integrasi teritorial dan integrasi sosio-politik merupakan faktor dominan dalam mewujudkan unit nasional seperti sekarang ini. (Kartodirdjo, 1993:1-2).

Pengalaman masa lalu bagi Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang adalah kesalahan intern Bangsa Indonesia sendiri. Jika pada waktu itu kita sudah memiliki *tingkat kebudayaan* seperti Belanda, Inggris, dan Jepang, maka tidak mungkin mereka mampu menjajah kita. Kebudayaan yang berupa ilmu, teknologi, dan tenaga ahli (termasuk keprajuritan atau kemiliteran) hakikatnya adalah *alat* yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan bisa dijadikan alat untuk menyengsarakan umat manusia khususnya melalui penjajahan bangsa atas bangsa lain.

Bagi kaum penjajah, menggunakan kebudayaan untuk menjajah bangsa lain adalah suatu kebanggaan. Karena mereka dapat menunjukkan keunggulannya (*cultural advantage*). Oleh sebab itu kaum penjajah memandang rendah bangsa yang dijajahnya, diperlakukan sebagai budak atau kuli. Bagi sebagian besar bangsa terjajah, tindakan kaum penjajah itu merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan merupakan penghinaan, penghisapan, dan penindasan. Maka mereka bangkit melawannya. Tetapi ada sebagian kecil

bangsa terjajah yang mendapatkan kenikmatan dari kaum penjajah ingin tetap melestarikan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Hal yang demikian itu akan berlangsung sampai kapanpun selama eksistensi penjajahan itu masih bercokol di penjuru dunia ini. Kaum yang demikian lazim disebut sebagai “mitra” penjajah yang tugasnya adalah memberi informasi kepada penjajah, di mana informasi itu dipergunakan oleh kaum pejajah untuk merencanakan penjajahan yang lebih canggih.

Nasionalisme atau kesadaran nasional didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengisi kekuatan bangsa itu (Kartodirdjo:1999:10). Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial, perkembangan pendidikan Barat, dan pendidikan islam terhadap munculnya nasionalisme Indonesia.

- a. Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Pada mulanya kolonial Barat hanya ingin mendominasi perekonomian lama kelamaan kolonial Barat menguasai politik dan ekonomi. Akibatnya seluruh politik dan ekonomi Indonesia dirampas oleh kolonial Barat. Penjajahan dan penindasan inilah yang menyebabkan kesadaran Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah dengan cara berjuang.
- b. Pengaruh perkembangan pendidikan Barat. Sejak abad ke-19 pemerintah Belanda secara lambat laun membuat sekolah-sekolah. pendidikan itu ternyata begitu menarik bagi pemuda Indonesia. Selain lembaga pendidikan kolonial ada juga lembaga pendidikan swasta yaitu Taman Siswa, Muhamadiyyah, Missi, dan Zending. Lembaga-lembaga itulah yang kemudian menghasilkan tokoh2 nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
- c. Pengaruh pendidikan Islam. Sekolah-sekolah yang didirikan organisasi Islam seperti Muhamadiyyah bersifat Modern karena proses pembaharuan namun masih bersifat islami. Artinya ilmu pengetahuan modern dipadu dengan ajaran Islam.

UPAYA MEMPERKUAT NASIONALISME MELALUI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH RAWAN KONFLIK

TIDAK dapat dipungkiri, bahwa persoalan nasionalisme tidak akan selesai diperdebatkan dalam ruang dan waktu singkat. Indonesia sendiri masih terus bergerak untuk

menemukan nasionalisme yang utuh, karena dibangun dari pondasi imajinasi, meskipun sudah disepakati sebuah nation sejak berpuluh-puluh tahun. Wajar, mengingat sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia lahir dari beragam bangsa (etnisitas) yang sudah lama ada di Nusantara ini, mulai dari Aceh hingga Papua.

Melacak lebih mendalam tentang perasaan kebangsaan, maka akan muncul ke permukaan mengenai “siapa kita”. Di Sulawesi, ada suku Mandar (yang terkenal dunia maritimnya) tidak mau disebut orang Bugis maupun Makassar, meskipun sama-sama beradaptasi dalam satu wilayah. Begitupun di Jawa, orang Sunda, dan Madura tetap tidak akan mau dipanggil orang Jawa.

Di Aceh sendiri, suku-suku tertentu pun enggan menyebut dirinya Aceh dalam skala mikro. Dilihat dalam kaca mata lebih makro, antara masyarakat yang hidup di Aceh bagian timur, dan barat-pun tetap membedakan dirinya. Identitas menjadi orang tertentu yang terkonstruksi dalam imajinasi kita adalah perasaan bangga untuk menjadi bagian dari bangsa yang kita yakini (primordial).

Kegundahan suku Gayo dan pesisir barat merespons “ekspansi identitas” adalah sebuah kewajaran dalam ranah sosial, dan budaya. Kesadaran nasionalisme muncul tatkala manusia mulai memahami, dan membatasi identitas dirinya berbeda dari komunitas lainnya. Perbedaan itu muncul dari sisi budaya (bahasa, adat istiadat, kesenian, sistem kepercayaan dan pola survive dengan lingkungannya).

Embrio nasionalis etnik akan tetap survive selama “klaim” atas dirinya berbeda dengan yang lain dipertahankan. Karena itu, kesadaran akan musuh bersama (etnik) muncul bila mengusik identitas “mereka”, hingga datang perasaan kebangsaan. Kasus Papua, misalnya, dalam tema yang sedikit menyentil maka akan muncul istilah “Demokrasi Kesukuan” (lihat: Sem Karoba dkk, 2010).

Pada tataran politik, maka kondisi apa yang sedang terjadi di Aceh akan dimaknai secara beragam oleh berbagai kalangan. Sisi kultural yang seharusnya mampu melihat ini lebih mendalam tidak muncul, karena ditekan oleh kekuatan politik yang menyeret argumen sejarah sebagai simbol kekuatan untuk melegalkan sebuah tujuan.

Pada sisi kultural sebenarnya etnisitas menjadi perhatian utama, karena dia menyangkut dengan budaya, dan identitas sebuah komunitas yang hidup sepanjang sejarah.

Etnisitas tidak akan pernah berhenti mereproduksi simbol budayanya untuk memperoleh keadilan dari pihak yang menang.

Embrio nasionalisme etnik itu muncul, tatkala konsep Qanun Wali Nanggroe yang baru disahkan di Aceh dianggap tidak mengakomodir sub-etnik yang juga hidup di Aceh. Kondisi ini telah membangkitkan kesadaran nasionalisme mereka (sub-etnik Aceh) yang ikut merasakan penderitaan selama masa konflik. Mereka yang juga merasa bagian dari Aceh, menuntut pengakuan identitas kebangsaan (Aceh) oleh “orang Aceh” yang mendominasi teritorial Serambi Mekkah ini. Pengakuan identitas tersebut setidaknya ikut melibatkan simbol budaya mereka ke dalam wilayah kekuasaan “monarki” baru (Wali Nanggroe).

Gayo menjadi suku yang pertama sekali memunculkan semangat nasionalisme etniknya. Bila melihat catatan budaya yang terselip, dan kembali menarik garis sejarah. Saat Snouck Hurgronje menulis deskripsi tentang Aceh, maka sepertinya si Abdul Gaffar telah menulis satu buku yang terpisah dari yang lain mengenai keberadaan masyarakat di tengah-tengah Aceh tersebut. Bagi sastrawan Belanda itu, Gayo menjadi perbincangan tersendiri yang menarik untuk dilihat budayanya yang tetap survive, dan hidup di tengah Aceh. Apalagi masyarakat Gayo juga ikut terlibat aktif dalam mempertahankan Aceh dari penjajah hingga masa konflik.

Pada diskusi ini, saya tidak tertarik untuk menarik kasus ini dalam ranah politik yang penuh kompetisi. Saya ingin melihat dalam tataran sosial, dan budaya mengapa embrio etnisitas itu tetap hidup meskipun dalam ranah demokrasi. Antara Aceh, dan sub-etniknya dalam teritorial tersebut, antara Aceh dan saudara-saudaranya yang hanya dibatasi oleh garis batas bahasa dan simbol adat.

Merunut pada realitas di lapangan bahwa ada perubahan arah “musuh bersama” dari vertikal ke horizontal, tapi masih pada tataran konflik etnik (antara Aceh dan Jakarta beralih pada antara Aceh dan sub-etniknya). Lebih mendalam kondisi ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan wilayah *imagined community* yang pernah ditulis oleh Anderson (lihat: Anderson, 2008).

Dalam teorinya G. Kellas (dalam *Bangun Tambunan Nasionalisme Etnik: Kashmir dan Quebec*, 2004) menyebutkan pada dasarnya ada tiga perspektif nasionalisme (primordial, kontekstual, dan konstruktif). Bila dieksplorasi tiga perspektif ini, maka sebenarnya

semangat etnisitas itu adalah semangat yang diwarisi oleh sejarah mereka (melalui simbol-simbol budaya).

Simbol budaya yang mereka miliki kemudian dibentuk oleh kondisi perkembangan modern seperti menghadapi ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dianggap sudah teraneksasi akibat kompetisi antara yang menang dan kalah. Pada tahapan akhir nasionalisme ini menguat karena ada aktor yang berperan mengkonstruksi kembali nasionalisme, untuk menggerakkan semangat etnisitas mereka.

Aceh sebagai kelompok (etnis) yang menang dalam proses aneksasi menurut perjalanan sejarah, tidak bisa melupakan begitu saja sub-nasionalisme (etnisitas) lain yang hidup dalam teritorial mereka. Setidaknya, aktor Aceh harus melakukan upaya-upaya merangkul kembali, atau mengkonstruksi sebuah kesadaran kolektif betapa pentingnya kesatuan Aceh sebagai sebuah nasionalisme, dan sub etnisnya. Tentunya, kita tidak mengharapkan adanya perpecahan dalam wilayah yang penuh nuansa sejarah ini. Mengedepankan sisi budaya dalam menyelesaikan kasus antarkomunitas yang mendiami Aceh, cenderung akan menemukan solusi yang bijak.

Selain itu, kita juga harus memahami, bahwa bahasa telah menjadi simbol utama penegas etnisitas, bahasa sangat sensitif dalam arena setting sosial, dan budaya yang mulai dimasuki politik kemudian hari. Bagaimanapun, peran produk industri telah ikut memperkuat komunikasi etnis, sehingga tatkala ada aktor lain yang mengkonstruksinya maka nasionalismenya bangkit. Sedikit saja para aktor sosial, dan politik memahami posisi kultural, maka riak konflik tidak akan terjadi. Tentunya sampai kiamat, Aceh tetap dalam satu bingkai, bukan tiga bingkai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka . (2005). *Budaya Tradisional Dan Lokal Di Tengah Multikultural Nasional Dan Arus Globalisasi*. (online). Tersedia: (<http://www.forum-rektor.org/artikel.php?hal=3&no=11>). 5 September 2005.
- Budimansyah, D. (2010) *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2009a) *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UPI.
- Bhagwati, Jagdish. (2004). *In Defense of Globalization*. New York: Oxford University Press.

- Buwono X, Sultan Hamengku (2007) *Merajut kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cheng, Y.C. (1999). *Curriculum and Pedagogy in the New Century: Globalization, Localization and Individualization for Multiples Intellegences*. Bangkok: UNESCO-ACEID.
- Cogan, J.J., (1999), *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: [wwwCICED](http://www.CICED).
- Cogan, J.J. dan Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: an Internasional Perspectiva on Education*. London: Kogan Page.
- Creswell, John, 2008, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Pearson Education, Inc upper Saddle River, New Jersey.
- Dianns Fia. (2001). *Otonomi Daerah dan Konflik Sosial*. [online]Tersedia: detik.com di <http://www.detik.com/kampus/gagasan/2001/01/2001111-145521.shtml>. (8 Oktober 2001)
- Djahiri, K. (1984). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Laboratorium PMPKN IKIP Bandung.
- Djahiri, K. (2006). “Esensi Pendidikan Nilai-Moral dan PKn di Era Globalisasi” dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Donald W. Robinson. 1967. *Promising Practices in Civic Education*. New York: National Council for the Social Studies.
- Franz Magnis Suseno. (2006). <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/f/franz-magnis-suseno/index2.shtml>. 25 Mei 2006.
- Fraenkel, J.R. (1977). *How to Teach about Values: An Analytic Approach*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Gagné**, R. M. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. (4th edition). New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Gerald A. Larue. (2006). *Human Values for the 21st Century*. (Online) Tersedia: <http://www.humanismtoday.org/vol12/larue.html>. 8 April 2006.
- Geisler, Norman (2001) *Resensi Buku :ETIKA KRISTEN: Pilihan dan Isu*, Malang :SAAT
- Greertz.C. (1992).*Tafsir Kebudayaan*.(Alih Bahasa oleh Fransisco Budi Hardiman). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harrison, Lawrence E. & Huntington, Samuel P. (Editors). (2000). *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Hermann, (1972).“Value Theory (Axiology)”.*The Journal of ValueInquiry* .VI, (3).163-184.

- Huntington, Samuel P. (2009) *Benturan Antar Peradaban Dan masa Depan Politik Dunia*, Diterjemahkan dari, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, oleh M. Sadat Ismail, Jakarta Qalam, Cet. 11.
- Kalidjernih, 2007. *Cakrawala Baru Kewarganegaraan*. Bogor. Regina.
- Kotter, P. (1955). *The New Rules How to Succeed in Today's Post-Corporate World*. New York: The Free Press.
- Kuhn, Thomas S. 2000. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigm dalam Revolusi Sains*. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lickona, T. (1987). "Character development in the family" dalam *Character Development in Schools and Beyond*. New York: Praeger.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Marzano, R.J. (1992). *A Different kind of classroom: Teaching with dimension of learning*. Alexandria: Assosiation for Supervision and Curricullum Development.
- Marzano, R. J. *et al.* (1988). *Dimension of thinking: A frame work for curriculum and instruction*. Alexandria: Assosiation for Supervision and Curriculum Development.
- Mikletwait, John & Wooldridge, Adrian.(2000). *A Future Perpect*. New York: Crown Publishers, Random House Inc.
- Mustofa Muchdhor, (2002). *Krisis Kemanusiaan dan Etika Global*. (Online). Tersdia: <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October/000405.html>. 12 Oktober 2002.
- National Council for the Social Studies. (1994) *Curriculum Standards for Social Studies*. [Online] Tersedia : <http://www.socialstudies.org/standards/exec.html>. (26 september 2001)
- Robertson, R. (1992). *Globalization Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publication.
- Sabatini, C.A., Bevis, G.G., Finkel, S.E. (1998). *The Impact of Civic Education Programs on Political Participation and Democratic Attitudes*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Said Hamid Hasan.(1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Stanley P. Wronski dan Donald H. Bragaw.(1986) *Sosial Studies and Sosial Science*. Washington: NCSS
- Soekarno. (1930). *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial Tahun 1930*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

- Somantri, Numan. 1975. *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- Sumantri, Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda
- Superka, D.P. (1973). *A typology of valuing theories and values education approaches*. Doctor of Education Dissertation. University of California, Berkeley.
- Suryadi, Ace (2009) *Membangun Kompetensi SDM Yang mampu Bersaing di Era Global Melalui PKn (Masalah dan Tantangannya)*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- Suwardi, Herman, (2004) *Roda Berputar Dunia Bergulir*, Bandung, Bakti Mandiri.
- UNESCO-APNIEVE.(2000), *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni: Pendidikan Nilai untuk Perdamaian, Hak-hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kawasan Asia-Pasifik*, Buku Sumber UNESCO-APNIEVE untuk Pendidikan Guru dan Jenjang Pendidikan Tinggi, Kantor Prinsipal UNESCO untuk Kawasan Asia Pasifik, Bangkok dan Universitas Pendidikan Indonesia.
- The International Commission on Education for the Twenty-First Century. (1996). *Learning: The Treasure Within*, Report to UNESCO of The International Commission on Education for the Twenty-First Century.
- Wahab, Abdul Azis (2009) *Memantapkan Kembali jatidiri Bangsa Dalam Rangka Penguatan Dasar-Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- Wahab, Abdul Azis, (2001). *Perubahan dan Ketidak Pastian (Tantangan Utama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*. Makalah. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Welton & Malan, (1988) *Children and Their World*. Boston: houghton Mifflin
- World Commission on the Social Dimension of Globalization. (2004). *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*. New York: ILO Publication.
- Winataputra, Udin (2008) *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif PKN Sebagai Wahana Pembangunan Karakter bangsa Indonesia., dalam "Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI., Volume 2, No. 1 Oktober 2008.*
- Winataputra, Udin dan Budimansyah (2007) *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.*, Bandung Program Studi pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

KONSEP GERAKAN MORAL MAHASISWA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Jamilah
(Dosen STKIP Garut)

Abstrak

Perjuangan gerakan moral mahasiswa menciptakan sejarah tersendiri dalam ketatanegaraan Indonesia, dimulai dari era 1970 an, 1980 an, 1990 an, dimana pada tahun 1998 merupakan puncak terhadap pelengseran Soeharto, sehingga terjadi perubahan rezim dari orde baru menjadi reformasi. Pemikiran baru terhadap konsep gerakan moral mahasiswa adalah gerakan multi disipliner (Andrianto:2004), artinya bahwa kondisi realitas kebangsaan sedang mengarah kepada perbaikan-perbaikan sistem di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, ketahanan. Gerakan mahasiswa harus berkomunikasi dengan cita-cita besar ini dan melakukan negoisasi terhadap semua lini, baik kalangan atas, maupun bawah.

*Strategi gerakan tersebut selaras dengan kacamata idealis gerakan mahasiswa, yakni gerakan mahasiswa mempunyai dua peran besar. **Pertama**, sebagai the agent of social control. **Kedua**, sebagai the agent of social change. Gerakan mahasiswa menjadi progresif, dinamis, refolusioner dan inklusif, jika, **Pertama**, proaktif merespons keadaan dan teguh pendirian. **Kedua**, melakukan dialog transformatif untuk menciptakan masyarakat komunikatif yang demokratis. **Ketiga**, mendorong pada aktivisnya untuk membentuk kapasitas intelektual yang memadai dan berjiwa intelektual organik.*

Gerakan perubahan besar-besaran dalam upaya membangun ketatapemerintahan yang baik merupakan salah satu kajian demokratisasi dalam segala bidang pemerintahan, oleh karena itu perwujudan good governance semestinya dimulai dari pemerintah yang memiliki komitmen dalam upaya perubahan dan demokratisasi.

Kata kunci : Gerakan moral mahasiswa, *good governance*, demokrasi

A. Pendahuluan.

Dalam perjuangan pergerakan moralnya, mahasiswa membawa corak tersendiri dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Titik perjuangan dari beberapa estafet generasi mahasiswa dari angkatan 1970-an, 1980-an sampai 1990 an, dimana pada tahun 1998 merupakan puncak terhadap *pelengseran* Soeharto. Pada masa tersebut kekuatan pergerakan mahasiswa sangat luar biasa sekali. Di samping sejumlah faktor pendukung eksternal, harus diakui, para demonstran mahasiswa tahun 1998 unggul dalam stamina. Kita tidak cukup hanya memperhitungkan bagaimana mereka masih saja terus bertahan sesudah digebuk, digempur, diculik atau ditembak. Stamina para demonstran digempur juga oleh berputarnya waktu, kelelahan, kejenuhan, kebosanan, atau apatisme biarpun sepak terjang mereka sepenuhnya dibiarkan aparat keamanan. Entah apa yang terjadi pada gerakan mahasiswa Indonesia jika Presiden Soeharto mundur bukan bulan Mei, tetapi bulan Juni atau sesudahnya (Heryanto:2000:306). Pada kenyataannya bahwa pada era 1980-an pergerakan moral mahasiswa sudah mulai memuncak. Aspinal (Australian Nasional University,2000) dalam Gunawan dkk (2009:23) mengemukakan bahwa sejak akhir tahun 1980-an telah tercipta kesadaran radikal dalam gerakan mahasiswa. Radikalisme itu dipengaruhi berbagai bacaan kiri yang mereka baca dalam kelompok studi dan juga dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa kiri Filipina dan Korea Selatan. Berbagai kelompok radikal mahasiswa lalu mulai bergerak ke arah kiri, terutama para aktivis mahasiswa di Yogyakarta, Jakarta dan Bandung sebagaimana ditunjukkan dengan pengorganisasian kelas pekerja, mendiskusikan formasi sosial masyarakat Indonesia dan menolak model ala Barat.

Pada masa pemerintahan Habibi, resistensi mahasiswa masih berada dalam gelombang pasang. Meskipun begitu, skala keterlibatannya dalam aksi-aksi telah menyusut secara signifikan. Peran mahasiswa dalam aksi-aksi massa jalanan tidak sama lagi seintens pada saat penggulingan Soeharto yang melibatkan seluruh eksponen mahasiswa di Indonesia. Yang tersisa kemudian hanyalah sebagian kecil mahasiswa yang tersebar di sejumlah kota di mana Jakarta paling dominan (Manan:2005:179).

B. Prinsip Gerakan Moral Mahasiswa

Aktivis pergerakan mahasiswa perlu memahami prinsip-prinsip dalam pergerakan mahasiswa (Kusumah:2007:30). Diantaranya:

1. Menjadikan ideology (*aqidah*), pemikiran (*fikroh*) dan konsep serta pola gerakan (*minhaj haraki*) sebagai pengarah dan sumber petunjuk.
2. Membingkai kerja dengan perilaku (*suluk*) dan etika (*akhlak*) yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.
3. Memegang teguh konsep perjuangan: member teladan sebelum mengajak, menggembirakan bukan menakuti, mempermudah bukan mempersulit, serta member solusi bukan menghakimi.
4. Melakukan aktivitas pergerakan yang intelektual dan inklusif, serta menjauhi kerja yang anarkis, eksklusif dan khusus untuk golongan tertentu.
5. Mengelola lembaga pergerakan mahasiswa dengan mengacu kepada prinsip legal, formal dan wajar.
6. Mengingat hakikat dirinya sebagai aktivis pergerakan yang memiliki tugas mengajak orang untuk terlibat dalam proses kaderisasi gerakan melalui berbagai potensi yang dimiliki.
7. Menyemangati diri dan aktivis yang lain untuk terus berkontribusi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.
8. Melakukan upaya yang terus menerus untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penemuan ilmiah dan pemikiran solutif.
9. Memperhatikan secara khusus orang-orang yang cerdas, berprestasi dan kreatif untuk diajak sinergi dalam pergerakan.
10. Menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan seorang sivitas akademika lulusan Perguruan Tinggi di hadapan masyarakat adalah berdasar pada kompetensi ilmu, keterampilan, moral dan onteraksi sosialnya. Karenanya tidak ada keringanan dan pengecualian dalam pencapaian hal tersebut.
11. Mengantisipasi kondisi dan kebutuhan dunia pasca kampus.
12. Memiliki peran besar dalam isu kemanusiaan, kebangsaan dan keumatan
13. Membela hak asasi manusia, kemerdekaan dan keadilan bagi manusia, bangsa dan umat.
14. Melakukan interaksi dan hubungan baik dengan semua golongan dalam batas adab umum yang berlaku dan prinsip persaudaraan serta kemanusiaan yang luas.
15. Memahami dan memanfaatkan logika dan adab umum sivitas akademika serta peraturan formal keorganisasian sivitas akademika yang berlaku.
16. Memandang penting keikutsertaan dalam media mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

Gerakan moral mahasiswa merupakan bentuk gerakan atau aksi kolektif mahasiswa, dimana gerakan ini merupakan bentuk dari gerakan sosial. Menurut Hamka (2000) dalam Matulesy (2005:46) ciri khas dari gerakan moral mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Gerakan mahasiswa diwadahi oleh organisasi, baik yang bersifat permanen untuk kepentingan jangka panjang maupun gerakan temporer (*anomic*) dalam jangka pendek.
- b. Setiap gerakan mahasiswa memiliki tujuan yang berbeda-beda menurut keragaman organisasi. Pada gerakan mahasiswa yang permanen, tujuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan pada gerakan mahasiswa yang temporer bertujuan menekan kebijakan pemerintah dan melakukan perubahan politik.
- c. Gerakan mahasiswa dilakukan dengan penuh kesadaran bukan semata-mata atas dasar ketidakpuasan dan emosi yang membabi buta. Jadi gerakan mahasiswa didasarkan pada adanya idealism, kepekaan, sikap kritis dan sikap anti kemapanan.
- d. Setiap gerakan mahasiswa memiliki ideologis yang bervariasi menurut organisasi dan semangat jaman. Sebagai contoh, HMI dengan ideology Islam, GMNI dengan ideology nasionalisme, KAMMI dengan ideology radikalisme, SMID dan PIJAR dengan ideology populisme kiri dengan membela kaum buruh dan tani.
- e. Gerakan mahasiswa tidak membentuk lembaga resmi seperti partai politik, namun lebih menekankan aksi-aksi kolektif yang inkonvensional untuk mewujudkan tujuan gerakan. Sarana mobilisasi aksi massa berupa organisasi temporer seperti kesatuan aksi/komite dan solidaritas ad-hoc untuk menggelar parlemen jalanan.
- f. Di dalam menggelar aksi kolektif, gerakan mahasiswa menampilkan isu-isu-isu strategis sebagai sarana untuk memobilisasi massa dan mengefektifkan aksi.

C. Konsep Gerakan Moral Mahasiswa

Pemikiran baru terhadap konsep gerakan mahasiswa diutarakan oleh Andrianto (2004), beliau mengemukakan tentang Gerakan Multi Disipliner. Jika diterjemahkan dengan konteks kekinian di mana kondisi realitas kebangsaan sedang mengarah kepada perbaikan-perbaikan sistem di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, ketahanan. Gerakan mahasiswa harus “berkomunikasi” dengan cita-cita besar ini dan melakukan negosiasi terhadap semua lini, baik kalangan atas maupun bawah. Strategi gerakan ini selaras dengan kacamata idealitas Gerakan Mahasiswa, yakni

gerakan mahasiswa mempunyai dua peran besar. Pertama, sebagai *the agent of social control* . kedua, sebagai *the agent of social change*. Sederhananya bahwa konsep gerakan mahasiswa multidisipliner sedikit merubah paradigam tentang posisinya terhadap keberadaan pemerintah. Pilihan gerakan baru ini merupakan refleksi panjang kaum aktivis. Diaakui atau tidak, ada harapan dari Gerakan Mahasiswa agar pemerintah dapat menjadi mitra gerakan mahasiswa gerakan yang sebelumnya mengalami kebuntuan. Namun perlu difahami pula, kerjasama disini tidak dimaksudkan Gerakan Mahasiswa harus tunduk pada penguasa.

Ada pendapat lain tentang konsep gerakan moral mahasiswa ini, konsep sebagai agen perubahan dan konsep sebagai control social ternyata harus diperbaharui lagi, mengingat kondisinya sudah berbeda dengan perjuangan terdahulu. Konsep reposisi (menata ulang kembali) gerakan mahasiswa sebagai *agent of change* tidak dipandang sebelah mata.

Dachroni (2009) mengemukakan tiga tren gerakan yang patut menjadi perhatian gerakan mahasiswa kekinian. **Pertama**, tren/model gerakan intelektualitas. Sebagai kaum yang memiliki kecerdasan dan ketajaman menganalisa suatu persoalan sudah saatnya kiblat pergerakan mahasiswa saat ini berbasis riset dan kajian-kajian ilmiah, karena salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan penelitian. **Kedua**, tren/model gerakan jamaah atau pengkaderan. Bukan sebuah gerakan kalau tidak mampu melakukan proses pengkaderan, sebab untuk melakukan suatu perubahan diperlukan kerja-kerja berjamaah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS As-Shaff ayat 4, “sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. **Ketiga**, adalah tren atau model gerakan mahasiswa kewirausahaan. Tak bisa dipungkiri, cukup banyak aktivis dan gerakan mahasiswa yang mengorbankan bahkan menjual idealismenya karena mengalami penyakit kanker (kantong kering). Sudah saatnya, dengan kedua modal di atas gerakan mahasiswa harus memikirkan kondisi finansialnya dengan model pemberdayaan wirausaha.

Dalam tulisan lain Dachroni (2012) mengemukakan tentang konsep gerakan mahasiswa yang dilandasi oleh kebersamaan, hal ini merupakan suatu keharusan bagi gerakan mahasiswa untuk membangun sebuah kebersamaan gerakan, khususnya dalam menyikapi isu-isu public yang strategis dan menindas masyarakat lemah.

Menurutnya, ada tiga tantangan besar ketika kita membicarakan masalah membangun kebersamaan gerakan mahasiswa yang saat ini terkesan bergerak sendiri-sendiri. **Pertama**, perbedaan persepsi (pandangan). Cara pandang gerakan mahasiswa yang relative berbeda dalam menyikapi suatu persoalan. **Kedua**, motif kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan tidak jarang *disusupi* dengan kepentingan politik praktis. **Ketiga**, egoism gerakan dalam merebut isu dan perebutan kekuasaan di kampus.

D. Gerakan Moral Mahasiswa Dan *Good Governance*

Pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan sebuah gerakan budaya, karena ia memiliki kemandirian dan berdampak politik yang sangat luas. Oleh karena itu, mereka tidaklah boleh cepat puas dengan hasil yang dicapai. Gerakan mereka juga harus senantiasa menegakkan asas kebenaran politik dan pengungkapan kebenaran publik sekaligus. Maka, budaya Indonesia yang cenderung cepat puas dengan keadaan dan tidak peduli dengan perkembangan karena sibuk sendirian, tidaklah patut menjadi paradigma gerakan mahasiswa. (Anwa:1981).

Meskipun pemerintah, para politisi, anggota DPR, ataupun para eksekutif dan penguasa seperti tampak kita saksikan sehari-hari kurang berbudaya adiluhung, namun mahasiswa sebagai harapan bangsa terbesar tidaklah perlu terhinggapi virus tersebut. Terlebih lagi, budaya *patron-client*, malu, sungkan dengan senior, dan bermuka dua (munafik) yang banyak menjangkiti politisi dan sebagian masyarakat itu, bukanlah contoh yang bagus bagi para aktivis gerakan mahasiswa.

Agar gerakan mahasiswa menjadi progresif, dinamis, revolusioner, dan inklusif, gerakan mahasiswa haruslah meniscayakan hal berikut ini:

Pertama, pro-aktif merespons keadaan dan teguh pendirian. Gerakan mahasiswa haruslah bersatu dalam visi penegakan keadilan dan penumpasan kemunafikan. Hal ini bisa dilakukan dengan saling memasok informasi untuk selanjutnya dilanjutkan pada penyusunan agenda aksi. Sedangkan teguh pendirian yang dimaksud di sini adalah gerakan mahasiswa haruslah bersifat independen dan tidak menjadi perpanjangan tangan para seniorinya. Karena, hal ini biasanya hanya akan menimbulkan friksi di kalangan sendiri dan saling memperebutkan proyek demonstrasi.

Kedua, melakukan dialog transformatif-meminjam istilah Jurgen Habermas- untuk menciptakan masyarakat komunikatif yang demokratis. Bila selama ini gerakan intelektual cenderung elitis dan menggunakan bahasa yang mengawang, maka gerakan mahasiswa yang juga gerakan intelektual plus, haruslah mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat yang selama ini banyak ditindas.

Ketiga, mendorong para aktivisnya untuk membentuk kapasitas intelektual yang memadai dan berjiwa intelektual organik-meminjam istilah Antonio Gramsci.

Hal ini berguna agar para aktivis gerakan tidak hanya sibuk di lapangan, kurang melakukan refleksi, dan cenderung bergerak secara pragmatis. Bila mereka mampu memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, tentu saja akan berguna pada penyusunan strategi dan pengajuan alternatif konsep penyelesaian masalah yang dikritik secara lebih sistematis dan memadai.

Pada dasarnya mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*), di mana masyarakat menganggap mahasiswa merupakan sosok salah satu kelompok sosial yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan ketercerahan yang akan membawa perubahan sejarah menjadi lebih baik di masa mendatang (Hikam, 1999:221). Sebagai salah satu komponen sosial, maka mahasiswa bagaimanapun tidak pernah lepas dari kaitan-kaitan dialektis dengan struktur yang ada, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka sebagai pelaku (*actor, agent*)

sosial harus melakukan respon terhadap perubahan yang terjadi, tetapi pada saat yang sama respons tersebut harus dibatasi oleh latar kesejarahan dan struktur yang ada.

Sebagai *actor social* mahasiswa dituntut memiliki kemampuan tertentu dan secara historis ikut membentuk (*shaping*) proses politik bangsa kita. Namun kemampuan tersebut semakin lama semakin berkurang menyusul terjadinya proses perubahan besar di dalam struktur politik yang dicanangkan serta dilakukan oleh orde baru dalam rangka menopang proses modernisasi dan pembangunan ekonomi.

Demonstrasi atau gerakan mahasiswa pada dasarnya merupakan bentuk pemberontakan dalam menuntut keadilan hukum (Heryanto, 2000:279). Era dimulainya reformasi ditandai dengan gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh penjuru dunia, sehingga meruntuhkan kekuatan orde baru sebagai penguasa yang telah menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan kehendak dan harapan bangsa Indonesia. Maraknya aksi mahasiswa merupakan salah satu bentuk penyaluran aspirasi tuntutan mereka terhadap perubahan system Negara yang dinilai tidak sesuai dengan harapan bangsa ini.

Kehadiran-kehadiran kekuatan-kekuatan penekan yang terorganisir dan relative mandiri dari kontrol Negara yang merupakan bagian dari *civil society*, sebagai salah satu syarat utama proses dan konsolidasi demokrasi. Menurut Fortuna (2009:XVIII) kehadiran kelompok kelas menengah dan *civil society* yang mengusung ide-ide perubahan turut mendorong runtuhnya rezim orde baru dan dihidupkannya kembali idealism demokrasi di Indonesia yang memungkinkannya partisipasi politik secara luas melalui system pemilihan kompetitif dan transparan yang diharapkan dapat menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang aspiratif, baik dan bersih serta akuntabel didedikasikan untuk kepentingan bersama.

Menurut Hikam (1999:227) ada 3 macam respon dalam gerakan mahasiswa, yaitu: pertama, mahasiswa yang menceburkan diri sepenuhnya dalam hiruk pikuk proses modernisasi, mereka adalah mahasiswa yang berwawasan pragmatic dan mengikuti hukum *supply and demand* dengan tujuan mengisi keperluan pasaran kerja meniti karir yang diinginkannya. Respon kedua, mereka yang memilih berpegang

pada idealism mahasiswa sebagai kekuatan sosial yang harus mewarnai gerak masyarakat, terutama dalam politik. Umumnya mereka sangat militan dalam menyuarakan aspirasi dan cenderung menjadi radikal. Respon ketiga, mereka yang mencoba melakukan kritik terhadap kondisi yang ada baik dalam lingkup perguruan tinggi maupun makro dan mencari *alternative transformative*, dalam hal ini bagaimana mahasiswa menempatkan diri dalam proses transformasi social akibat modernisasi serta menjadi salah satu ujung tombak bagi pemberdayaan masyarakat terutama di kalangan bawah yang menjadi korban proses itu.

Dalam kaitan dengan perubahan demokrasi dalam perwujudan ketatapemerintahan yang baik, kualitas demokrasi bagi mahasiswa adalah bagaimana pemerintah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pemilih serta merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks pemerintahan (*governance*), dalam kajian isi bagaimana demokrasi menempatkan masyarakat memiliki kesetaraan dalam politik dan sejauhmana secara prosedural masyarakat terlibat secara partisipatif, kompetitif dan akuntabilitatif.

Manurut Prasojo (2009:5) prinsip dasar demokrasi dalam mewujudkan *good governance* adalah 1) kontrol masyarakat terhadap keputusan publik dan pembuat keputusan publik, 2) kesetaraan masyarakat dalam relasinya terhadap keputusan public, dua prinsip ini merupakan prinsip dasar *good governance* yaitu partisipasi, representasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan solidaritas.

Gerakan perubahan besar-besaran dalam upaya membangun pemerintahan yang baik merupakan salah satu kajian demokratisasi dalam segala bidang pemerintahan. Oleh karena itu perwujudan *good governance* semestinya dimulai dari pemerintah dengan sumber daya yang ada memiliki komitmen yang lebih dalam upaya perubahan dan demokratisasi, demokratisasi ini dimulai dengan keinginan untuk mendengarkan suara public (*responsivitas*) dan transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas). Menurut Denhardt, 2003 (Indiahono, 2009:8) menjelaskan bahwa pemerintah di manapun harus lebih berpihak pada public. Pemerintahan yang baik model apapun harus mengutamakan *public interest* dan *public affairs*.

Secara teoritis *good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara transparan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kekuasaan didasarkan pada kelembagaan bukan perseorangan atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara memiliki hak dan kewajiban sama di mata hukum (Kaloh, 2009:172).

Gerakan masyarakat muncul diakibatkan oleh karena pemerintah tidak mampu mengelola pemerintahan secara baik. Oleh karena itu tantangan ke depan pemerintah, termasuk pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan pengelolaan pemerintahan yang melayani masyarakat (*good governance*). Asumsinya, jika masyarakat merasa pengelolaan secara baik dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka pemerintahan dianggapnya sebagai suatu rahmat/anugerah.

Era dimulainya gerakan reformasi mahasiswa atau istilahnya gerakan moral mahasiswa puncaknya terjadi pada 1998 pada saat krisis ekonomi melanda negeri ini. Di tengah kelumpuhan pemerintah dan krisis ekonomi lah pelbagai gerakan delegitimasi orba bermunculan. Mahasiswa merupakan kekuatan garda terdepan (*avant garde*) yang mempelopori gerakan ini secara konfrontatif. Mereka sangat gencar dan tegar menggiatkan aksi-aksi perlawanan massa terhadap kekuasaan orba. Menurut Ken Young, gerakan mahasiswa sangat berhasil mengorganisasi diri, pintar mengeola isu, dan angkas berpolitik.

Semula gerakan mahasiswa adalah bentuk aksi keperihatinan terhadap krisis ekonomi yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Aksi itu mula-mula hanya diikuti oleh segelintir mahasiswa dan lebih sering dilakukan di dalam kampus. namun efek bola salju gerakan it uterus meluas dan berkembang menjadi gerakan mahasiswa se-Indonesia dengan isu pokok suksesi kepemimpinan nasional dan reformasi total. aksi-aksi mereka disambut liputan luas dan simpatik oleh pers, dan menjadi magnet banggunya solidaritas mahasiswa secara luas.

Tatkala siding MPR pada tanggal 11 Maret 1998 memilih kembali Suharto sebagai Presiden ke 7 kalinya, aksi-aksi mahasiswa justru semakin menggila.

Pemilihan kembali Suharto sebagai Presiden rupanya dianggap sebagai pelecehan terhadap perjuangan mereka. Militansi mahasiswa semakin menghebat ketika anak Suharto dan kroninya masuk dalam susunan Kabinet Pembangunan VII yang diumumkan tanggal 14 Maret 1998 di Istana Merdeka. Ini semakin membuktikan bahwa tuntutan KKN yang mereka suarakan tidak pernah di gubris.

Meski telah dilakukan dialog, mahasiswa tetap menilai tidak efektif, tuntutan mereka sudah jelas yakni reformasi total dan mesti dimulai dengan lengsernya Suharto. Aksi-aksi keprihatinan dan mimbar bebas masih terus berlanjut dipelbagai kota seiring terus berlanjutnya bentrok mereka dengan aparat. di tangan gemuruh aksi-aksi itu, masyarakat digemparkan dengan berita penculikan para aktivias demokrasi oleh aparat militer. sebagai korban bisa ditemukan dan sebagian lagi menuturkan penderitaanya. Hal ini yang semakin memojokkan posisi Suharto dan militer.

Aksi yang semakin memanas itu tidak semakin surut, pada saat 4 mahasiswa Unsakti tewas tertembak oleh aparat di kampusnya tanggal 12 Mei 1998. Tragedi ini menimbulkan rasa simpati dan duka yang mendalam sekaligus membakar rasa geram dan marah dari masyarakat luas. Kegeraman dan kemarahan masyarakat dan mahasiswa itu diikuti dan diperburuknya melonjaknya harga-harga sehingga tak terelakkan terjadilah “kerusuhan Mei” pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa tercatat berperan besar sebagai *creative minority*, meminjam istilah Arnold Toynbee, di mana mereka selalu menjadi motor penggerak perubahan di Indonesia. Peran itu kembali terbukti dalam peristiwa tumbangny Suharto dan menaklukkan Orba. Prestasi tersebut semakin mengukuhkan kebenaran predikat mahasiswa sebagai *Agent of Change*.

D. Penutup

Jatuhnya Suharto bukanlah tujuan akhir perjuangan mahasiswa, tapi karena Suharto berarti sebuah perintang utama mencapai perubahan telah disingkirkan. Gerakan mahasiswa sejak era transisi terus berlanjut, kendati dengan gelombang

pasang surut. Pada masa Habibie, resistensi mahasiswa masih berada dalam gelombang pasang. Meskipun begitu skala keterlibatannya dalam aksi-aksi telah menyusut secara signifikan. Peran mahasiswa dalam aksi-aksi jalanan tidak sama lagi seintens pada saat penggulingan Suharto yang melibatkan seluruh eksponen mahasiswa di Indonesia. yang tersisa kemudian hanyalah sebagian kecil mahasiswa, yang tersebar di sejumlah kota di mana Jakarta paling dominan.

Saat ini kita saksikan bahwa geliat semangat perjuangan mahasiswa pada era transisi menyusut padam. Kecuali itu, sesaat setelah Suharto jatuh gerakan mahasiswa mengalami disorientasi, fragmentasi dan menyusutnya militansi. Disorientasi terjadi terutama disebabkan oleh raibnya *common enemy* (yaitu figur Suharto) yang sebelum mempersatukan mereka. Setelah Suharto runtuh gerakan mahasiswa kehilangan isu sentral untuk menjaga jalinan kebersamaan yang sudah terbangun.

Disorientasi juga terjadi manakala kelompok-kelompok mahasiswa di daerah mulai meninggalkan isu-isu nasional dan mengangkat isu-isu lokal. Mereka mengelak dari isu-isu seperti tolak Habibie dan hasil SI MPR karena menurut mereka reformasi tidak terbatas pada persoalan di tingkat nasional, tetapi juga persoalan daerah. Sikap ini juga disebabkan karena mereka tidak mau terperangkap sebagai komoditi elite politik, karena itu artinya mahasiswa telah mencederai kemurnian gerakan mereka. Dari cara pandang inilah bermunculan isu-isu local yang disuarakan mahasiswa, mulai dari gugatan atas pejabat dan mantan pejabat yang melakukan KKN hingga persoalan Kampus (akademik).

Situasi di atas menunjukkan bahwa kohesifitas gerakan mahasiswa dalam agenda reformasi lebih bersifat taktis dan tentative. Mereka bersatu lantaran ada momen dan musuh bersama, daripada perhitungan strategis dan permanen berdasar visi jangka panjang dan ditopang struktur serta jaringan yang kuat. ketika momen dan musuh bersama itu raib, gerakan inipun gamang merespon situasi, terbalik ke watak aslinya, yakni sulit diajak bersatu dan mudah berselisih paham. Kondisi ini, justru melemahkan kondisinya sendiri yang member ruang leluasa bagi status quo memperkuat diri.

Gerakan mahasiswa yang bersifat fragmentasi memang tidaklah mengejutkan, sebab gerakan mahasiswa memang bukan gerakan yang kohesif dan solid. Gerakan mahasiswa tidak berdiri diatas pondasi yang homogen, sehingga rentan oleh bibit-bibit fragmentasi diantara mereka. perbedaan latar belakang motivasi, cara pandang dan termasuk juga afiliasi organisasi, membuat gerakan mahasiswa mudah terseret arus konflik dan friksi. Keadaan ini adalah factor menurunnya kekuatan gerakan mahasiswa dan akhirnya tak mampu membangun kekuatan yang memadai untuk menghadapi Negara.

Massa mahasiswa cair bukanlah bagian inti dari gerakan mahasiswa yang menjadi motor penggerak aksi-aksi gerakan mahasiswa. Keterlibatan masa mahasiswa cair pada umumnya lebih didorong oleh sikap solidaritas saja. Mereka lebih sebagai kumpulan individu yang iktu meramaikan dan memeraikan gerakan aksi mahasiswa. Karena itu turunnya Suharto banyak diartikan sebagai selesainya perjuangan reformasi. Namun selain ini, tampaknya di kalangan masa cair ini telah jenuh dengan aksi-aksi massa seolah-olah tidak selesai-selesai. Dalam keadaan demikian, intensitas aksi-aksi mahasiswa mengalami kemandegan, meskipun tidak senyap sama sekali.

Persoalan-persoalan internal dan eksternal gerakan mahasiswa tersebut tentu menguntungkan posisi Negara. Negara lantas memandang gerakan mahasiswa bukan sebagai kekuatan yang mengancam. inilah penjelasannya mengapa negara tidak ragu-ragu melakukan represif terhadap aksi-aksi mahasiswa yang mengusik agenda dan kepentingan rezim yang berkuasa. Tetapi meskipun saat ini aksi gerakan mahasiswa telah menyusut pamornya dan keampuhannya untuk mendesak tuntutan, mereka berhasil menciptakan ketegangan dengan negara sehingga kalau negara tidak terlalu menghitung kekuatan mahasiswa paling sedikit mereka bisa membentuk opini publik dan membuat negara tahu apa yang mereka kehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Rudi dkk (2009), *Menyulut Lahan Kering Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1990 an*, Jakarta, Jagakarsa
- Kusumah, Indra (2007) *Risalah Gerakan Mahasiswa*, Bandung, Indidec Press
- Heryanto, A (2000) *Perlawanan Dalam Kepatuhan*, Jakarata, Mizan
- Mannan, M (2005) *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, Magelang, Langit Aksara
- Matulessy, A (2005) *Mahasiswa dan Gerakan Sosial*, Jogjakarta, Srikandi
- Hikam, AS (1999) *Politik Kewarganegaraan (Landasan redemokratisasi di Indonesia)*, Jakarta, Erlangga.
- Indiahono, D (2009), *Telaah Kebijakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*, Jogjakarta, Gaya Media
- Kaloh, J (2009), *Kepemimpinan Kepala daerah*, Jakarta, sinar Grafika
- Prasojo, E (2009), *Reformasi Kedua*, Jakarta, Salemba Humanika

Keterlibatan Manusia dalam Pembelajaran Berbasis Inovasi Pendidikan

Oleh:
Dr. Sar Joni Herri, M.Pd

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya pemimpin lembaga, guru/dosen, staf Tata Usaha, dan pihak terkait lainnya, seharusnya menggunakan teknologi dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang inovatif dan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam dari para inovator pendidikan dalam memikirkan teknologi sebagai fenomena sosial yang secara radikal mempengaruhi perilaku manusia

Kata kunci: inovasi pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran berbasis komputer

Pendahuluan

Inovasi pendidikan pada abad ke-21 sangat terkait dengan perkembangan teknologi baru, sehingga memungkinkan adanya ragam pembelajaran yang tidak bergantung waktu dan tempat dengan melalui penyampaian berbasis Web dan komunikasi melalui komputer. Hampir semua lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi pada saat ini dituntut untuk menjadi lembaga pendidikan yang inovatif. Lingkungan pembelajaran yang berbasis web, dengan koneksi internet yang cepat dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan dapat menarik calon siswa atau mahasiswa untuk masuk ke sekolah atau universitas tersebut. Dengan adanya pembelajaran jarak-jauh secara *online*, siswa/mahasiswa dapat mengakses berbagai materi pembelajaran dari rumahnya di malam hari, mengunduhnya, menyerahkan tugas melalui email, atau konsultasi dengan guru/dosen melalui jejaring sosial.

Dalam hal ini, teknologi baru merupakan pemicu utama dari inovasi pembelajaran. Namun, di balik semua itu, para inovator pendidikan sering mengalami kendala dalam menyajikan inovasi pembelajaran yang benar-benar tepat, karena memang bidang TIK itu sangat kompleks. Pada gilirannya, TIK dapat menjadi sesuatu yang positif atau negatif. Positif bila TIK dapat meningkatkan proses pembelajaran, dan negatif bila TIK malah menghambat proses pembelajaran.

Agar TIK dapat meningkatkan proses pembelajaran, diperlukan adanya visi yang jelas, konsensus yang kuat dari pembuat kebijakan di suatu lembaga pendidikan mengenai bagaimana cara mengintegrasikan TIK dalam pendidikan secara konsisten, mengingat mahasiswa saat ini sudah terbiasa dengan beragam TIK.

Artikel ini membahas bagaimana lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya pemimpin lembaga, guru/dosen, staf Tata Usaha, dan pihak terkait lainnya, seharusnya menggunakan teknologi dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang inovatif dan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam dari para inovator pendidikan dalam memikirkan teknologi sebagai fenomena sosial yang secara radikal mempengaruhi perilaku manusia, terutama, misalnya di pendidikan tinggi (antara dosen dan mahasiswa).

Pendidikan dan Inovasi

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan di universitas berjalan relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sampai saat ini, masih banyak ditemui proses pendidikan dan pembelajaran yang di dalamnya terdapat seorang guru berdiri sebelah papan tulis di depan ruang kelas, sementara itu sejumlah siswa dengan menggunakan seragam duduk rapi di bangku masing-masing, dengan buku ajar dan buku catatan. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran klasik di kelas. Berbagai teknologi baru dalam pendidikan memungkinkan adanya peningkatan mutu pendidikan, namun konsep pembelajaran di ruang kelas tidak banyak berubah (Sleop & Westera, 2001). Pada intinya, perkembangan teknologi informasi saat ini tidak banyak mengubah konsep tradisional proses belajar-mengajar di kelas. Beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang berkaitan dengan TIK hanya satu atau dua saja, misalnya Pengantar Komputer dan sejenisnya. Jarang, misalnya, mata kuliah Statistik dilakukan dengan TIK. Hal ini dimungkinkan karena beberapa alasan. Pertama, dosen tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menggunakan TIK. Kedua, perangkat keras atau perangkat lunak tidak tersedia. Ketiga, tidak adanya konsep yang jelas dari inovator pendidikan mengenai apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh kemajuan teknologi dalam pendidikan dan inovasi pembelajaran.

Kondisi tersebut membuat penerapan TIK dalam pendidikan menjadi aktivitas yang mahal, rumit, dan tidak jelas. Selain itu, karena pendidikan dinilai sebagai konsolidasi dan transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari satu generasi ke generasi lainnya, terdapat benturan antara konsep konservatif dalam pendidikan dengan konsep inovasi dalam pendidikan. Kadang-kadang inovasi pendidikan dinilai sebagai sesuatu yang mengancam. Mendapatkan ide baru yang diadopsi, bahkan ketika itu memiliki keunggulan yang jelas, sering sangat sulit dilakukan oleh dunia pendidikan. Inovasi dalam pendidikan memerlukan waktu yang relatif panjang,

seringkali beberapa tahun lamanya, dari saat dimulai sampai waktunya diadopsi secara luas.

Perlunya Inovasi dalam Pendidikan

Terdapat dua alasan penting untuk dilakukannya inovasi dalam pendidikan. Pertama, dalam masyarakat yang terus berubah, pendidikan juga harus berubah. Bidang pendidikan harus berinovasi berkaitan dengan program-program pendidikannya agar senantiasa dapat berjalan seiringan dengan perubahan sosial yang demikian cepat, dengan meminjam istilah Toffler (1980) yaitu “information society” atau “knowledge society”, yang mengacu pada pentingnya pengetahuan sebagai alat produksi. Kedua, inovasi diperlukan agar dapat melayani peserta didik secara tepat. Teknologi baru, seperti sistem manajemen pembelajaran berbasis Web dapat meningkatkan pemberian mutu layanan kepada peserta didik, sekaligus mengurangi biaya penyelenggaraan. Namun, kenyataannya, teknologi baru seringkali tidak “menyatu” dengan proses pembelajaran sehingga pada gilirannya malah dapat menambah biaya per unitnya. Belum lagi jika teknologi tersebut mengalami gangguan teknis, atau lelet, kualitasnya buru, sehingga pada gilirannya dapat menghambat proses pembelajaran.

Sampai saat ini, teknologi pendidikan seperti film, televisi, video pembelajaran, multimedia dinilai gagal dalam memenuhi harapan pendidik. Kegagalan ini diduga karena substansi dari teknologi pendidikan tersebut hanya berpusat pada guru (*teacher-centered*), belum berpusat pada siswa (*student-centered*).

Sistem informasi merupakan sejumlah rangkaian komponen untuk mengumpulkan, menyebarkan, menyimpan, dan memproses data dalam rangka menyajikan informasi. Dalam berbagai bentuk organisasi, informasi ini diperlukan baik untuk operasional maupun manajemen. Sebagai besar sistem informasi saat ini dibangun di dalam teknologi informasi yang didukung oleh telekomunikasi dan komputer—atau istilah lainnya adalah sistem informasi berbasis komputer, yang di Indonesia pada saat ini dikenal dengan istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Teknologi informasi dapat dipandang dari dua sudut, yaitu pandangan deduktif dan induktif. Pandangan deduktif (*deductive view of information technology*) dimulai dengan perumusan masalah yang dihadapi organisasi saat ini, kemudian dilakukan pemecahan masalah melalui pemanfaatan kemampuan teknologi informasi. Dalam pandangan deduktif ini, teknologi informasi dipandang sebagai alat pemecahan masalah. Sementara dalam pandangan induktif (*inductive view of information technology*), pemanfaatan teknologi informasi dimulai dengan mengeksplorasi berbagai kemampuan potensial yang terkandung dalam teknologi informasi, kemudian diidentifikasi berbagai peluang yang dapat diraih melalui potensi teknologi informasi tersebut. Pandangan induktif ini dimulai dengan menyadari berbagai keunggulan yang dimiliki teknologi informasi untuk memecahkan berbagai masalah yang tidak disadari sebelumnya. Oleh karenanya,

berpikir induktif memungkinkan untuk membuka peluang-peluang baru bagi perusahaan melalui potensi yang tersimpan dalam teknologi informasi di bidang-bidang tertentu.

Perkembangan TIK pada saat ini dan di masa depan cenderung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kemunculan komputer baru dan perangkat online yang semakin murah dan semakin mudah digunakan
2. Perkembangan internet berubah dari yang sifatnya eksklusif menjadi lebih luas sebagai media komunikasi
3. Perubahan dari komunikasi berbasis teks menjadi komunikasi audiovisual
4. Bahasa di Internet akan berkembang dari yang asalnya bahasa Inggris saja menjadi multi-bahasa
5. Anak-anak generasi 2000 ke sini akan menjadi “anak digital”

Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology* (ICT) dewasa ini sudah menjadi istilah sehari-hari dalam dunia pendidikan, termasuk juga dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa dasawarsa yang lalu, kita mengenal istilah “teknologi pendidikan”, yang saat ini berkembang menjadi TIK dalam pendidikan, walaupun memang tidak mudah untuk mendefinisikan apa itu “teknologi pendidikan” atau cakupan dari profesi ini. Teknologi pendidikan itu sendiri berawal dari gabungan disiplin ilmu pendidikan, psikologi, dan komunikasi, juga bidang-bidang tertentu seperti pengembangan organisasi, ilmu-ilmu sosial, bisnis dan manajemen, dan ilmu komputer.

Akibatnya, para pendidik dengan pengalaman pelatihan profesi yang berbeda-beda seringkali menemukan bahwa mereka memang memiliki tujuan dan metode yang serupa, walaupun mereka menggunakan kata-kata atau istilah yang agak berbeda untuk mengungkapkan apa yang dilakukan. Akibatnya, para pendidik dengan pengalaman pelatihan profesi yang berbeda-beda seringkali menemukan bahwa mereka memang memiliki tujuan dan metode yang serupa, walaupun mereka menggunakan kata-kata atau istilah yang agak berbeda untuk mengungkapkan apa yang dilakukan. Teknologi pendidikan juga mengacu pada perangkat teknologi dan mesin-mesin tertentu. Bila demikian, teknologi pendidikan dapat menggambarkan suatu *metode* tertentu, yaitu penggunaan suatu teknologi atau teknik dalam mencapai suatu *outcome* pendidikan.

Walau tidak terdapat definisi yang jelas mengenai teknologi pendidikan, berbagai definisi tampaknya akan mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelajaran, pelatihan, pembelajaran, atau pengajaran. Dalam praktiknya, berbagai definisi tersebut difokuskan pada kepentingan berbagai pihak dengan menekankan cakupan bidang tertentu. Sebagai contoh, dalam hal ini, kita menggunakan istilah penggunaan TIK dalam pembelajaran.

Dewasa ini, terdapat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penerapan TIK dalam pendidikan, khususnya dalam perancangan dan pengembangan pengajaran dan sumber pembelajaran dengan menggunakan TIK. Oleh karena itulah, dalam beberapa

tahun terakhir ini, kita mengenal berbagai istilah seperti “teknologi pengajaran”, “desain sistem pengajaran”, “media pengajaran”, dan “media pembelajaran”. Singkatnya, TIK dalam pendidikan itu dapat digambarkan sebagai suatu proses, produk, atau suatu profesi.

Dalam TIK, interaksi manusia dan komputer tentunya diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar teknologi komputer dan jaringan lebih mudah digunakan oleh pengguna, juga meningkatkan *usability*. Secara umum, dalam mendesain Model Pembelajaran berbasis TIK, perancang model harus memperhatikan beberapa komponen dari proses desain yang mencakup:

- Analisis: menentukan desain model pembelajaran yang sesuai
- Spesifikasi: merancang model pembelajaran yang sesuai
- Implementasi: mengembangkan model pembelajaran
- Evaluasi: menguji model pembelajaran

Perancangan model itu sendiri seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, harus memperhatikan *usability*. Dalam desain model pembelajaran berbasis TIK, terdapat lima atribut *usability*, yaitu:

1. Learnability: seberapa cepat pengguna menguasai model pembelajaran berbasis TIK
2. Efficiency: seberapa cepat seorang pengguna dapat menyelesaikan pelajaran dengan model ini
3. Memorability: seberapa baik pengguna mengingat bagaimana model ini berjalan bila dia menggunakannya secara sporadic
4. Error Rate: seberapa banyak pengguna melakukan kesalahan saat menggunakan sistem ini, dan bagaimana kesalahan tersebut mempengaruhi penguasaannya
5. Satisfaction: sejauh mana pengguna puas terhadap sistem tersebut

Optimalisasi Media Pembelajaran

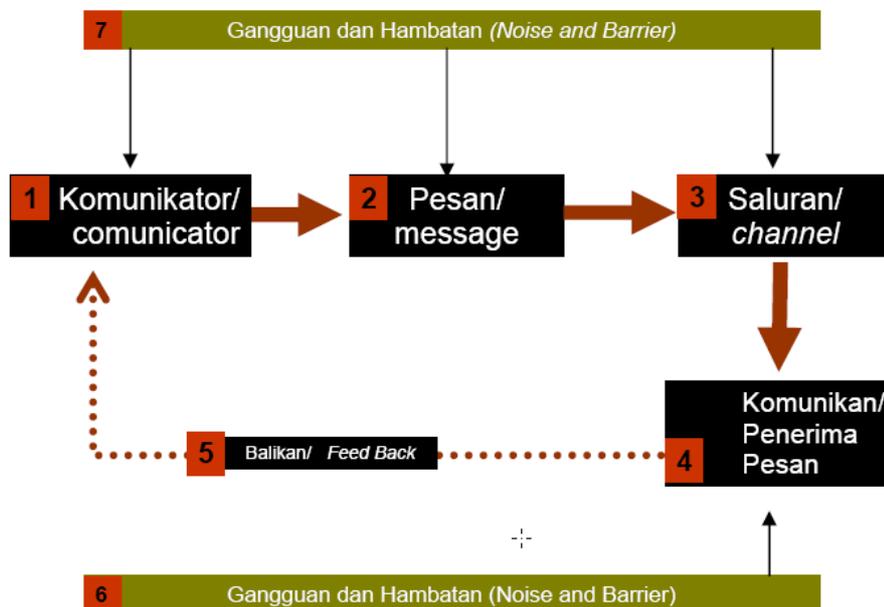
Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai pengajar atau fasilitator.

Pembelajaran membutuhkan interaksi. Seorang pelajar akan lebih cepat mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dengan bantuan dari guru, pelatih, atau instruktur. Di sini terjadi proses komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Pada hakekatnya, hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Ini berarti bahwa di dalam proses pembelajaran tersebut terjadi proses penyampaian pesan dari seseorang (sumber pesan) kepada seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan). Proses komunikasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



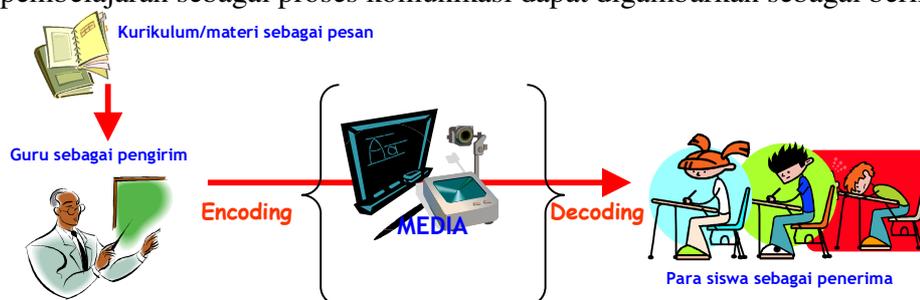
Pesan yang dikirimkan biasanya berupa informasi atau keterangan dari pengirim (sumber) pesan. Pesan tersebut diubah ke dalam bentuk sandi-sandi atau lambang-lambang seperti kata-kata, bunyi, gambar, dan sebagainya. Melalui saluran (*channel*), seperti radio, televisi, OHP/OHT, film, pesan tersebut diterima oleh si penerima pesan melalui indera (mata dan telinga) untuk diolah, sehingga pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan dapat diterima dan dipahami oleh si penerima pesan.



Gambar di atas menunjukkan bahwa komunikasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan beberapa komponen, diantaranya komunikator, komunikan, pesan, saluran, umpanbalik, gangguan dan hambatan. Pesan (*message*)

yang disampaikan oleh komunikator diteruskan oleh saluran (*channel*) sampai ke komunikan sebagai penerima pesan. Umpanbalik yang diberikan oleh komunikan akan menunjukkan dipahami atau tidaknya sebuah pesan oleh komunikan tersebut. Umpanbalik positif menunjukkan bahwa pesan dipahami dengan baik, sebaliknya umpanbalik negatif menunjukkan pesan mungkin saja tidak dipahami dengan benar.

Uraian di atas menunjukkan bahwa media merupakan bagian dari proses komunikasi. Baik buruknya suatu komunikasi itu bergantung pada penggunaan saluran dalam komunikasi tersebut. Saluran yang dimaksud adalah media. Karena pembelajaran pada dasarnya merupakan proses komunikasi, media yang dimaksud adalah media pembelajaran. Dengan kata lain, penyampaian pesan di lingkungan sekolah memerlukan saluran berupa *media pembelajaran*. Kedudukan media dalam pembelajaran sebagai proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut.



Guru dalam proses pembelajaran menyampaikan pesan-pesan yang harus dikomunikasikan. Pesan-pesan tersebut umumnya merupakan isi dari suatu topik pembelajaran. Pesan-pesan tersebut disampaikan oleh guru kepada siswa melalui suatu media dengan menggunakan prosedur pembelajaran tertentu yang disebut *metode*.

Sistem pembelajaran saat ini menuntut siswa untuk tidak hanya berperan sebagai komunikan atau penerima pesan. Lebih dari itu, siswa juga dituntut untuk menjadi komunikator atau penyampai pesan. Di sini terjadi suatu komunikasi dua arah (*two-way traffic communication*) atau banyak arah (*multi-way traffic communication*). Berbagai bentuk komunikasi pembelajaran, peran media diperlukan untuk lebih meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang efektif akan terjadi apabila ada komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan melalui media pembelajaran tertentu. Komunikasi tersebut akan efektif jika terdapat “frekuensi” yang sama antara penyampai pesan dengan penerima pesan (contohnya, seorang guru SD menyesuaikan suatu topik dengan kata-kata yang dapat diterima oleh alam pikiran siswa SD). Di sisi lain, guru dituntut untuk menciptakan kondisi belajar, termasuk media pembelajaran, yang merangsang agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Dikaitkan dengan sistem, pembelajaran merupakan suatu sistem karena di dalamnya terkandung beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut mencakup: tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Masing-masing komponen saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan.

Istilah 'media' berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari *medium* yang secara harfiah berarti 'perantara' atau 'pengantar'. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication Technology/AECT) di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar (buku, film, kaset, gambar, radio, grafik, televisi, dan komputer). Media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran.

Pustaka

- Alavi, M., & Gallupe, R. B. (2003). Using Information Technology in Learning: Case Studies in Business and Management Education Programs. *Academy of Management Learning and Education*, 2(2), 139–153.
- Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. *Sloan Management Review* (Summer), 11-27.
- Govindasamy, T. (2002). Successful Implementation of e-Learning: Pedagogical Considerations. *Internet and Higher Education*, 4, 287–299.
- Hammer, M., dan Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. New York: HarperBusiness.
- Kirkpatrick, D. (2001) Who Owns the Curriculum? Dalam Brook, B., dan .Gilding, A. *The Ethics and Equity of e-Learning in Higher Education*. Melbourne: Equity and Social Justice, Victoria University, 41-48.
- Miarso, YH. (2004). *Teknologi Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Sudjana, N. & Rivai, A. (1990). *Teknologi pengajaran*. Bandung: Sinar Baru.

PROFESIONALISME GURU MENUJU GURU KALBU

Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd.
STKIP GARUT

Abstrak

”Profesionalisme”, adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional. Sementara itu, guru kalbu merupakan derajat tertinggi dalam jenjang penampilan kinerja guru. Dalam kinerjanya, guru kalbu akan memancarkan sinar dan energi getar yang bersumber dari keyakinan agama, kebenaran, keharuan rasa, cinta kasih sayang, rendah hati, bersyukur, serta keterpaduan jiwa dan raga secara terintegrasi dan sinergitas.

Kata kunci : *Profesionalisme, professional, guru kalbu.*

A. Peran Guru Profesional

Peran guru dalam pendidikan sangat jelas yaitu sebagai motivator, fasilitator, inspirator, pembimbing, pengayom, dsb. Peran ini dapat disebut sebagai peran pedagogis guru. Justru peran inilah yang dianggap semakin penting di tengah tantangan degradasi moral, dan pergeseran nilai-nilai moral, dan di tengah-tengah hingar-bingar budaya materialisme dan hedonisme.

Apa dan bagaimana pun keadaan dan perubahan kurikulum, guru dari dulu sampai sekarang dan sampai kapan pun akan tetap berperan sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara tugas pendidik yaitu menuntun segala kekuatan kodrat (fitrah) yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk itu, guru harus menjadi pribadi yang tangguh, menjadi penjaga moral, dan menjadi contoh ideal bagi anak didiknya.

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa: "*Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sementara itu, dalam ayat 2 pasal 1 disebutkan bahwa "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat"*. Guru dan dosen profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan *keahlian*, baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Berdasarkan penjelasan pada undang-undang nomor 14 tahun 2005 (pasal 1) guru mempunyai peran: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Hal inilah yang menjadi peran guru profesional. Berikut dijelaskan tentang peran guru profesional secara ringkas.

1. Mendidik

Peran mendidik merupakan peran pertama dan utama guru yang profesional. Apa sesungguhnya mendidik itu? Mendidik merupakan suatu proses yang panjang, memerlukan waktu yang lama, yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Pendidikan adalah suatu bentuk pergaulan antara anak dan orang yang telah dewasa yang dalam pergaulan itu ada pengaruh yang datang kepada anak sehingga anak dapat

berkembang ke arah yang diinginkan, yakni ke arah kedewasaan dalam arti fisik maupun psikis atau ke arah kematangan, baik secara jasmani maupun rohani.

2. Mengajar

Guru selain mempunyai peran mendidik, juga mempunyai peran mengajar. Guna mencapai tujuan pendidikan tentunya harus ada hal yang menjadi bahan atau materi untuk disampaikan kepada anak didik agar dapat dikuasai dan dipahami. Peran guru dalam menyampaikan materi ajar inilah yang termasuk peran mengajar guru. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan pengetahuan (*knowledge*). Hal ini sejalan dengan pandangan kaum progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks kepada anak didik agar mereka memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas.

3. Membimbing

Peran membimbing bagi guru merupakan peran yang tidak kalah pentingnya daripada peran mendidik dan mengajar karena dalam kegiatan membimbing inilah diperlukan kesabaran dan ketekunan. Hasil membimbing diharapkan lahirnya anak didik yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, berkarakter, dan memiliki keterampilan hidup (*life skill*) yang mumpuni. Pada saat yang bersamaan, akhlak, budi pekerti, karakter, dan keterampilan guru akan dipandang sebagai sesuatu yang harus sudah melekat pada diri guru saat guru itu berperan sebagai pembimbing. Apabila budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, dan karakter guru belum "mendarahdaging" pada dirinya maka disadari atau tidak kegiatan membimbing anak didik akan tidak efektif, sangat mungkin juga terjadinya resistensi dari anak didik. Peran membimbing bagi guru ibarat kata pepatah, "Guru harus menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru". Apabila tidak demikian, maka yang terjadi yaitu "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari". *Nauzubillah!*

4. Mengarahkan

Peran mengarahkan bagi guru memerlukan wawasan yang luas dan kesabaran. Seorang guru yang profesional tidak hanya melaksanakan tugas mendidik dan mengajar, tetapi juga mengarahkan anak didiknya guna menempuh kehidupan mereka agar lebih baik. Peran mengarahkan ini pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan kegiatan lain yang berisi aspek-aspek pembinaan mental spiritual.

5. Melatih

Guru harus juga mempunyai kemampuan memberikan keahlian dan keterampilan kepada anak didiknya. Hal ini dapat membekali anak didik untuk bekal kehidupan mereka. Peran melatih hubungannya dengan *life skill*, keahlian hidup. Dalam konteks ini, guru dituntut memiliki kreativitas yang tinggi.

6. Menilai dan mengevaluasi

Peran menilai dan mengevaluasi merupakan peran yang dianggap peran akhir yang harus dilakukan guru. Fungsi menilai dan mengevaluasi di antaranya sebagai umpan balik (*feedback*) bagi guru untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peran menilai dan mengevaluasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh guru. Dalam arti luas, kegiatan menilai dan mengevaluasi anak didik dapat berupa portofolio yang secara kontinu dilakukan oleh guru.

B. Citra Pribadi Guru

”Marwah” alias kehormatan diri, harga diri, atau nama baik guru akan membangun kewibawaan guru, sehingga seorang guru harus memiliki citra pribadi yang mumpuni. Hal ini dapat berguna bagi guru dalam mengemban perannya. Menurut Surya (2013) dalam buku ”Psikologi Guru: Konsep dan Aplikasi, dari Guru untuk Guru” setidaknya terdapat enam hal yang dapat membangun kewibawaan atau citra pribadi guru. Pertama, penanaman nilai-nilai dasar yang kuat dalam diri guru,

terutama nilai-nilai yang bersumber dari nilai-nilai agama. Dengan nilai yang mantap dan kuat, perilaku dapat ditampilkan secara lebih terarah dan tepat sehingga dapat memberikan citra yang baik. Kedua, memiliki konsep diri yang jelas dan mantap, baik konsep diri ideal maupun aktual. Lebih baik lagi manakana tidak terdapat jarak antara konsep diri ideal dan konsep diri aktual. Konsep diri yang memadai dapat membantu pribadi dalam menampilkan perilaku secara tepat sehingga pada gilirannya dapat memberikan penampilan dengan citra yang baik. Ketiga, mengenal dan memahami lingkungan dengan sebaik-baiknya untuk dapat lebih memahami peran-peran yang harus diemban dan diejawantahkan. Keempat, menciptakan suasana kehidupan keluarga yang harmonis dan saling pengertian serta kasih sayang di antara anggota keluarga. Kekacauan kehidupan keluarga dapat mengarah pada timbulnya perilaku yang kurang tepat sehingga menimbulkan citra yang kurang baik. Sebaliknya, suasana kehidupan keluarga yang harmonis dapat menunjang penampilan diri dengan citra yang baik. Kelima, memperluas kontak-kontak sosial melalui pergaulan yang baik dan sehat, Pergaulan yang baik dan sehat merupakan sumber belajar yang kaya untuk pengembangan diri, termasuk belajar bagaimana mewujudkan penampilan dengan cara yang baik. Keenam, meningkatkan kompetensi diri yang berupa perangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan kehidupan. Untuk dapat mewujudkan penampilan yang dapat memberikan citra yang baik, diperlukan sejumlah pengetahuan dan keterampilan serta sikap tertentu sesuai dengan perannya sebagai guru.

Dengan keenam citra pribadi guru tersebut dengan sendirinya akan hadir "marwah" atau muruah alias kehormatan atau harga diri akan menyertai. Hal inilah yang menjadikan profesi guru tidak akan lekam dimakan zaman dan tidak akan tergantikan oleh alat secanggih apa pun. Dengan kata lain, kepribadian guru akan turut melestarikan profesi guru, yang sekaligus memiliki marwah. Oleh karena itu, marwah atau harga diri guru suatu keniscayaan yang harus disadari sepenuhnya oleh semua guru.

Citra guru yang ideal secara rinci digambarkan oleh Surya (2013: 222-214) di antaranya sebagai berikut: 1) seseorang yang mampu menerangi dan menuntun siswa dari kegelapan menuju tempat yang terang dan membuat mereka sebagai manusia dalam dunia yang benar; 2) sebagai katalisator dalam proses kreativitas; 3) seseorang yang mampu merangsang pikiran siswa dan menginspirasi mereka untuk menuju pada kesempurnaan dalam bidang yang berbeda; 4) seseorang yang mampu membentuk perilaku siswa melalui pengalaman, gagasan, dan dengan nilai-nilai sendiri; 5) seseorang yang dapat membimbing, membantu, dan mengarahkan siswa untuk berkembang dalam diri mereka suatu rasa tanggung jawab untuk tindakan yang dilakukan mereka; 6) seseorang yang mampu membangun karakter siswa dengan jiwa, pikiran, dan perbuatannya; 7) seseorang pembuat pribadi manusiawi, yang memenuhi tanggung jawab seluruh putaran perkembangan individu dan menuntut siswa masuk ke dalam kehidupan sosial.

Kesadaran pentingnya marwah dan citra dalam diri guru dapat menjadikan perisai dalam membentengi diri terhadap perilaku yang menyimpang. Guru harus menjadi kekuatan moral (*moral of force*) sekaligus menjadi benteng terakhir sebagai penjaga moral dan kewibawaan. Dengan demikian, marwah dan citra diri guru justru harus menjadi pengenalan utama dan keunggulan profesi guru dibandingkan dengan profesi lainnya. Semoga para guru di tanah air tercinta semakin memiliki marwah dan citra yang tinggi. Amin.

C. Guru Kalbu

Adakah guru kalbu? Pertanyaan ini terjawab tatkala hadir sosok guru bernama Een Sukaesih, sosok guru sejati asal Sumedang. Dalam keadaan lumpuh total, mampu mendidik dan mengajar kepada anak-anak. Melalui publikasi berbagai media, nama Een Sukaesih telah menjadi perhatian publik dan menjadi sumber inspirasi banyak orang, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Bahkan, kisahnya telah dibukukan oleh Zaenudin H.M. (Kepala Disbudpora Sumedang) dengan judul “Een Sukaesih Sang Guru Qolbu”.

Menurut Surya (*Pikiran Rakyat*, 28-11-2013) guru kalbu merupakan derajat tertinggi dalam jenjang penampilan kinerja guru. Dalam kinerjanya, guru kalbu akan memancarkan sinar dan energi getar yang bersumber dari keyakinan agama, kebenaran, keharuan rasa, cinta kasih sayang, rendah hati, bersyukur, serta keterpaduan jiwa dan raga secara terintegrasi. Setiap level guru tentu saja memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda, seperti berikut ini. Pertama, **guru aktual**, yaitu guru yang datang ke sekolah, mengikuti PLPG bersertifikasi, tetapi batinnya belum tentu menjadi guru. Kedua, **guru harmonis**, yaitu guru yang biasa, yakni mengajar dengan baik, tekun, rajin, dan bagus, tetapi batinnya sejak semula tidak ingin menjadi guru. Guru seperti itu mampu memanipulasi kondisi dirinya untuk tampil sebagai guru yang baik. Dengan demikian, ia tampak harmonis sebagai guru, meskipun tidak seluruhnya bersumber dari kondisi pribadi yang dituntut sebagai guru. Kadang-kadang terjadi konflik antara kondisi pribadinya dengan tuntutan sebagai guru, tetapi dapat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak harmonis. Ketiga, **guru karakter** yaitu guru yang tampil penuh karakternya. Sosok guru yang menjelma berbasis karakter yang melekat dalam dirinya sebagai bagian dari keseluruhan kepribadinya yang telah terbentuk sejak masa kecil dan bukan terbentuk karena pelatihan semisal PLPG, dan sejenisnya. Dengan demikian, penampilan kinerjanya sebagai guru sesuai, serasi, selaras, dan seimbang dengan karakter yang melekat dalam dirinya. Penampilannya sebagai guru sekaligus penampilan kualitas karakternya. Keempat, **guru qolbu** (baca: kalbu) yaitu guru yang benar-benar puncak, guru dengan level tertinggi. Guru yang penampilannya berbasis kualitas kalbu atau hati nuranya secara tulus ikhlas sehingga menjadi guru merupakan bagian dari kebajikan yang tertanam dalam kalbunya (Zaenuddin, 2013: 214-215)

Perhatikan pernyataan yang dituturkan oleh Een Sukaesih, "Saya menjadi besar seperti ini berkat dukungan media dan semua pihak. Akan tetapi, kebesaran ini bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk ibadah semata. Saya bisa bangkit dari keterpurukan, tergerak oleh Hadis yang menyebutkan **sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain**" (*khoirunnas angfa uhum*

linnas, al-Hadis). Lebih dari itu, Islam telah mengajarkan bahwa keteladan merupakan kunci pendidikan. dan sinergitas. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan guru harus menjadi model keteladanan akhlakul karimah atau akhlak mulia. Konsep ini dalam ajaran Islam telah dihadirkan jauh sebelum kehadiran pemodelan (*modeling*) oleh Albert Bandura (1977) dengan *Social Learning Theory*-nya. Sungguh, telah ada teladan yang baik bagi kita sebagai umat Islam, terlebih yang mengemban profesi guru, yaitu Muhammad *rasulallahu salallahu alaihi wasalam*. Keteladanan beliau berlaku untuk sepanjang zaman dan telah terbukti menorehkan sejarah peradaban dari kegelapan menuju terang benderang. Oleh karena itu, keteladanan dan keihklasan merupakan kunci utama menuju guru kalbu *Wallahu alam bisshawab!*

D. Pustaka Rujukan

- Bandura. A. (1977). *Social Learning Theory*. London: Prentice Hall International, Inc.
- Hasim, A. (2013). "Marwah" Guru (*Pikiran Rakyat*, 29-12-2013).
- Depdiknas. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kartadinta, S. (2013). *Smabutan dalam Acara Wisuda Gelombang II UPI*. (*Pikiran Rakyat*, 2- 10-2013).
- Sagala, S.(2006). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, M. (2013). *Psikologi Guru: Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru*. Bandung: Alfabeta.
- (2013). *Een Sukaesih Sang Guru Qolbu*. (*Pikiran Rakyat*, 28-11-2013).
- Surya, M., Hasim, A., Suwarno. (2010). *Landasan Pendidikan: Menjadi Guru yang Baik*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zaenuddin. (2013). *Een Sukaesih: Sang Guru Qolbu*. Jakarta Selatan: Change Publication.

**THE CORRELATION BETWEEN STUDENTS' SELF CONFIDENCE
AND THEIR SPEAKING SKILL
(In the Second Grade of the English Education Department of STKIP
Garut)
Teten Mohamad Sapril Mubarok
Universitas Garut**

ABSTRACT

The Correlation between Students' Self Confidence and Their Speaking Skill. (In the Second-Grade Students of English Education Department of STKIP Garut)

This study was undertaken by the writer because most of English students often got difficulty in English speaking. Especially in their confident to speak English. To have a good English speaking, the students are expected to be able to build, develop and show their confident to use English speaking in any opportunity. Besides that, through self confident the students costumize to use English as dailly Communication, it is important for the students to get more interaction and practices in English speak in order they can mastering English speaking skill well.

This study was aimed at investigating the corellation between students' self confidence and theirs' speaking skill. It was intended not only to solve the students difficulties in speaking English, But also to answer the main question " Is there a significant corellation between students' self confidence and their speaking skill?".

The writer used the correlational method to find out and investigate whether there was a corellation or not between two variabels and how strong it is. The respondent, Sixty four students of the second grade of English Education Program of STKIP Garut were selected proporsionl stratified randomly. The study began by assigning the students to answer the self confidence questionnaires, then the writer collect the students speaking score from first until third which have provided in English program office. Beside that, the writer clasified category for confidennce and took average speaking score from first until third to support the result of the data analysis.

The instrument include two variabels: Students' self confidence and average of speaking score list. To analyze the data, the writer used Pearson/Product Test formula to test the corellation and to test hypotesis. The result of the data analysis showed the coefficient corellation between two variabels is 0,007 (sig = 0,007). Based on this result, it could be concluded that there was a very significant corellation between students' self confidence and their speaking skill. For this reason, the researcher purposed some recomendation for the teacher and the students

of STKIP Garut. The students suggested that they should build, develop, force and show their confidence of practices in speaking English.

INTRODUCTION

Speaking is a crucial part in second or foreign language. Despite its importance and crucial many students still find any obstacle to speak a lot and more in class or in daily communication. However, today's world requires that every student should brave to speak a lot, because students can involve in global competition and development. In order to be able to speak well, the student should learn about the factors that affect English speaking skills first.

“Actually, there are several factors that affect our English speaking skills. If we can honestly assess ourselves and say we are good in all of the said factors, then we are good English speakers. The factors are Listening comprehension, grammatical accuracy, pronunciation, accent, vocabulary, appropriateness of answers, and organization of ideas, fluency, enthusiasm, self-confidence, paralinguistic communication skills and length of answer”
(<http://www.englishtrainer.blogspot.com>).

There are a lot of factors that affect English speaking skills, but the writer takes interest with self confidence. One of the psychological factors that can influence the students' speaking skill is self-confidence. The heart of all learning is a person's belief in his or her ability to accomplish the task.

Self confidence is an attitude that is characterized by a positive belief that you can take control of your life and of your plans. It is a belief in your abilities. People who are self-confident are those who acknowledge their capacity to do something and then proceed to do these things. They do not rely on the approval of other
(<http://www.highbeam//1P3-1538622701.html>).

Students who have high self confidence are not afraid to explore their ability. They are usually active in the classroom and not afraid to make mistake in learning. Some students have high level of self confidence and low level of self- confidence. The students who have high level of self confidence are usually more active in the class than the students who have low level of selfconfidence. The students who have high self confidence are not afraid to ask questions or to express their opinion. Asking questions or uttering opinion in the classroom requires certain courage to stand up and interrupt the teacher to ask a question, and it requires self confidence to do that.

Dealing with the speaking in front of class, the students having high self-confidence will perform better than the students having low self confidence. The reason is the most important factor that determines the performance of students in school is neither intellect, nor energy or talent, it is the amount of self confidence a student has which decides how much he will be able to use his talent, energy, and intellect. Self confidence is a personal factor that plays a supportive role in the achievement of foreign language learning. Some studies claim that no language learning activities will be carried out successfully without it (Huitt, 2004& Khodadad, 2003, cited in Hayti 2008,; Brown, 1994). It may facilitate or debilitate academic achievement. Foreign language learners who possess high self confidence perform well and most likely believe themselves to be capable learners. When there is low self confidence, on the contrary, „learners suffer from uncertainty, insecurity, fear and social distance“. (Rubio, 2007 :7). The students having high self confidence

do not have problem to speak in front of class or to utter their opinion. They are not afraid to make little mistakes or errors when they are speaking because they considered it as a part of learning. If they make mistakes, they always have courage and self confidence to try again and again.

There are many students have great skill in other language skill, such as writing, reading, listening, but they are still poor in mastering speaking skill because of lack of confidence. The students are afraid to make mistakes in speaking English. Among the four language skills, the achievement of oral performance is thought to be highly correlated with self confidence. Forigen Language learners can't speak the language or express themselves freely and fluently without some degree of it (Brown, 1994). Thus the main objective of this paper was to examine **“the correlation between student’s self-confidence and theirs speaking skill”**.

METHOD

For this research, the writer used quantitative method, because the writer needed the data to be analyzed using mathematically based method in particular statistics. It was stated in Research Methodology that quantitative research is a means for testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables, in turn, can be measured, typically on instruments, so that numbered data can be analyzed using statistical procedure (Creswell, 2009).

Another source stated that, “Quantitative data analysis is a powerful research form, emanating in part from the positivist tradition. It is often associated with large-scale research, but can also serve smaller scale investigations” (Cohen, Manion, & Morrison, 2007)

PROCEDURE

For this research, the writer had the following procedures to get data. There were several steps which implemented on collecting data. The writer gave the student’s questionnaire to measure their level of self confidence. Then, he correlated the result of questionnaire with their average of English Speaking value.

ANALYSIS 1. Findings

Collecting data by giving questionare and checked the final average speaking test’s score of students, the researcher then analyzed the data. The analysis of data was divided into the following:

1.1 The Validity and Reliability

The instruments that the writer taken had been used by other researcher. The questionnaire was adopted from Mieke Kharolina (021014234) BK UNESA in 2006 for her research entitled “*Hubungan antara kecerdasan emosi dengan percaya diri pada siswa kelas X SMA KARTIKA V-3 SURABAYA*”, besides the instruments also used in (illarezkiwanda.blogspot.com/2012./angket-percaya-diri.html) by illa suryaningsih BK-B 2010 (101014051) and the result that the quisionaries was valid and reliable and for spesific information about validity and reliability test the writer

wrote the step in tabel 4.10 in the Appendix . and other researcher with the same dependent variable. The test, which was used, was taken from the standard speaking test of first until third speaking test in STKIP Garut. Hence, the students' score was available in this university.

1.2 The Normality Test

In this research the normality of final test was tasted by using liliefors with level significant α 0.01 the result from normality of the final test could be seen in table 4.1.

Tabel 4.1 Result Tests of Normality

Instrument	Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.
Confident	.986	64	.699
Speaking	.968	64	.092

a. Lilliefors Significance Correction

The table of 4.1. Showed that the data of self confidence and speaking score was normal, because the Sig. > α means 0.699 and 0.092 > 0.01. So it could be concluded that the data was normally distributed, because the data was normally distributed the writer continued to analyze this data with used Pearson/Product Moment.

1.3 Pearson/Product Moment Test

The Product Moment Test used to check the correlation among the variables.

The result of test would be presented in the table 4.2 and the step of this test would be presented in the appendix.

Table 4.2 Pearson/ Product Moment Test (Correlations)

		Confidence	Speaking
Confidence	Pearson Correlation	1	.333**
	Sig. (2-tailed)		.007
	N	64	64
Speaking	Pearson Correlation	.333**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	
	N	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

From the table above, it could be seen from the result of accounting that the amount of correlation between the variable was 0.333(**) it means the correlation between self confidence variable and speaking skill variable was 0.333 was significant. On the criteria $0.20 \leq r \leq 0.40$ meaning low. Based on that data the writer concluded between students' self confidence with their speaking skill had low correlation.

1.4 The Significance of Correlation

After known about the result of Product Moment Test, the writer examined the hypothesis about the significance of the correlation. He used significant α 0.01 to

know the significance. After examining the data, it could be got the amount of significance correlation between students' self confidence and theirs' speaking skill. $\text{sig} < \alpha$ means $0.007 < 0,01$ means H_0 was rejected and there was significance correlation between students' self confidence and theirs' speaking skill. And for more accurate information about amount of correlation significance and amount of influence between students' self confidence and their speaking skill could be seen in tabel 4.3 and the steps would be presented in the Appendix.

Tabel 4.3 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.333 ^a	.111	.096	2.66384

a. Predictors: (Constant), confidence

From the table above could be seen that $R = 0.333$ and $R \text{ Square} = 0.111$, it means there were correlation and influence between students' self confidence and their speaking skill. And to made easy to understand based on the rule to determined coefficient determination could be multiplied by 100%, so the result was 33% for correlation between students' self confidence and their speaking skill and the influence students' self confidence toward students' speaking skill was 11%. Based on the result above the writer conclude that there was significance correlation between students self confidence and their speaking skill.

RESULT

Based on the research question for this research “what is the correlation between students’ self confidence and their speaking skill?” and developed into four more specific question, the quantitative finding answered it. Then the first question “How much the corellation between students’ self confidence and their speaking skill?” second question “Does the students’ self confidence have significant correlation toward students’ speaking skill?” third question “How significant is the influence between students’ self-confidence and theirs speaking skill?” Then for the fourth question “How is the Equation form between students’ self confidence and theirs’ speaking skill?”

The first question “How much the corellation between students’ self confidence and theirs’ speaking skill?” Quantitavely the amount of the corellation between students’ self confidence and their speaking skill was 0.333 or 33 %.

Then for the second question “Does the students’ self confidence have significant correlation toward students’ speaking skill?” Quantitavely, yes, there is a significant corellation between students’ self confidence and theirs’ speaking skill. After they asked about their confident in learning speaking skill and saw their average first until third speaking score in third semester in second grade, the corellation was significant. And for the third question “How significant is the influence between students’ self-confidence and their speaking skill?”

Quantitatively the amount of significant between students' self confidence and their speaking skill was 0.111 or 11%. 11% was very significant and be the key to be first step in mastering speaking skill in order to mastering another aspects in speaking skill like Listening comprehension, grammatical accuracy, pronunciation, accent, vocabulary, appropriateness of answers, and organization of ideas, fluency, enthusiasm, self-confidence, paralinguistic communication skills and length of answer".

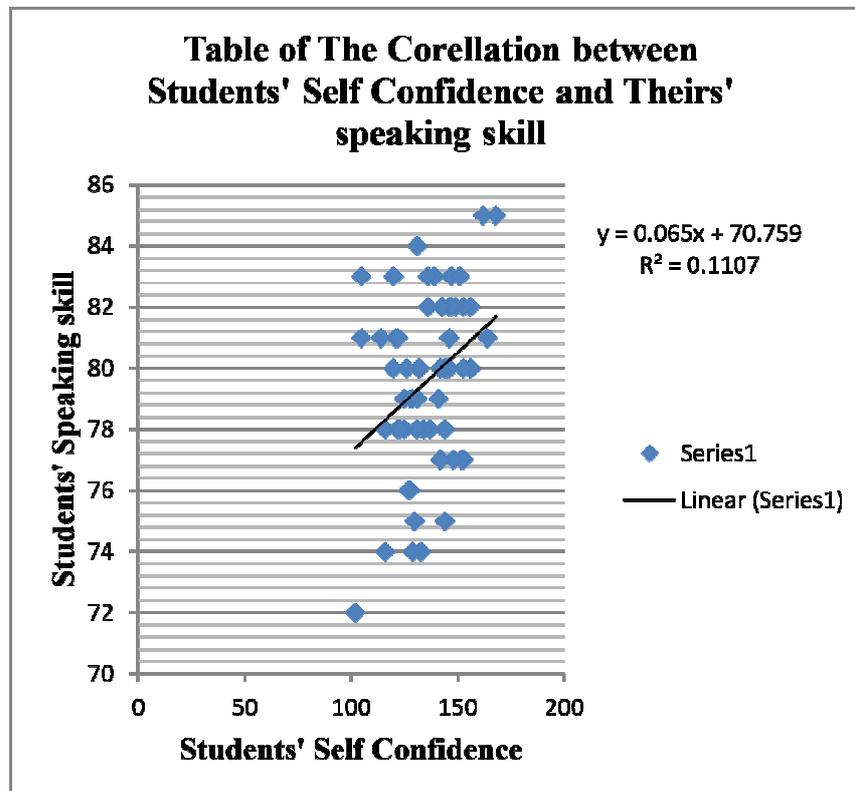
Then for the fourth question "How is the Equation form between students' self confidence and their' speaking skill?" Quantitatively the equation form between students' self confidence and their' speaking skill is $Y = 0.065 X + 70.759$. And to get strong source could be seen the table 4.4 and graphic table 4.5

Table 4.4 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70.759	3.214		22.016	.000
	confidence	.065	.023	.333	2.778	.007

a. Dependent Variable: speaking

Table Grafic 4.5



CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

This study investigated the correlation between students' self confidence and their speaking skills. After conducting the research, the writing come to the final part of the whole paper is conclusions and suggestions. Based on the research and explanation the description of the conclusions and suggestions are the following.

Conclusions

1. There is low correlation between students' self confidence and their speaking skill. Students with high self confident got better score than students with low self confident. Confident students able to explore their skill and have high brevary to try, express what they want and ask what they don't understand. Dealing with it in learning strategy if students do so they understood, confidents students' have brevary to do and expressed english speaking so they understood how to produced many words and when they must to used the words corectly in communication.
2. Actually there are several factors in affect English speaking. They are Listening comprehension, grammatical accuracy, pronunciation, accent, vocabulary, appropriateness of answers, and organization of ideas, fluency, enthusiasm, self-confidence, paralinguistic communication skills and length of answer. Self confidence one of many factors in afect speaking skill but it the most important. Self confidence is our believe and brevary to take and do Positive think and action in every opportunity. In this case Believe and bervary to take and do communication used English. The importants conclusions self confidence is the key to mastering speaking skill in order another factors can explore well.
3. The description about corellation between self confident and speaking skill in this reasearch are it can be got the amount of corellation between students' self confidence and theirs' speaking skill is 33% , the amount of influence students' self confidence toward students' speaking skill is 11% , the form of regresion line

equation is $Y = 0.065 X + 70.759$. It means there are significant correlation between students' self confidence and their speaking skill and self confident has important role in mastering speaking skills.

Suggestions

There are some suggestions to contribute the students in mastering speaking skill :

1. The students must have high confident in practices use English speaking in every opportunity
2. The students should learn more how to build self confidence and its better to read David Lawrence Preston (2007) book "365 steps to self confidence" and Kate Burton and Brinley Platts (2006) book " Building Confidence For Dummies" 3. The students should make more communication in English as much as they can. Like join English club, English debating forum and try speak english in daily communication.
4. The Lectures should build, develop and force students confidence first in learning English speaking in order another factors in mastering English can easily to be mastering.
5. To the reader its better this research become the refrence to mastering Speaking skill and self confidence and to get more comprehension understanding its better too read same another research or books as comparison.

REFERENCES

- Brown, H. (1994). *Principles of Language Learning and Teaching*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice-Hall.
- Brown, H. (2000). *Personality Factors. Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Pearson education.
- Burton & Pillats. (2007). *Building Confident for Dummies*. England : John Wiley & Sons, Ltd.
- Cohen, Manion & Morrison. (2007). *Research Methods in Education*. Francies : Routledge 2 Park Square.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Lawrence, Preston, David. 2007. *365 Steps to Self Confidence*. United Kingdom : How To Content A division of How To Books Ltd.
- Miyagawa, L. (2010). *What is the difference between self-esteem and self confidence?* Retrieved from 20/02/2011).
- Nunan, D. (2003). *Practical English Language Teaching*. New York: McGraw-Hill.
- Risnadedi. (2001). *Developing Students Speaking Ability*. Journal of SMP Negeri 17 Pekanbaru. (7). 56-58.
- Rubio, F. (2007). *Self-Esteem and Foreign Language Learning*. Cambridge Scholars Publishing.
- Sihera, Elaine. (2007). *The Definition of Confidence*. United Kingdom.
- Sundayana, Rostina. Drs, M.Pd. 2013. *Statistika Penelitian Pendidikan*. Garut : STKIP Garut Press.
- Tarigan, H. Guntur. (1990). *Prinsip-prinsip Dasar Metode Riset Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Wallace, D'Arcy-Adrian. (1978). *Junior Comprehension 1*. England: Longman.

Widdowson, H. G. (1996). *Teaching Language as Communication*. Walton Street :
Oxford University Press.

Wilson, S. (1983). *Living English Structure*. London: Longman.